

**STRATEGI PENGEMBANGAN DESA PINGGIRAN MENJADI
DESANAWACITA MELALUI PEMANFAATAN DANA DESA
DESENTRALISASI ERA KEPEMIMPINAN JOKOWI DI
KABUPATEN SIMALUNGUN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Program Studi Ekonomi Pembangunan*



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh:

Nama : Tri Dias Palah
NPM : 2005180013
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Konsentrasi : Riset Ekonomi dan Bisnis

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR

Panitia Ujian Strata -I Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Selasa, 13 Agustus 2024, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang :

MEMUTUSKAN

NAMA : TRI DIAS PALAH
N P M : 2005180013
PROGRAM STUDI : EKONOMI PEMBANGUNAN
JUDUL TUGAS AKHIR : STRATEGI PENGEMBANGAN DESA PINGGIRAN MENJADI DESA NAWACITA MELALUI PEMANFAATAN DANA DESA DESENTRALISASI ERA KEPEMIMPINAN JOKOWI DI KABUPATEN SIMALUNGUN

DINYATAKAN : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

(SRI ENDANG RAHAYU, S.E., M.Si.)

Penguji II

(Dr. SYLVIA VIANTY RANITA, S.E., M.Si.)

Pembimbing

(Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, S.E., M.Si.)

Panitia Ujian

Ketua

(Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si., CMA)

Sekretaris



(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Tugas akhir ini disusun oleh :

Nama Lengkap : TRI DIAS PALAH
N.P.M : 2005180013
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Alamat Rumah : JL. PERHUBUNGAN DUSUN IX
Judul Tugas akhir : STRATEGI PENGEMBANGAN DESA PINGGIRAN MENJADI
DESA NAWACITA MELALUI PEMANFAATAN DANA DESA
DESENTRALISASI ERA KEPEMIMPINAN JOKOWI DI
KABUPATEN SIMALUNGUN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan tugas akhir.

Medan, Juli 2024

Pembimbing Tugas akhir

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, S.E., M.Si.

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, S.E., M.Si.



Dr. H. JANURI, SE., M.M., M.Si., CMA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA
UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Lengkap : TRI DIAS PALAH
N.P.M : 2005180013
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Alamat Rumah : JL. PERHUBUNGAN DUSUN IX
Judul Tugas akhir : STRATEGI PENGEMBANGAN DESA PINGGIRAN
MENJADI DESA NAWACITA MELALUI PEMANFAATAN
DANA DESA DESENTRALISASI ERA KEPEMIMPINAN
JOKOWI DI KABUPATEN SIMALUNGUN

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Tugas akhir	Paraf	Keterangan
25/06/2024	Bab 4 : Membuat gambaran umum dan jelaskan perkembangan dana desa di Kab. Simalungun 2015-2023 beserta capaian IDM.		
27/06/2024	Bab 4 : Tambahkan data dan mengolah data dana desa dan IDM kab. Simalungun.		
05/07/2024	Bab 4 : Regresi data (OLS) faktor yang mempengaruhi IDM di masa Jokowi data.		
10/07/2024	Bab 4 : Regresi data (PLS) faktor yang mempengaruhi Dana Desa di Desa Srimantun dan Kecamatan Sidamanik.		
17/07/2024	Bab 4 : Olah data menggunakan Eviews dan Smart PLS dan jabarkan hasil nya.		
20/07/2024	Bab 5 : Buat kesimpulan dan saran serta perbaiki penulisan skripsi		
25/07/2024	ACC Tugas Akhir		

Pembimbing Tugas akhir

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, S.E., M.Si.

Medan, Juli 2024
Diketahui /Disetujui
Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, S.E., M.Si.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR



Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Lengkap : Tri Dias Palah
N.P.M : 2005180013
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Judul Tugas akhir : Strategi Pengembangan Desa Pinggiran Menjadi Desa Nawacita Melalui Pemanfaatan Dana Desa Desentralisasi Era Kepemimpinan Jokowi di Kabupaten Simalungun

Dengan ini menyatakan bawah tugas akhir saya yang berjudul "**Strategi Pengembangan Desa Pinggiran Menjadi Desa Nawacita Melalui Pemanfaatan Dana Desa Desentralisasi Era Kepemimpinan Jokowi di Kabupaten Simalungun**" bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan



TRI DIAS PALAH

ABSTRAK

STRATEGI PENGEMBANGAN DESA PINGGIRAN MENJADI DESA NAWACITA MELALUI PEMANFAATAN DANA DESA DESENTRALISASI ERA KEPEMIMPINAN JOKOWI DI KABUPATEN SIMALUNGUN

Tri Dias Palah

Program Studi Ekonomi Pembangunan

Email : diaspablo1313@gmail.com

Nawacita adalah sembilan prioritas pembangunan lima tahun ke depan. Membangun dari pinggiran merupakan salah satu dari sembilan prioritas yang dimana membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Dana desa mulai diperkenalkan di Indonesia sebagai kebijakan pada tahun 2014. Dimana Dana Desa merupakan program yang baru pertama kali dilaksanakan dalam setahun pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Tujuan penelitian ini adalah melihat perkembangan dana desa dan capaian indeks desa membangun di kabupaten simalungun dan menganalisis variabel bebas Dana Desa, PDRB-PK dan Pengeluaran Pemerintah terhadap IDM serta menganalisa faktor pengetahuan dana desa, penerapan dana desa dan capaian IDM terhadap dana desa. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif. Pada penelitian kuantitatif menggunakan model ekonometrika dan analisa faktor. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan dana desa dan capaian IDM Kabupaten Simalungun berkembang dengan baik, pada hasil olahan data model ekonometrika Dana Desa dan Pengeluaran Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap IDM sedangkan pada variabel PDRB-PK tidak berpengaruh signifikan terhadap IDM. Pada analisa faktor Pengetahuan Dana Desa dan Capaian IDM berpengaruh signifikan terhadap Dana Dana dan Penerapan Dana Desa tidak berpengaruh signifikan terhadap Dana Desa.

Kata Kunci : Indeks Desa Membangun, Dana Desa

ABSTRACT

STRATEGY FOR DEVELOPING SOUTH VILLAGES INTO NAWACITA VILLAGES THROUGH THE UTILIZATION OF DECENTRALIZATION FUNDS IN THE JOKOWI LEADERSHIP VILLAGE ERA IN SIMALUNGUN DISTRICT

Tri Dias Palah

Development Economics Study Program

Email : diaspablo1313@gmail.com

Nawacita are nine development priorities for the next five years. Building from the periphery is one of the nine priorities which develop Indonesia from the periphery by strengthening regions and villages within the framework of a unitary state. Village funds were introduced in Indonesia as a policy in 2014. Village funds were a program that was implemented for the first time in the first year of the administration of President Joko Widodo and Vice President Jusuf Kalla. The aim of this research is to look at the development of village funds and the achievements of the village development index in Simalungun district and analyze the independent variables Village Funds, GRDP-PK and Government Expenditures on IDM as well as analyze the factors of knowledge of village funds, application of village funds and IDM achievements on village funds. The method used in this research is quantitative . Quantitative research uses econometric models and factor analysis. The types of data used in this research are primary and secondary data. The results of this research show that the development of village funds and IDM achievements in Simalungun Regency are developing well. Based on the results of the data processing from the econometric model, Village Funds and Government Expenditures have a significant effect on IDM, while the PDRB-PK variable has no significant effect on IDM. In the factor analysis, Knowledge of Village Funds and IDM Achievements have a significant effect on Fund Funds and Implementation of Village Funds does not have a significant effect on Village Funds.

Keywords: Village Development Index, Village Funds

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil'alamiin. Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan Skripsi yang berjudul **Strategi Pengembangan Desa Pinggiran Menjadi Desa Nawacita Melalui Pemanfaatan Dana Desa Desentralisasi Era Kepemimpinan Jokowi Di Kabupaten Simalungun**. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah SAW beserta keluarganya, para sahabat dan seluruh pengikut Beliau yang insya Allah tetap istiqomah hingga akhir zaman kelak, Amin. Dengan selesainya penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Adapun ungkapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta Rezeki-Nya yang luar biasa serta nikmat iman dan nikmat Kesehatan kepada saya. Dan atas izinnya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Saya ingin berterimakasih kepada diri saya sendiri Tri Dias Palah, yang sudah bertahan dan berkembang dalam menjalani kehidupan.
3. Kedua orang tua, abang, kakak dan adik saya yang sangat saya sayangi dan cintai, yang selalu menjadi orang hebat dan kuat selama hidup saya, yang memberikan semangat dan dukungan kepada saya dalam menghadapi segala proses yang saya jalani dan membuat saya kuat dalam menghadapi segala situasi.

4. Bapak Prof. Dr. H. Agussani, MAP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. H. Januri S.E., M.M., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.
6. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E, M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, S.E., M.Si. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Dr. Prawidya Hariani RS, S.E., M.Si. Selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus dosen pembimbing saya yang telah banyak memberi arahan kepada saya tentang menulis skripsi ini.
9. Ibu Dra. Roswita Hafni M.Si., selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Seluruh Dosen mata kuliah Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya Prodi Ekonomi Pembangunan yang telah memberikan ilmunya yang bermanfaat, semoga menjadi amalan di akhirat kelak.
11. Bapak / Ibu Biro Fakultas Ekonomi yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan berkas-berkas yang dibutuhkan dalam Akademik.
12. Teruntuk Christian Reynaldi Pratama Barawas terimakasih banyak sudah mengajarkan tentang ikhlas dan banyak pelajaran hidup kepada saya.
13. Teruntuk sahabat saya Reynaldy Pradana, Safirda Hasanah, Fadli Rangkuti dan Wira Aditya Pramana.

14. Teruntuk Fani Rasya Kinanti terimakasih banyak untuk support yang diberikan kepada saya.
15. Teruntuk sahabat sekaligus teman seperjuangan dalam menyusun skripsi ini kepada Hazza Rafi Zulkarnain, Voni Yanti, Agung Prabowo, Naufal Maulana Polem.
16. Teruntuk Tim POOPAY kepada Bapak Hadriman dan Khoirun Nisa Lestari terima kasih untuk pelajaran dan pengalaman.
17. Teruntuk Gfriend yakni Nuna Sowon, Nuna Yerin, Nuna Eunha, Nuna Yuju, Nuna SinB dan Nuna Umji terimakasih banyak atas lagu-lagu yang sangat indah yang memberikan saya semangat dalam belajar.
18. Teruntuk Kiss Of Life yakni Nuna Julie, Natty, Belle dan Haneul terimakasih untuk lagu-lagu yang sangat indah.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	18
1.3 Batasan Masalah	19
1.4 Rumusan masalah dan Tujuan Penelitian.....	19
1.4.1 Rumusan Masalah	19
1.4.2 Tujuan penelitian	20
1.5 Manfaat Penelitian	20
1.5.1 Manfaat Akademik	20
1.5.2 Manfaat Non-akademik	21
BAB II TINJAUAN TEORI	22
2.1 Uraian Teori.....	22
2.1.1 Pembangunan Ekonomi.....	22
2.1.2 Pengeluaran Pemerintah	30
2.1.3 Ekonomi Regional	36
2.1.4 Desentralisasi Fiskal	43
2.2 Regulasi	44
2.3 Penelitian Terdahulu.....	54
2.4 Kerangka Penelitian.....	57
2.4.1 Tahap Penelitian	57
2.4.2 Kerangka Analisis Penelitian	58
2.4.3 Kerangka Konseptual Model Estimasi Ekonomi Terkait Faktor Yang Mempengaruhi IDM	58

2.4.4 Kerangka Konseptual Model Estimasi Ekonomi Terkait Faktor Yang Mempengaruhi IDM	59
2.5 Hipotesis	60
BAB III METODE PENELITIAN.....	61
3.1 Pendekatan Penelitian	61
3.2 Definisi Operasional	61
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian.....	64
3.3.1. Tempat Penelitian	64
3.3.2. Waktu Penelitian	64
3.4 Jenis Data.....	64
3.4.1. Jenis Data.....	64
3.4.2. Sumber Data	64
3.5 Populasi dan Sampel.....	65
3.5.1 Populasi	65
3.5.2 Sampel	65
3.6 Teknik Pengumpulan Data	66
3.7 Teknik Analisis Data	66
3.7.1. Melakukan Analisis Secara Deskriptif Tentang Pengembangan Dana Desa Di Masa Era Kepemimpinan Jokowi Widodo Selama Dua Periode Dan Capaian Indeks Desa Membangun di Kabupaten Simalungun	66
3.7.2. Analisa Model Ekonometrika Untuk Mengetahui Faktor-faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi IDM	67
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	81
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Simalungun.....	81
4.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Simalungun	81
4.1.2 Kondisi Demografi Kabupaten Simalungun	81
4.1.3 Kondisi Perkembangan Ekonomi	84
4.1.4 Kondisi Perkembangan Sosial	88
4.2 Melakukan Analisis Secara Deskriptif Tentang Perkembangan Dana Desa Di Masa Era Kepemimpinan Jokowi Widodo Selama Dua Periode	90
4.3 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.....	97

4.3.1 Analisa Model Ekonometrika Untuk Mengetahui Faktor-faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi IDM	97
4.4 Indikator Apa Saja Yang Mempengaruhi Dana Desa Di Kabupaten Simalungun Pada Desa Pematang Sidamanik Dan Sarimattin	115
4.4.1 Karakteristik Responden.....	115
4.4.2 Pernyataan Kuisisioner.....	117
4.4.3 Hasil Penelitian Analisis SM-PLS.....	122
BAB V PENUTUP	138
5.1 Kesimpulan.....	138
5.2 Saran	139
DAFTAR PUSTAKA	141
LAMPIRAN	143

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 100 Desa Terbaik Tahun 2018	8
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	54
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel Model Ekonometrika.....	62
Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel Model Analisis Multivariat	63
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Simalungun Menurut Jenis Kelamin 2023	82
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Simalungun Tahun 2023	83
Tabel 4.3 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Di Kabupaten Simalungun Tahun 2023	85
Tabel 4.4 Angka Kemiskinan Kabupaten Simalungun	88
Tabel 4.5 Ringkasan Hasil Pengolahan Data Model Estimasi	98
Tabel 4.6 Berdasarkan Jenis Kelamin	115
Tabel 4.7 Berdasarkan Usia.....	115
Tabel 4.8 Berdasarkan Domisili	116
Tabel 4.9 Berdasarkan Status Responden	116
Tabel 4.10 Convergent validity Faktor Dana Desa (F0)	122
Tabel 4.11 Convergent validity Faktor Pengetahuan Dana Desa	123
Tabel 4.12 Convergent validity Faktor Penerapan Dana Desa.....	123
Tabel 4.13 Convergent validity Faktor Penerapan Dana Desa.....	124
Tabel 4.14 Convergent validity Pada Dana Desa (F0)	127
Tabel 4.15 Convergent validity Faktor Pengetahuan Dana Desa Setelah Dilakukan Second Outer Model (F1)	128
Tabel 4.16 Convergent validity Faktor Penerapan Dana Desa Setelah Dilakukan Second Outer Loading.....	128
Tabel 4.17 Convergent validity Faktor Capaian Indeks Desa Membangun Setelah Dilakukan Second Outer Loading	129
Tabel 4.18 Discriminante Validity Pada Average Variance Extracted (AVE)	130
Tabel 4.19 Composite Reability	131
Tabel 4.20 R-Square	132
Tabel 4.21 F Squared.....	132
Tabel 4.22 Uji Multikolinearitas	134
Tabel 4.23 Uji Hipotesis	134

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Misi dan 9 Agenda Perioritas Pembangunan Nawacita.....	4
Gambar 1.2 Peta Sebaran Desa Per Provinsi di Indonesia	5
Gambar 1.3 Klasifikasi Desa di Indonesia berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM), 2019-2023.....	11
Gambar 1.4 Perkembangan Dana Desa di Indonesia TA 2015-2024.....	11
Gambar 1.5 Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2015-2023.....	12
Gambar 1.6 Tren Korupsi di Sektor Desa	13
Gambar 2.1 Pengeluaran Pemerintahan Pada Keynesian Cross.....	32
Gambar 2.2 Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Menurut Wagner.....	35
Gambar 2.3 Kerangka Analisis Penelitian.....	58
Gambar 2.4 Kerangka Konseptual Model Ekonometrika	58
Gambar 2.5 Kerangka Konseptual Analisa Faktor.....	59
Gambar 4.1 PDRB ADHK Per Kapita Kabupaten Simalungun 5 Tahun Terakhir.....	86
Gambar 4.2 Gini Ratio Kabupaten Simalungun.....	87
Gambar 4.3 Presentase Penduduk Kabupaten Simalungun Menurut Jenjang Pendidikan	89
Gambar 4.4 Perkembangan Dana Desa Kabupaten Simalungun 2015-2023	93
Gambar 4.5 Nilai Indeks Desa Membangun (IDM) Di Kabupaten Simalungun Tahun 2015 dan 2023	97
Gambar 4.6 Mengetahui Tentang Dana Desa.....	117
Gambar 4.7 Mengetahui sumber dana desa dari APBN yang kemudian di transfer melalui APBD	117
Gambar 4.8 Mengetahui tujuan dan manfaat dana desa.....	118
Gambar 4.9 Apakah terdapat BUMDesa yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat desa (aktif/ tidak aktif).....	118
Gambar 4.10 Apakah Masyarakat di desa aktif dalam berpartisipasi kegiatan posyandu	119
Gambar 4.11 Mengetahui tiga indikator IDM (IKS, IKL dan IKL).....	119
Gambar 4.12 Apakah akses Pendidikan di desa tercukupi (SD, SMP dan SMA).....	120
Gambar 4.13 Apakah terdapat sumber penghasilan utama di desa seperti (pertanian, perkebunan, industry, pariwisata dan lain sebagainya)	121
Gambar 4.14 Apakah terdapat pencemaran lingkungan di desa (air, udara dan lain sebagainya	121
Gambar 4.15 First Outer Loading.....	126
Gambar 4.16 Second Outer Loading	127

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan pengalaman berbagai negara yang dianalisis oleh Bank Dunia, strategi pembangunan wilayah dapat dibedakan menurut tingkat urbanisasinya (rendah, sedang, dan tinggi), yakni berturut-turut strategi membangun kepadatan (menciptakan *economies of concentration*), strategi mengurangi jarak (membangun *connectivity*), dan strategi mengatasi penyekatan (menangani kawasan kumuh dan berbagai persoalan yang menyertainya).

Indonesia merupakan negara berkembang yang saat ini sedang melakukan pembangunan desa melalui kebijakan “membangun dari pinggiran” dapat ditafsirkan sebagai strategi meningkatkan intensitas kegiatan-kegiatan ekonomi terutama di daerah pedesaan untuk menciptakan *economies of concentration*, yakni penghematan yang timbul dari berkumpulnya kegiatan-kegiatan ekonomi di suatu wilayah.

Perhatian utama pembangunan di Indonesia saat ini ialah pembangunan ekonomi pedesaan, dengan agenda membangun dari daerah pinggiran yang memiliki aksesibilitas dan tingkat pendidikan yang rendah serta keseimbangan migrasi negatif. Desa merupakan unit ekonomi yang paling dasar yang mendukung produksi dan kehidupan yang sangat besar (Li, Fan, and Liu 2019).

Kemajuan suatu negara dapat terlihat dengan mengidentifikasi kemajuan daerah pedesaan (Boedijono et al. 2019). Pembangunan desa akan berlangsung baik dengan sinergis dan terarah jika diawali dengan perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan dan berkelanjutan (Matridi et al. 2015).

Data penduduk Indonesia pada tahun 2020 menunjukkan proporsi penduduk yang bertempat tinggal di perdesaan jika dibandingkan di perkotaan tidak lagi berbeda jauh, yakni 56,7. Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan penduduk Indonesia tinggal di wilayah perkotaan pada 2020. Persentase tersebut diprediksi terus meningkat menjadi 66,6% pada 2035. Sejalan dengan itu, Bank Dunia juga memperkirakan sebanyak 220 juta penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan pada 2045. Jumlah itu setara dengan 70% dari total populasi di tanah air (BPS, 2020). Namun, perbandingan tingkat kesejahteraan masyarakat dan tingkat pembangunan wilayah di antara keduanya menunjukkan kawasan perdesaan masih relatif tertinggal jika dibandingkan dengan perkotaan. Jumlah penduduk miskin di perdesaan sampai pada tahun 2017 mencapai 16,3 juta jiwa, jauh lebih tinggi daripada di perkotaan yaitu 10,3 juta jiwa.

Sementara itu, jangkauan pelayanan infrastruktur di perdesaan masih jauh dari memadai. Misalnya, baru sekitar 6,4 persen rumah tangga perdesaan yang telah dilayani oleh infrastruktur perpipaan air minum, sedangkan di perkotaan mencapai 32 persen sementara itu, untuk pelayanan telekomunikasi, dari total 62.806 desa di Indonesia, sebanyak 43.000 desa masih belum memiliki fasilitas telekomunikasi.

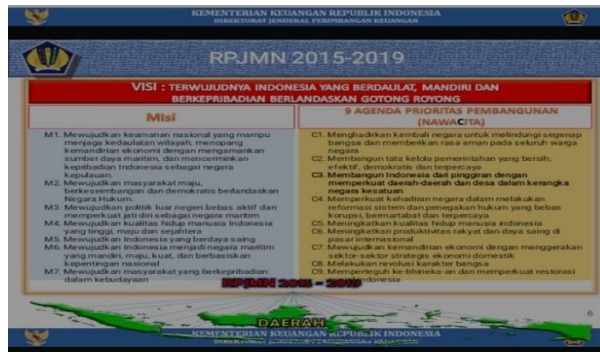
Data juga menunjukkan masih relatif rendahnya produktivitas tenaga kerja di perdesaan karena aktivitas ekonomi perdesaan masih bertumpu pada sektor pertanian (primer). Berdasarkan Susenas 2013, pangsa tenaga kerja di perdesaan pada sektor pertanian mencapai 67,7 persen. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun (Bappenas, 2015-2019), Kemendesa PDTT menargetkan paling sedikitnya mengentaskan 80 Kabupaten Tertinggal atau 18

Kabupaten Tertinggal untuk setiap tahunnya dari 122 Kabupaten Tertinggal yang ada saat ini, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015.

Sebaran Kabupaten Tertinggal menurut wilayah diantaranya untuk wilayah Sumatera terdapat 11 Kabupaten Tertinggal, Jawa sebanyak 5 Kabupaten, Kalimantan ada 12 Kabupaten, Sulawesi sebanyak 18 Kabupaten, Nusa Tenggara terdapat 25 Kabupaten, Maluku sebanyak 25 Kabupaten dan Papua sebanyak 33 Kabupaten. Sampai saat ini sudah 17 kabupaten/daerah lepas dari daerah tertinggal. Dan 50 kabupaten/daerah lainnya berpotensi melepaskan dari ketertinggalan.

Konsep “membangun dari pinggiran” ramai dibicarakan publik pada tahun 2014 ketika Ir. Joko Widodo, saat itu calon presiden, mencanangkan serangkaian agendanya yang dikenal sebagai Nawa Cita (sembilan agenda). Agenda “membangun dari pinggiran” muncul pada urutan ketiga, selengkapnya berbunyi “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Konsep tersebut sangat menarik untuk ditinjau dari berbagai perspektif. Khusus dari perspektif Ilmu Ekonomi Regional, konsep tersebut menjadi istimewa karena tergolong amat langka dan amat jarang didiskusikan dalam forum-forum akademis.

Dalam ranah publik yang lebih luas, misalnya bila kita gunakan mesin pelacak (*search engine*) dalam internet dengan kata kunci *to develop from the periphery*, maka yang kemungkinan besar muncul adalah judul-judul makalah tentang pembangunan negara-negara terbelakang di kawasan Eropa Timur. Tentulah makna *to develop from the periphery* dalam konteks itu berbeda dengan makna yang dimaksudkan dalam butir ketiga Nawa Cita.



Sumber : Kementerian PPN Bappenas <https://ditkumlasi.bappenas.go.id>

Gambar 1.1 Misi dan 9 Agenda Prioritas Pembangunan Nawacita

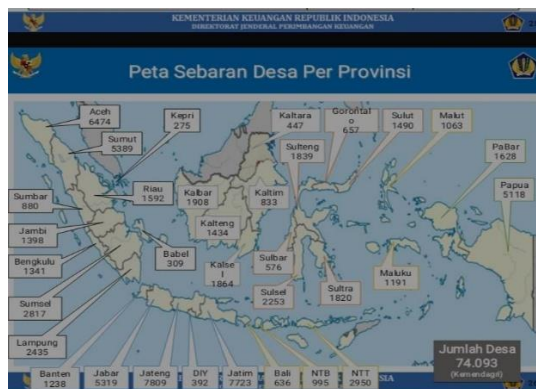
Nawa Cita ketiga dari Presiden Ke 7 Republik Indonesia Ir. Joko Widodo, yaitu “Indonesia dapat dibangun dari daerah pinggiran yaitu dengan memperkuat daerah dan desa”. Untuk mewujudkan program tersebut, pemerintah membuat dan mengimplementasikan UU No 6 Tahun 2014 secara konsisten, dan continue dengan cara pendampingan, supervisi dan fasilitasi. Terdapat beberapa permasalahan pendamping desa yang ada di beberapa kabupaten di Indonesia, yaitu :

1. Kinerja Pendamping Desa tidak maksimal pada laporan keuangan Desa
2. Peran Pendamping Desa Sangat lemah dalam mengawasi jalannya Dana Desa terkhusus untuk penggunaan fisik yang bersumber dari Dana Desa
3. Kinerja Pendamping Desa tidak maksimal dan terfokus dikarenakan kurang idealnya antara jumlah masyarakat dengan pendamping desa
4. Jarang turun kelapangan dan melakukan musyawarah
5. Perlu adanya evaluasi terhadap kinerja Pendamping Desa
6. Pendamping Desa jarang datang ke kantor Desa
7. Aparatur desa bekerja sendiri dikarenakan kinerja Pendamping Desa yang belum memenuhi standar.

Permasalahan kinerja Pendamping Desa yang kurang maksimal menjadi kritikan keras bagi pemerintah. Upaya pemberdayaan oleh Pendamping Desa harus dilaksanakan secara maksimal, karena Pendamping Desa merupakan agen dan penggerak mekanisme dalam sistem pemerintahan desa. Sesuai dengan fenomena yang telah diuraikan, bahwa penelitian memiliki tujuan untuk mendeskripsikan kinerja pendamping desa dalam upaya membangun kemandirian desa.

Desa merupakan unit terkecil disuatu negara namun memiliki peran penting untuk mencapai cita-cita suatu berbangsa dan bernegara. Bahkan apabila kita ingin menilai suatu bangsa itu sejahtera atau tidak dapat dilihat dari kemajuan sebuah desa, tidak hanya itu saja harus adanya dorongan yang terus menerus bagi tumbuh kembangnya potensi alamiah dan potensi dinamik pedesaan.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).



Sumber : Kementerian PPN Bappenas <https://ditkumlasi.bappenas.go.id>

Gambar 1.2 Peta Sebaran Desa Per Provinsi di Indonesia

**Daftar 100 Desa Terbaik menurut Provinsi dan Kabupaten di
Indonesia, 2018**

NO	PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA
1	ACEH	ACEH BESAR	BAITUSSALAM	KAJHU
2	RIAU	KAMPAR	GUNUNG SAHILAN	GUNUNG SARI
3	SUMATERA BARAT	AGAM	TANJUNG MUTIARA	TIKU SELATAN
4	SUMATERA BARAT	PESISIR SELATAN	IV JURAI	PAINAN
5	SUMATERA BARAT	SIJUNJUNG	SIJUNJUNG	MUARO
6	SUMATERA BARAT	TANAH DATAR	LIMA KAUM	BARINGIN
7	JAMBI	KOTA SUNGAI PENUH	PONDOK TINGGI	AUR DURI
8	JAMBI	KOTA SUNGAI PENUH	SUNGAI PENUH	PASAR BARU
9	JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT	MERLUNG	PINANG GADING
10	BENGGULU	BENGGULU UTARA	PUTRI HIJAU	KOTA BANI
11	BENGGULU	MUKO MUKO	PENARIK	PENARIK
12	JAWA BARAT	BANDUNG	PANGALENGAN	PANGALENGAN
13	JAWA BARAT	BANDUNG BARAT	LEMBANG	JAYAGIRI
14	JAWA BARAT	BANDUNG BARAT	LEMBANG	LEMBANG
15	JAWA BARAT	BANDUNG BARAT	NGAMPRAH	TANIMULYA
16	JAWA BARAT	BEKASI	TAMBUN SELATAN	MANGUNJAYA
17	JAWA BARAT	BOGOR	BOJONG GEDE	BOJONGGEDE
18	JAWA BARAT	BOGOR	GUNUNG PUTRI	BOJONG KULUR
19	JAWA BARAT	CIAMIS	PANJALU	PANJALU
20	JAWA BARAT	INDRAMAYU	BALONGAN	TEGALURUNG
21	JAWA BARAT	INDRAMAYU	LOHBENER	LOHBENER
22	JAWA BARAT	KUNINGAN	KUNINGAN	KARANGTAWANG
23	JAWA BARAT	SUBANG	PAMANUKAN	PAMANUKAN
24	JAWA TENGAH	BANYUMAS	BATURRADEN	REMPOAH
25	JAWA TENGAH	BANYUMAS	KALIBAGOR	KALIBAGOR
26	JAWA TENGAH	BLORA	JAPAH	JAPAH
27	JAWA TENGAH	BOYOLALI	NOGOSARI	PULUTAN
28	JAWA TENGAH	GROBOGAN	GUBUG	GUBUG
29	JAWA TENGAH	KARANGANYAR	JATEN	NGRINGO
30	JAWA TENGAH	KARANGANYAR	MOJOGEDANG	MUNGGUR
31	JAWA TENGAH	KARANGANYAR	TASIKMADU	PAPAHAN
32	JAWA TENGAH	KENDAL	WELERI	KARANGDOWO
33	JAWA TENGAH	KENDAL	WELERI	NAWANGSARI
34	JAWA TENGAH	PEMALANG	BELIK	BELIK
35	JAWA TENGAH	PEMALANG	MOGA	BANYUMUDAL
36	JAWA TENGAH	REMBANG	KALIORI	TAMBAKAGUNG

37	JAWA TENGAH	SEMARANG	JAMBU	JAMBU
38	JAWA TENGAH	SEMARANG	SUMOWONO	SUMOWONO
39	JAWA TENGAH	SUKOHARJO	TAWANGSARI	KATEGUHAN
40	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	BANTUL	BANGUNTAPAN	BANGUNTAPAN
41	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	BANTUL	BANGUNTAPAN	BATURETNO
42	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	BANTUL	IMOGIRI	IMOGIRI
43	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	BANTUL	KASIHAN	BANGUNJIWO
44	DAERAH ISTIMEWA	BANTUL	KRETEK	DONOTIRTO
45	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	GUNUNGKIDUL	KARANGMOJO	BEJIHARJO
46	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	GUNUNGKIDUL	PATUK	PATUK
47	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	GUNUNGKIDUL	TANJUNGSARI	KEMADANG
48	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	GUNUNGKIDUL	WONOSARI	BALEHARJO
49	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	GUNUNGKIDUL	WONOSARI	KEPEK
50	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	SLEMAN	KALASAN	PURWOMARTANI
51	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	SLEMAN	KALASAN	SELOMARTANI
52	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	SLEMAN	KALASAN	TAMANMARTANI
53	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	SLEMAN	MLATI	SINDUADI
54	JAWA TIMUR	BANYUWANGI	GENTENG	GENTENGKULON
55	JAWA TIMUR	BANYUWANGI	GENTENG	GENTENGWETAN
56	JAWA TIMUR	BANYUWANGI	GENTENG	KALIGONDO
57	JAWA TIMUR	BANYUWANGI	GENTENG	KEMBIRITAN
58	JAWA TIMUR	BANYUWANGI	GENTENG	SETAIL
59	JAWA TIMUR	BANYUWANGI	KALIBARU	KALIBARUWETAN
60	JAWA TIMUR	BANYUWANGI	MUNCAR	TEMBOKREJO
61	JAWA TIMUR	BANYUWANGI	SONGGON	SONGGON
62	JAWA TIMUR	BLITAR	GANDUSARI	GONDANG
63	JAWA TIMUR	BLITAR	GANDUSARI	KOTES
64	JAWA TIMUR	BLITAR	GANDUSARI	SUKOSEWU
65	JAWA TIMUR	BLITAR	GANDUSARI	SUMBERAGUNG
66	JAWA TIMUR	BLITAR	GANDUSARI	TAMBAKAN
67	JAWA TIMUR	BLITAR	SANANKULON	PURWOREJO
68	JAWA TIMUR	BLITAR	SELOPURO	PLOSO

69	JAWA TIMUR	BLITAR	TALUN	JAJAR
70	JAWA TIMUR	BLITAR	TALUN	KENDALREJO
71	JAWA TIMUR	BLITAR	TALUN	PASIRHARJO
72	JAWA TIMUR	BLITAR	TALUN	SRAGI
73	JAWA TIMUR	BOJONEGORO	KALITIDU	PANJUNAN
74	JAWA TIMUR	JEMBER	JOMBANG	JOMBANG
75	JAWA TIMUR	JEMBER	RAMBIPUJI	RAMBIPUJI
76	JAWA TIMUR	MALANG	DAU	SUMBERSEKAR
77	JAWA TIMUR	MALANG	KARANG PLOSO	GIRIMOYO
78	JAWA TIMUR	MALANG	KASEMBON	KASEMBON
79	JAWA TIMUR	MALANG	NGANTANG	BANTUREJO
80	JAWA TIMUR	MALANG	NGANTANG	KAUMREJO
81	JAWA TIMUR	MALANG	PUJON	NGROTO
82	JAWA TIMUR	MALANG	SUMBERPUCUNG	KARANGKATES
83	JAWA TIMUR	MALANG	SUMBERPUCUNG	NGEBRUG
84	JAWA TIMUR	MALANG	SUMBERPUCUNG	SUMBERPUCUNG
85	JAWA TIMUR	MALANG	TUMPANG	TUMPANG
86	JAWA TIMUR	NGAWI	NGRAMBE	NGRAMBE
87	BALI	BADUNG	KUTA SELATAN	KUTUH
88	BALI	BADUNG	KUTA SELATAN	PECATU
89	BALI	BADUNG	KUTA SELATAN	UNGASAN
90	BALI	BADUNG	KUTA UTARA	DALUNG
91	BALI	BADUNG	KUTA UTARA	TIBUBENENG
92	BALI	BADUNG	MENGWI	MENGWITANI
93	BALI	BADUNG	MENGWI	MUNGGU
94	BALI	BANGLI	SUSUT	TIGA
95	BALI	GIANYAR	SUKAWATI	BATUBULAN
96	BALI	GIANYAR	SUKAWATI	BATUBULAN KANGIN
97	BALI	GIANYAR	UBUD	PELIATAN
98	BALI	KARANGASEM	MANGGIS	PADANGBAI
99	BALI	KOTA DENPASAR	DENPASAR SELATAN	SANUR KAJA
100	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI KARTANEGARA	LOA JANAN	LOA DURI ILIR

Sumber : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi www.bps.go.id

Tabel 1.1 100 Desa Terbaik Tahun 2018

Berdasarkan data diatas dapat diketahui tidak ada satupun desa di Sumatera Utara yang memasuki pemeringkatan desa terbaik di seluruh Indonesia. Hal ini menjadi pertanyaan mengenai pemanfaatan dana desa yang telah diberikan kepada pemerintah. Pembangunan perdesaan dilaksanakan dalam rangka intervensi untuk mengurangi tingkat kesenjangan kemajuan antara wilayah perdesaan dan perkotaan

sebagai akibat dari pembangunan ekonomi sebelumnya yang cenderung bias perkotaan (urban bias).

Indeks Pembangunan Desa (IPD) merupakan suatu ukuran yang disusun untuk menilai tingkat kemajuan atau perkembangan desa di Indonesia. Pengukuran IPD dibangun dari data hasil Pendataan Potensi Desa yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan digunakan sebagai rujukan indikator-indikator utama penyusun indeks, desa terbagi menjadi 3 kategori :

1. Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/ transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Secara teknis, desa mandiri merupakan desa dengan nilai IPD lebih dari 75.
2. Desa Berkembang yaitu desa mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar, infrastruktur, aksesibilitas/ transportasi, pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan yang cukup memadai. Secara teknis, desa berkembang merupakan desa yang memiliki nilai IPD lebih dari 50 namun kurang dari atau sama dengan 75.
3. Desa Tertinggal yaitu desa mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar, infrastruktur, aksesibilitas /transportasi, pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan yang masih minim. Secara teknis, desa tertinggal merupakan desa yang memiliki nilai IPD kurang dari atau sama dengan 50.

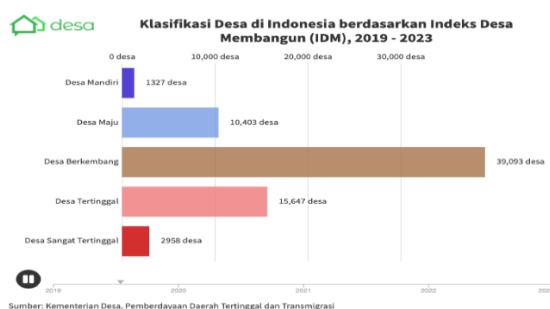
Indeks Desa Membangun (IDM) adalah instrumen pengukuran kemajuan dan kemandiria desa yang dikembangkan oleh kementrian desa, pembangunan

daerah tertinggal dan transmigrasi (Kemendes PDTT). IDM terdiri dari tiga indeks, yaitu indeks ketahanan sosial (IKS), indeks ketahanan ekonomi(IKE) dan indeks ketahanan lingkungan(IKL). Desa maju adalah desa yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi yang sedang berkembang, namun masih perlu ditingkatka untuk mencapai status desa maju, Desa Berkembang adalah desa yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi yang sedang berkembang, namun masih perlu ditingkatkan untuk mencapai status desa maju, desa tertinggal adalah desa yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi yang masih lemah, sehingga perlu ditingkatkan untuk mencapai status desa berkembang, desa sangat tertinggal adalah desa yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi yang sangat lemah, sehingga perlu ditingkatkan untuk mencapai status desa tertinggal.

Secara skor IDM, penilaiannya sebagai berikut:

1. Desa Sangat Tertinggal: $< 0,491$
2. Desa Tertinggal: $> 0,491$ dan $< 0,599$
3. Desa Berkembang: $> 0,599$ dan $< 0,707$
4. Desa Maju: $> 0,707$ dan $< 0,815$
5. Desa Mandiri: $> 0,815$

Klasifikasi status desa ini digunakan sebagai acuan dalam melakukan integrasi, afirmasi, dan sinergi pembangunan desa. Harapannya adalah agar terwujudnya kondisi masyarakat desa yang sejahtera, adil, dan mandiri serta berkelanjutan sesuai semangat SDGs Desa.



Sumber : Kementrian Desa, Pemberdayaan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
<https://kanaldesa.com/artikel/perkembangan-desa-di-indonesia-2019-2023-berdasarkan-idm>

Gambar 1.3 Klasifikasi Desa di Indonesia berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM), 2019-2023

Berdasarkan sumber dari laman IDM Kemendesa PDTT, terlihat data yang cukup menggembirakan. Desa berstatus mandiri naik signifikan dari 840 desa pada tahun 2019 melonjak naik di tahun 2023 menjadi 11.456 desa. Begitu pula jumlah desa maju, naik hampir tiga kali lipat dalam rentang waktu yang sama.

Karena pada dasarnya pemerintah telah menyerahkan anggaran belanja daerah yang diserahkan kepada badan keuangan daerah untuk dikelola sebaik mungkin sesuai dengan jumlah yang telah disepakati untuk kepentingan masyarakat. Anggaran yang diserahkan tersebut dikelola oleh pemerintah sampai tingkat terkecil, dalam pemerintah desa dinamakan pengelolaan dana desa. Alokasi dana desa dapat dikatakan efektif apabila sistem pengelolaan yang dilakukan pemerintah desa, serta manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Pembangunan yang akan dilakukan sebagai upaya dalam mempercepat pembangunan ekonomi dengan menyediakan sarana dan prasarana dalam memperdaya masyarakat.



Sumber : Kementerian Keuangan www.kementerian.keuangan.go.id

Gambar 1.4 Perkembangan Dana Desa di Indonesia TA 2015-2024

Dari data diatas diketahui perkembangan dana desa pada masa pemerintahan Jokowi Widodo sejak pertama kali dana desa digulirkan. Pemerintah pusat telah mengucurkan alokasi dana desa sebesar Rp 538,9 triliun. Alokasi dana desa ini terbagi atas beberapa kucuran, mulai dari tahun 2015 sebesar Rp 20,7 triliun dan tahun 2024 sebesar 71 triliun. Dari besaran angka tersebut, berdasarkan laporan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) per 19 Juni 2023.

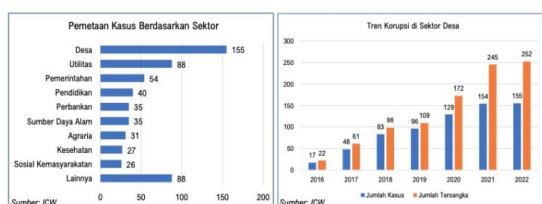


Sumber : Kementerian Keuangan dan Kemendesa PDTT www.kementerian.keuangan.dan.kemendesa.pdtt

Gambar 1.5 Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2015-2023

Dana desa telah menghasilkan output berupa sarana/prasarana bermanfaat bagi masyarakat, yaitu terbangunnya lebih dari, Jalan Desa sepanjang 325,4 ribu km, Jembatan sepanjang 1.791,6 ribu km, Pasar Desa sebanyak 14.168 unit, BUM Desa sebanyak 42.727 unit, Sarana Olahraga sebanyak 31.981 unit, Sumbungan Air Bersih sebanyak 1.670,4 unit, MCK sebanyak 51.175 unit, Polindes sebanyak 25.713 unit, Tambatan Perahu sebanyak 8.860 unit, PAUD sebanyak 68.378 unit, Sumur sebanyak 86.581 unit, Drainase sebanyak 50,3 juta unit, Irigrasi sebanyak 573,1 ribu unit, Posyandu sebanyak 43.657 unit, Embung Desa sebanyak 6.427 unit, BLT Desa sebanyak 2,9 juta KPM dengan total Rp 8,27 triliun, Pencegahan Stunting sebesar Rp 4,40 triliun, Ketahanan Pangan sebesar Rp 5,07 triliun.

Dari banyaknya output data keberhasilan, atas kucuran dana desa di atas. Tidak dapat menafikan, berdasarkan catatan *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, sejak pengalokasian dana desa pada tahun 2015, kasus korupsi di tingkat desa trennya meningkat. Dan parahnya, pada tahun 2020, ICW merilis 10 besar kasus korupsi di Indonesia berdasarkan lembaga pemerintah, 141 kasus korupsi di tingkat pemerintah desa, peringkat kedua tertinggi setelah pemerintah kabupaten/kota.



Sumber: ICW www.ICW.go.id

Gambar 1.6 Tren Korupsi di Sektor Desa

Selanjutnya, pada semester 1 tahun 2021, kasus korupsi di pemerintah desa terbanyak, lebih tinggi dari kasus korupsi pemerintah kabupaten, kota, provinsi, kementerian dan lembaga negara lainnya. Meskipun tidak seluruh kasus pemerintah desa di atas berkaitan dengan dana desa. Namun, hal ini perlu mendapatkan perhatian kita bersama karena porsi dana desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu daerah yang menopang kekuatan ekonomi Indonesia. Provinsi terluas di Pulau Sumatera ini pertama kali dibentuk pada 15 April 1948 berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 1948. Secara geografis, Sumatera Utara terletak di antara 1°-4° LU dan 98°-100° BT. Sumatera Utara terletak di kota Medan serta dibagi menjadi 25 kabupaten, 8 kota, 325 kecamatan dan 5.456 kelurahan/desa. Wilayah pantai timur Sumatera

Utara terdiri dari 12 kabupaten, wilayah pantai barat Sumatera Utara terdiri dari 7 kabupaten dan wilayah dataran tinggi terdiri dari 6 kabupaten.

Untuk mendukung peningkatan pembangunan fisik di daerah, Pemerintahan Jokowi meningkatkan anggaran transfer ke daerah dan dana desa dari tahun ke tahun. Peningkatan alokasi dana desa secara bertahap ini, sekaligus untuk memenuhi amanat UU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Desa. Dana desa yang bergulir dari tahun 2015 hingga 2019 pun sudah melebihi Rp252 triliun. Salah satu pencapaiannya dapat dilihat pada tahun 2018 desa tertinggal berkurang sebanyak 6.518 desa, dan desa mandiri bertambah sebanyak 2.665 desa. Percepatan ini dimulai sejak tahun 2014, setelah Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 ditetapkan. Paradigma pembangunan desa mengikuti pola desentralisasi. Kondisi ini memberikan paradigma baru bagi perangkat desa dalam memahami sistem finansial, pemberdayaan warga, sehingga penguatan institusi di tingkat desa diperlukan untuk mendorong pemerintah desa bekerja dengan baik (Antlöv, et al. 2016). Sehingga, peningkatan anggaran dana desa dapat menjadi harapan baru karena menjadi stimulus yang baik bagi pertumbuhan perekonomian desa.

Perekonomian Sumut tumbuh sebesar 5,22% pada tahun 2019, lebih tinggi dari 5,18% pada tahun 2018, dan pertumbuhan ekonomi Sumut pada tahun 2020 tercatat sebesar 5,22% pada tahun 2019, berdasarkan catatan dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumut. Hal itu mengakibatkan kasus Covid-19 terjadi sepanjang tahun 2020. Demikian pula dengan pagu anggaran APBD Sumut tahun 2020 berkurang sebesar 4,7 triliun dibandingkan tahun 2019.

Tingkat realisasi pendapatan APBD sebesar 73,0% pada Q3 2020 dibatasi hingga 64,1%, karena pendapatan dari transfer dan pasar asal di wilayah tersebut

menurun. Di sisi lain, pelaksanaan belanja APBD triwulan III tahun 2021 menunjukkan pertumbuhan karena adanya pengurangan sebagian kegiatan belanja seiring dengan terbatasnya pelaksanaan belanja barang dan jasa seperti pertemuan dan kegiatan anak. Optimalisasi pelaksanaan belanja APBN di Sumut didorong oleh semua komponen, diantaranya anggaran pribadi, anggaran komoditas, belanja investasi, dan anggaran kesejahteraan, terutama untuk menghadapi pandemi Covid-19.

Kabupaten Simalungun merupakan salah satu kabupaten/kota yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Simalungun secara wilayah administrasi terdiri dari 31 kecamatan. ketigapuluh satu kecamatan ini terbagi dalam 386 desa/nagori dan 27 kelurahan. Kabupaten Simalungun memperoleh alokasi anggaran untuk Dana Desa (DD) pada tahun 2023 sebesar Rp. 274.205.733.000,00 dari pemerintah pusat. Adapun prioritas penggunaan DD di antaranya untuk jaring pengaman sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), padat karya tunai, pengembangan potensi desa melalui Badan Usaha Nagori (BUMNag).

Kabupaten Simalungun memiliki potensi yang sangat besar sebagai bagian dari wilayah Kaldera Toba dan juga sebagai destinasi wisata perkebunan teh. Kabupaten Simalungun terletak di bagian utara Danau Toba, yang merupakan salah satu kaldera terbesar di dunia. Kaldera Toba adalah situs geologi yang unik dan memiliki nilai sejarah yang sangat besar. Keberadaannya menawarkan potensi besar untuk pengembangan pariwisata alam, petualangan, dan kegiatan rekreasi. Selain Danau Toba, Simalungun juga memiliki kekayaan alam lainnya seperti gunung, air terjun, dan hutan yang menawarkan potensi wisata alam yang besar.

Simalungun juga kaya akan warisan sejarah dan budaya. Selain itu perkebunan teh juga menjadi salah satu potensi besar di Simalungun. Produksi teh di daerah ini memiliki kualitas yang baik dan dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan. Kabupaten Simalungun sebagai salah satu Pemerintah Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara terus berupaya menggerakkan berbagai potensi ekonomi di wilayahnya.

Hal ini dilakukan agar para pelaku ekonomi dapat berperan serta dan berpartisipasi aktif menggerakkan perekonomian sehingga mampu memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Simalungun. Dalam memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Simalungun perlu didasari melalui perkembangan desa yang akan meningkatkan pembangunan ekonomi desa. Pembangunan desa dan kawasan pedesaan merupakan faktor penting bagi pembangunan daerah, pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antar wilayah. Terlebih mengingat konsentrasi jumlah penduduk masih dominan berada di daerah desa, sehingga desa merupakan basis kekuatan sosial ekonomi dan politik yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Efektifnya pengelolaan dana desa bila manfaat dari pembangunan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat desa. Dalam pelaksanaannya pembangunan desa ditunjukkan untuk sejumlah besar penggunaan (berbagai pengguna) untuk merumuskan dan mengevaluasi alokasi sumber daya oleh entitas dalam aktivitas yang digunakan untuk mencapai tujuannya dan keputusan yang berguna dalam meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat desa, penyediaan sarana dan prasaranan sangat diperlukan agar tujuan pembangunan dapat tercapai.

Desa Pematang Sidamanik merupakan desa yang terletak di kabupaten Simalungun terdiri dari Huta (dusun) Bah Aren, Bah Butong, Pematang Sidamanik, Parmahanan, Sinaman I, Sinaman II, Tigaurung. Desa Sarimattin merupakan desa yang terletak di kabupaten Simalungun terdiri dari dari Huta (dusun) Afd A Tobasari, Afd C Tobasari, Bah Butong, Tobasari. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang diakui dan di hormati oleh negara untuk menciptakan kesatuan dan mewujudkan suatu tujuan. Untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan pembiayaan dana yang lebih salah satunya yaitu Dana Desa. Dana desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Keberhasilan suatu pekerjaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki dapat melihat seberapa efisien sumber daya digunakan dalam pencapaian tersebut. Efektifitas digunakan dalam melihat seberapa banyak tingkat pencapaian yang dicapai dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki berdasarkan prosedur yang ditetapkan organisasi.

Dalam mengukur tingalat efektifitas dapat dengan melihat seberapa banyak sumber daya yang digunakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Semakin terperinci penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan semakin efektif penggunaan sumber daya tersebut. Hal ini tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam melihat perkembangan dan kemajuan suatu organisasi. Pengelolaan adalah pemanfaatan sumber sumber yang dimiliki dalam kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.

Dengan uraian dan paparan latar belakang dan fakta yang ada, terdapat permasalahan pemanfaatan dana desa yang berhubungan dengan kebijakan APBN dan APBD dengan membangun desa pinggiran melalui program Nawacita di masa kepemimpinan Presiden Jokowi. Dengan demikian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait permasalahan tersebut. Untuk itu penelitian ini berjudul **“Strategi Pengembangan Desa Pinggiran Menjadi Desa Nawacita Melalui Pemanfaatan Dana Desa Desentralisasi Era Kepemimpinan Jokowi di Kabupaten Simalungun”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka peneliti mengidentifikasi masalah mengenai strategi pengembangan desa pinggiran menjadi desa nawacita melalui pemanfaatan dana desa desentralisasi era kepemimpinan Jokowi di kabupaten Simalungun:

1. Kabupaten Simalungun memiliki letak yang strategis, dekat dengan pusat kota dan tempat wisata akan tetapi nilai pada IDM tahun 2015-2023 berstatus berkembang
2. Di tahun 2018 tidak terdapat satupun desa di Sumatera Utara yang masuk dalam daftar 100 desa terbaik
3. Permasalahan kinerja pendamping desa yang kurang maksimal menjadi kritikan keras bagi pemerintah
4. Adanya perbandingan tingkat kesejahteraan masyarakat dan tingkat pembangunan wilayah di antara keduanya menunjukkan kawasan perdesaan masih relatif tertinggal jika dibandingkan dengan kota

5. Berdasarkan catatan (*Indonesia Corruption Watch*) ICW sejak pengalokasian dana desa pada tahun 2015-2023, kasus korupsi di tingkat desa trennya meningkat bahkan peringkat kedua setelah pemerintah kabupaten/ kota

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, peneliti menetapkan batasan masalah pada:

1. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data dalam waktu 7 tahun terakhir dari tahun 2015-2023 sebagai sampel yang digunakan.
2. Kabupaten Simalungun terdiri dari beberapa desa/nagori. Namun dalam penelitian ini hanya menggunakan desa/nagori Pematang Sidamanik dan Sarimattin.

1.4 Rumusan masalah dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perkembangan dana desa di masa kepemimpinan era Jokowi-dodo selama 2 periode dan capaian Indeks Desa Membangun?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi capaian dari Indeks Desa Membangun di Kabupaten Simalungun?
3. Indikator apa saja yang mempengaruhi Dana Desa di Kabupaten Simalungun pada Desa Pematang Sidamanik dan Sarimattin?

1.4.2 Tujuan penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Melakukan analisis secara deskriptif tentang pengembangan dana desa di masa era kepemimpinan Jokowi Widodo selama dua periode di Kabupaten Simalungun
2. Melakukan estimasi model tentang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pengeluaran Pemerintah (PP) dan Dana Desa (DD) terhadap Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Simalungun tahun 2015-2023
3. Melakukan penjelasan tentang indikator dari Dana Desa yaitu Pengetahuan Dana Desa, Penerapan Dana Desa dan Capaian Indeks Desa Membangun serta melakukan kuesioner terhadap Perangkat Desa, Masyarakat Desa, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Karang Taruna dan Pengusaha Desa.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun dari hasil penelitian ini nantinya dapat diambil manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam strategi pengembangan desa pinggiran menjadi desa nawacita melalui pemanfaatan dana desa desentralisasi era kepemimpinan Jokowi di Indonesia:

1.5.1 Manfaat Akademik

1. Untuk memenuhi tugas akhir skripsi dalam memperoleh Sarjana Ekonomi

2. Sebagai bahan kajian dan literatur bagi mahasiswa serta dosen dalam menganalisis penelitian kemajuan Indeks Desa Membangun (IDM)
3. Memberikan inspirasi untuk penelitian lebih lanjut mengenai Pemanfaatan Dana Desa

1.5.2 Manfaat Non-akademik

1. Sebagai salah satu bahan kajian bagi Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Simalungun dalam menganalisis strategi pengembangan desa
2. Menjadi bahan masukan pemerintah desa dalam strategi BUMDes
3. Menjadi dasar pertimbangan dalam membuat kebijakan di dalam Pemerintahan Daerah

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teori

2.1.1 Pembangunan Ekonomi

Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda antara satu orang dengan orang lainnya, antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, negara yang satu dengan negara yang lainnya. Namun secara umum terdapat suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Todaro, 2015).

Pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu perubahan yang terjadi secara terus-menerus melalui serangkaian kombinasi proses demi mencapai sesuatu yang lebih baik yaitu adanya peningkatan pendapatan per kapita yang terus menerus berlangsung dalam jangka panjang (Sukirno, Pengantar Makro Ekonomi, 1994).

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi danberkelanjutan adalah kondisi yang penting dan utama bagi kelangsungan Pembangunan ekonomi dan akhirnya peningkatan kesejahteraan Masyarakat. Setiap tahunnya jumlah penduduk terus bertambah yang dibarengi kebutuhan konsumsi sehari-hari maka dibutuhkan peningkatan pendapatan setiap tahunnya (Rahayu, 2020).

Todaro mengatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi ditunjukkan oleh 3 nilai pokok, yaitu:

1. Berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (*basic needs*).
2. Meningkatnya rasa harga diri (*self-esteem*) masyarakat sebagai manusia
3. Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (*freedom from servitude*) yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia

Analisa pembangunan ekonomi atau lebih dikenal dengan ekonomi pembangunan (*development economic*), merupakan cabang ilmu ekonomi yang khusus membahas mengenai masalah-masalah pembangunan di negara yang sedang berkembang. Tujuan dari analisisnya adalah untuk menelaah faktor-faktor yang menimbulkan keterlambatan pembangunan ekonomi di negara-negara sedang berkembang dan selanjutnya mengemukakan cara-cara pendekatan yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi sehingga dapat mempercepat jalannya pembangunan ekonomi di negara-negara sedang berkembang.

Beberapa pengertian dan definisi pembangunan ekonomi menurut para ahli :

1. Aliran Klasik

a. Adam Smith

Hukum Alam, Adam Smith meyakini berlakunya hukum alam dalam persoalan ekonomi. Ia menganggap bahwa setiap orang sebagai hakim yang paling tahu akan kepentingannya sendiri yang bebas mengejar kepentingannya demi keuntungan dirinya sendiri. Setiap orang

jika dibiarkan bebas akan berusaha memaksimalkan kesejahteraan dirinya sendiri, karena itu jika semua orang dibiarkan bebas akan memaksimalkan kesejahteraan mereka secara agregat. Smith pada dasarnya menentang campur tangan pemerintah dalam industri dan perniagaan.

Pembagian Kerja adalah titik mula dari teori pertumbuhan ekonomi Adam Smith, yang meningkatkan daya produktivitas tenaga kerja. Ia menghubungkan kenaikan itu dengan meningkatnya keterampilan kerja; penghematan waktu dalam memproduksi barang; penemuan mesin yang sangat menghemat tenaga. Penyebab yang terakhir bukan berasal dari tenaga kerja melainkan dari modal.

Proses Penumpukan Modal. Smith menekankan, penumpukan modal harus dilakukan terlebih dahulu daripada pembagian kerja. Smith menganggap pemupukan modal sebagai satu syarat mutlak bagi pembangunan ekonomi; dengan demikian permasalahan pembangunan ekonomi secara luasa adalah kemampuan manusia untuk lebih banyak menabung dan menanam modal. Dengan demikian tingkat investasi akan ditentukan oleh tingkat tabungan dan tabungan yang sepenuhnya diinvestasikan.

Agen Pertumbuhan, menurutnya para petani, produsen dan pengusaha, merupakan agen kemajuan dan pertumbuhan ekonomi. Fungsi ketiga agen tersebut saling berkaitan erat. Bagi Smith pembangunan pertanian mendorong peningkatan pekerjaan konstruksi dan perniagaan. Pada waktu terjadi surplus pertanian sebagai akibat

pembangunan ekonomi, maka permintaan akan jasa perniagaan dan barang pabrikan meningkat pula; ini semua akan membawa kemajuan perniagaan dan berdirinya industri manufaktur. Pada pihak lain, pembangunan sektor tersebut akan meningkatkan produksi pertanian apabila petani menggunakan teknologi yang canggih. Jadi pemupukan modal dan pembangunan ekonomi terjadi karena tampilnya para petani, produsen dan pengusaha.

Menurut Smith, proses pertumbuhan ini bersifat komulatif (menggumpal). Apabila timbul kemakmuran sebagai akibat kemajuan di bidang pertanian, industri manufaktur, dan perniagaan, kemakmuran itu akan mengarah pada pemupukan modal, kemajuan teknik, meningkatnya produk, perluasan pasar, pembagian kerja, dan kenaikan secara terus menerus. Di lain pihak naiknya produktifitas akan menyebabkan upah naik dan ada akumulasi kapital. Tetapi karena Sumber Daya Alam terbatas adanya, maka keuntungan akan menurun karena berlakunya hukum penambahan hasil yang semakin berkurang. Pada tingkat inilah perkembangan mengalami kemacetan. Kelemahan teori Adam Smith:

- a. Pengabaian masyarakat secara luas
- b. Alasan yang tidak adil bagi kegiatan menabung
- c. Pengabaian pengusaha (wiraswasta)

b. David Ricardo

Menurut David Ricardo di dalam masyarakat ekonomi ada tiga golongan masyarakat yaitu golongan capital, golongan buruh, dan golongan tuan tanah. Golongan kapital adalah golongan yang memimpin

produksi dan memegang peranan yang penting karena mereka selalu mencari keuntungan dan menginvestasikan kembali pendapatannya dalam bentuk akumulasi kapital yang mengakibatkan naiknya pendapatan nasional. Golongan buruh merupakan golongan yang terbesar dalam masyarakat, namun sangat tergantung pada capital. Golongan tuan tanah merupakan golongan yang memikirkan sewa saja dari golongan kapital atas areal tanah yang disewakan. David Ricardo mengatakan bahwa bila jumlah penduduk bertambah terus dan akumulasi kapital terus menerus terjadi, maka tanah yang subur menjadi kurang jumlahnya atau semakin langka adanya. Akibatnya berlaku pula hukum tambahan hasil yang semakin berkurang. Disamping itu juga ada persaingan diantara kapitalis-kapitalis itu sendiri dalam mengolah tanah yang semakin kurang kesuburannya dan akibatnya keuntungan mereka semakin menurun hingga pada tingkat keuntungan yang normal saja.

c. Thomas Robert Malthus

Malthus menitikkan perhatian pada “perkembangan kesejahteraan” suatu negara, yaitu pembangunan ekonomi yang dapat dicapai dengan meningkatkan kesejahteraan suatu negara. Kesejahteraan suatu negara sebagian bergantung pada kuantitas produk yang dihasilkan oleh tenaga kerjanya, dan sebagian lagi pada nilai atas produk tersebut.

Pertumbuhan Penduduk dan Pembangunan Ekonomi, Menurut Malthus pertumbuhan penduduk saja tidak cukup untuk berlangsungnya pembangunan ekonomi. Malahan, pertumbuhan penduduk adalah akibat dari proses pembangunan ekonomi. Pertumbuhan penduduk akan

meningkatkan kesejahteraan hanya bila pertumbuhan tersebut meningkatkan permintaan efektif. Rendahnya konsumsi atau kurangnya permintaan efektif yang menimbulkan persediaan melimpah, menurut Teori Malthus merupakan sebab utama keterbelakangan. Untuk pembangunan, negara harus memaksimalkan produksi di sektor pertanian dan sektor industri. Ini memerlukan kemajuan teknologi, pendistribusian kesejahteraan dan tanah secara adil, perluasan perdagangan internal dan eksternal, peningkatan konsumsi tidak produktif, dan peningkatan kesempatan kerja melalui rencana pekerjaan umum.

d. Teori Karl Marx

Karl Marx lahir pada tahun 1818 di Kota Trier Jerman. Pemikiran Marx sangat dipengaruhi oleh Darwin dan menggunakan gagasan ini untuk menjelaskan proses dialektik sejarah. Menurut Marx, masyarakat menempuh tahapan-tahapan yang berbeda dalam sejarah dan yang menentukan tahapan-tahapan tersebut adalah perubahan dalam sarana produksi dan hubungan-hubungan produksi. Menurutnya berdasarkan sejarah, perkembangan masyarakat melalui 5 tahap :

- a. Masyarakat kumunal primitive, yang masih menggunakan alat-alat produksi sederhana yang merupakan milik kumunal. Tidak ada surplus produksi di atas konsumsi.
- b. Masyarakat perbudakan, adanya hubungan antar pemilik factor produksi dan orang-orang yang hanya bekerja untuk mereka. Para budak diberi upah sangat minim. Mulai ada spesialisasi untuk bidang

pertanian, kerajinan tangan dsb. Karena murah nya harga buruh maka minat pemilik factor produksi untuk memperbaiki alat-alat yang dimilikinya rendah. Buruh makin lama sadar dengan kesewenang-wenangan yang dialaminya sehingga menimbulkan perselisihan antara dua kelompok tersebut.

- c. Masyarakat fiodal, kaum bangsawan memiliki factor produksi utama yaitu tanah.. Para petani kebanyakan adalah budak yang dibebaskan dan mereka mengerjakan dahulu tanah milik bangsawan. Hubungan ini mendorong adanya perbaikan alat produksi terutama di sector pertanian. Kepentingan dua kelas tersebut berbeda, para feodal lebih memikirkan keuntungan saja dan kemudian mendirikan pabrik-pabrik. Banyak timbul pedagang-pedagang baru yang didukung raja yang kemudian membutuhkan pasar yang lebih luas. Perkembangan ini menyebabkan timbulnya alat produksi kapitalis dan menghendaki hapusnya system fiodal. Kelas borjuis yang memilki alat-alat produksi menghendaki pasaran buruh yang bebas dan hapusnya tariff serta rintangan lain dalam perdagangan yang diciptakan kaum fiodal sehingga kemudian masyarakat tidak lagi menyukai system ini
- d. Masyarakat kapitalis, hubungan produksinya didasarkan pada pemilikan individu masing-masing kapitalis terhadap alat-alat produksi. Kelas kapitalis mempekerjakan buruh . Keuntungan kapitalis membesar yang memungkinkan berkembangnya alat-alat produksi. Perubahan alat yang mengubah cara produksi selanjutnya

menyebabkan perubahan kehidupan ekonomi masyarakat. Perbedaan kepentingan antara kaum kapitalis dan buruh semakin meningkat dan mengakibatkan perjuangan kelas

- e. Masyarakat sosialis, kepemilikan alat produksi didasarkan atas hak milik sosial. Hubungan produksi merupakan hubungan kerjasama dan saling membantu diantara buruh yang bebas unsur eksploitasi. Tidak ada lagi kelas-kelas dalam masyarakat.

Marx meramalkan keruntuhan system kapitalis, menurutnya terjadi karena adanya

- Akumulasi yang menyebabkan perbedaan kaya miskin semakin lebar
- Kesengsaraan, karena kemiskinan semakin luas
- Krisis, karena daya beli masyarakat semakin berkurang karena pendapatan buruh semakin berkurang, sehingga terjadilah kelebihan produksi atas konsumsi (over production). Harga barang- barang merosot dan produksi terpaksa ditahan.
- Konsentrasi, penggabungan perusahaan-perusahaan agar tidak bangkrut karena persaingan dalam masyarakat kapitalis

Menurut Karl Marx masyarakat menempuh tahapan-tahapan yang berbeda dalam sejarah dan yang menentukan tahap-tahap tersebut adalah perubahan dalam sarana produksi dan juga hubungan-hubungan produksi yang telah dijelaskan di atas, namun sejarah telah membuktikan bahwa periode evolusi yang dikemukakan oleh Marx ternyata keliru. Tidak ada masa dalam sejarah masyarakat yang melalui tahapan evolusi

sebagaimana yang dikemukakan Marx. Sebaliknya sebagaimana system yang diyakini oleh Marx terjadi melalui serangkaian tahapan tertentu, malah dapat terjadi dalam waktu bersamaan dan dalam masyarakat yang sama pula di saat satu wilayah dari suatu Negara sedang mengalami system yang menyerupai masyarakat fiodal, system kapitalis berlaku di wilayah lainnya dalam Negara yang sama. Jadi pernyataan bahwa tahapan dari satu system ke system berikutnya mengikuti pola evolusi sebagaimana yang dikemukakan oleh Marx dan teori evolusi tidak dapat dibuktikan sama sekali.

2.1.2 Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah daerah adalah nilai pembelanjaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Pengeluaran untuk menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, pengeluaran yang menyediakan polisi dan tentara, pengeluaran gaji untuk pegawai pemerintah, dan pengeluaran untuk pengembangan infrastruktur dibuat untuk kepentingan masyarakat.

Pada dasarnya setiap pengeluaran negara dilakukan atas landasan prinsip optimalisasi pemanfaatan dana untuk mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan. Pengeluaran pemerintah harus mampu mencapai beberapa sasaran, seperti peningkatan produktivitas kerja aparatur pemerintah, perluasan jangkauan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan serta terpeliharanya berbagai aset negara dan hasil-hasil pembangunan. Pengeluaran pemerintah (*Government Expenditure*) adalah pengeluaran oleh pemerintah untuk membeli barang dan jasa. Sebagian dari

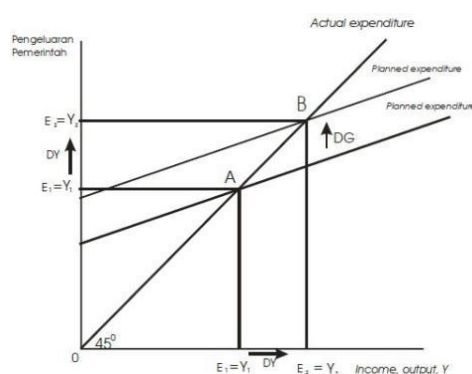
pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai administrasi pemerintahan atau pengeluaran rutin dan sebagian lainnya untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan atau pengeluaran 35 pembangunan. Pengeluaran rutin pemerintah terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, angsuran pinjaman/ hutang dan bunga, ganjaran subsidi dan sumbangan pada daerah, pensiun dan bantuan, pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain, dan pengeluaran tak terduga.

Pengeluaran pembangunan adalah pengeluaran yang ditujukan untuk membiayai proses perubahan, yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju kearah yang ingin dicapai. Umumnya biaya pembangunan tersebut diprogramkan dalam Daftar Isian Proyek (DIP).

Teori Pengeluaran Pemerintah Wagner dalam (Dumairy, 2004), dikemukakan bahwa perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentase terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Wagner mengatakan kecenderungan jika peranan pemerintah dalam pengeluaran meningkat (semakin tinggi pengeluaran pemerintah) maka pertumbuhan dan percepatan pembangunan akan selalu meningkat pula. Selanjutnya Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat, (Mangkoesoebroto, 2014). Kejadian tersebut dikarenakan bahwa pemerintah harus selalu campur tangan dalam menentukan kebijakan guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, rekreasi, hukum, kebudayaan dan kepentingan lainnya.

A. Teori Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Mangkoesoebroto, 1993; 169). Hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi secara teori diterangkan dalam Keynesian.



Sumber : Mankiw, 2003; 263

Gambar 2.1 Pengeluaran Pemerintahan Pada Keynesian Cross

Pada grafik 2.1 dapat dilihat peningkatan pengeluaran pemerintah berdampak pada kenaikan pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui pendapatan dan tingkat output. Peningkatan besarnya pengeluaran pemerintah berhasil merubah keseimbangan dari titik A ke titik B, yang berarti peningkatan pertumbuhan (Y).

Bailey (1995; 43) membagi teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah menjadi dua, yaitu teori makro dan teori mikro. Model makro dapat menjelaskan perhitungan jangka panjang pertumbuhan pengeluaran pemerintah, sedangkan model mikro menjelaskan perubahan secara particular komponen-komponen pengeluaran pemerintah. Teori

makro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu (Mangkoesoebroto, 1993; 169):

1. Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah.
2. Hukum Wagner mengenai perkembangan aktivitas pemerintah.
3. Teori Peacock & Wiseman.

B. Model Pembangunan Tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Mangkoesoebroto menjelaskan dalam bukunya bahwa model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut.

Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar, sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti pendidikan, kesehatan transportasi dan sebagainya. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin besar. Pada tingkat ekonomi yang lebih lanjut, Rostow menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti halnya, program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat dan sebagainya.

C. Hukum Wagner

Hukum Wagner yang dijelaskan oleh Mangkoesobroto mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentase terhadap GNP yang juga didasarkan pula pengamatan di negara-negara Eropa, US dan Jepang pada abad ke 19, hukum tersebut berbunyi : dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan per kapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat.

Hukum Wagner ini memiliki kelemahan karena hukum tersebut tidak didasarkan pada suatu teori mengenai pemilihan barang-barang publik. Wagner mendasarkan pandangan dengan suatu teori yang disebut teori organis mengenai pemerintah (organic theory of the state) yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak terlepas dari anggota masyarakat lainnya.

Hukum Wagner dapat diformulasikan sebagai berikut :

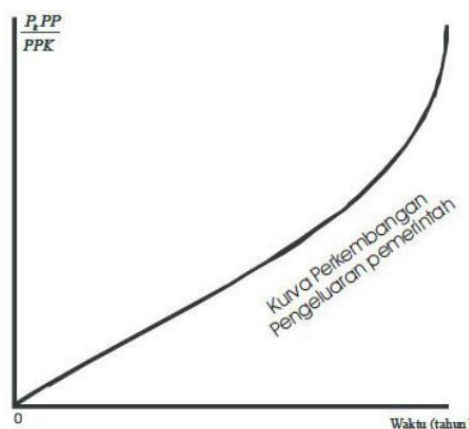
$$P_k PP_1 (P_k PP_2 (\dots P_k PP_n PPK_1 PPK_2 \dots PPK_n$$

PkPP : Pengeluaran Pemerintah perkapita

PPK : Pendapatan perkapita, yaitu GDP/ jumlah penduduk

1,2,...,n : jangka Waktu (Tahun)

Hukum Wagner ini ditunjukkan dalam grafik 2.2 dimana kenaikan pengeluaran pemerintah mempunyai bentuk eksponensial yang ditunjukkan oleh kurva perkembangan pengeluaran pemerintah (Mangkoesobroto, 1993; 172).



Sumber : Mangkoesobroto, 1993; 172

Gambar 2.2 Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Menurut Wagner

Dari ketiga teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah tersebut, teori Peacock & Wiseman dianggap sebagai teori dan model yang terbaik (Mangkoesobroto : 173). Menurut Peacock dan Wiseman (Mangkoesobroto, 1993) mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Teori Peacock dan Wiseman mengemukakan bahwa perkembangan ekonomi akan menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah, dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.

Pendapat Peacock dan Wiseman yang mengemukakan adanya peran pemungutan pajak dalam pembiayaan pengeluaran pemerintah didukung oleh

teori Erick Lindahl. Lindahl berpendapat bahwa penyediaan infrastruktur dilakukan pemerintah melalui pemungutan pajak kepada semua masyarakat yang berstatus wajib pajak dengan porsi yang sama. Namun, untuk mengantisipasi ketidakpuasan masyarakat dengan tarif pajak yang diberlakukan untuk ketersediaan infrastruktur maka pemerintah memberlakukan tarif pajak sesuai dengan kemampuan masyarakatnya. Meskipun, dengan tarif pajak yang diberlakukan kepada masyarakat berbedabeda tapi pemerintah berharap penerimaan dari pajak tetap sama dengan pemberlakuan tarif pajak yang sama kepada masyarakatnya.

2.1.3 Ekonomi Regional

Ekonomi regional merupakan industri potensi ekonomi yang beranekaragam pada beberapa sektor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai suatu proses perubahan kondisi perekonomian daerah secara berkesinambungan dalam periode tertentu. Istilah *region* diterjemahkan sebagai wilayah yang biasanya digunakan untuk mengartikan ruang. Ekonomi regional mulai diperkenalkan sejak awal abad ke-20 dan mencuri perhatian publik pada tahun 1956.

Pembahasan ekonomi regional bersifat spesifik dan lokal. Ekonomi regional bertujuan untuk menjelaskan mengenai *sub-national economies* bekerja, pengaruh yang diberikan pada barang dan jasa, orang, arus uang/modal dan lain-lain. Ekonomi regional berkembang dari kebutuhan pelaksanaan pembangunan pada suatu daerah. Suatu proyek atau kegiatan dapat bermanfaat dengan optimal jika dilakukan pada wilayah yang tepat.

Ilmu ekonomi regional bermanfaat baik secara makro maupun mikro. Salah satunya bagi perencana wilayah, analisis dalam ekonomi regional dapat menghemat waktu dan biaya dalam memilih lokasi yang tepat guna dengan memakai data sekunder yang tersedia. Selain itu manfaat makro bagi pemerintah pusat bermanfaat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi secara merata diseluruh wilayah Indonesia

Ilmu ekonomi regional (IER) atau biasa disebut ilmu ekonomi wilayah menurut Robinson Tarigan (2005) adalah salah satu bagian dari ilmu ekonomi yang menjelaskan tentang unsur perbedaan potensi sumber daya yang dimiliki satu wilayah dengan wilayah yang lain. IER merupakan bagian baru dari ilmu ekonomi. IER ada karena untuk menyelesaikan masalah khusus terkait pertanyaan di mana yang biasanya dikesampingkan dalam analisis cabang ilmu ekonomi lain. Tujuan yang paling utama dari IER adalah untuk menjelaskan diwilayah mana sebaiknya suatu kegiatan itu dilakukan dan mengapa harus dilakukan pada daerah itu. IER disini hanya akan memeberikan arahan batas wilayah. Tujuan IER sebenarnya hampir sama dengan tujuan dari cabang imu ekonomi pada umumnya.

Ferguson (1965) menejelaskan ada beberapa tujuan dari kebijakan ekonomi antara lain:

1. *full employment*
2. *economic growth*
3. *price tability.*

Maka dari itu, Tarigan (2005) mengemukakan tujuan dari masing-masing IER yakni:

1. Terciptanya *full employment* atau sekurang-kurangnya dapat mengurangi tingkat pengangguran yang menjadi salah satu tujuan dari berbagai pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah.
2. Adanya *economic growth* (pertumbuhan ekonomi), yang diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan terutama untuk angkatan kerja baru sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dengan adanya peningkatan pendapatan.
3. Menciptakan *price stability* (stabilitas harga), adanya stabilitas harga akan memberikan rasa aman pada masyarakat tanpa harus takut harga akan tiba-tiba melonjak. Ketika harga tidak stabil, maka masyarakat akan merasa tidak tenang, karena mereka akan berfikir apakah simpanan atau tabungan mereka cukup untuk memenuhi kebutuhan dikemudian hari.

a. Produk Domestik Regional Bruto

Dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terdapat informasi mengenai output sektor ekonomi dan pertumbuhan di suatu wilayah (kabupaten). Data PDRB dapat digunakan untuk menentukan sektor unggulan suatu daerah/kabupaten. PDRB menurut Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah. PDRB dapat dinyatakan atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggunakan harga setiap tahun, sedang PDRB atas dasar harga konstan menggunakan harga pada tahun tertentu.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga diartikan sebagai nilai tambah bruto yang muncul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. PDRB merupakan indikator yang dapat mencerminkan perekonomian suatu daerah. Dalam PDRB, nilai tambah bruto disajikan berdasarkan lapangan usaha. Lapangan usaha menurut prioritas pembangunan dikelompokkan menjadi 3 yaitu primer, sekunder dan tersier. Kelompok Lapangan usaha primer terdiri dari pertanian, perikanan, pertambangan dan penggalan. Kemudian Kelompok lapangan usaha sekunder terdiri dari industri pengolahan, pengadaan listrik, gas, air, dan konstruksi. Kemudian lapangan usaha tersier terbagi atas perdagangan besar, dan reparasi mobil dan sepeda motor, penyediaan akomodasi makan dan minuman, transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, *real estate*, jasa keuangan, jasa perusahaan, jasa pendidikan, jasa kesehatan, administrasi pemerintahan dan kegiatan sosial dan jasa lainnya.

Menurut BPS (1996) nilai tambah bruto merupakan hasil dari proses produksi yang terdiri dari komponen pendapatan, penyusutan barang modal tetap, dan pajak tak langsung. Nilai tambah bruto dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$NTB = P \times H - A$$

$$O = P \times H$$

$$NTB = O - A$$

Keterangan :

NTB : Nilai Tambah Bruto

H : Harga Per Satuan

A : Biaya Antara (Barang tidak tahan lama dan jasa dalam produksi)

O : Output atau nilai produksi bruto

Produk Domestik Regional Bruto merupakan data statistika atas pertumbuhan maupun tingkat pendapatan masyarakat yang merangkum keseluruhan akibat dari kegiatan ekonomi yang berupa perolehan nilai tambah, selama periode waktu tertentu di suatu wilayah. PDRB juga berguna sebagai alat yang dapat menjadikan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi, pemahaman atas akibat dari fenomena yang terjadi, maupun bahan kajian atas rencana pembangunan selanjutnya baik dalam sektor nasional maupun regional yang melibatkan pemerintah pusat atau daerah, termasuk swasta (Badan Pusat Statistik, 2008)

PDRB sendiri dihitung melalui dua cara, yaitu PDRB harga tetap di mana perhitungan menggunakan harga tahun dasar, dan PDRB harga berlaku dimana perhitungan menggunakan harga barang dan jasa tahun berjalan. PDRB atas dasar harga konstan mencerminkan pertumbuhan ekonomi tahunan riil yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Sementara itu, PDRB atas dasar harga berlaku mencerminkan kapasitas sumber daya ekonomi, pergeseran atau perubahan, dan struktur ekonomi suatu wilayah.

Terdapat tiga pendekatan untuk mendefinisikan PDRB, yaitu:

a. Pendekatan Produksi

PDRB merupakan total Nilai Tambah Bruto (NTB) yang terjadi sebagai akibat dari berbagai unit produksi dalam suatu wilayah yang melakukan

produksi barang dan jasa pada jangka waktu tertentu; umumnya sepanjang tahun.

$$PDRB = NTB \text{ kategori } 1 + \dots + NTB \text{ kategori } 17$$

b. Pendekatan Pendapatan

PDRB merupakan total faktor produksi yang ikut dalam proses produksi yang menerima balas jasa pada jangka waktu tertentu. Balas jasa tersebut dapat berupa upah, bunga modal, dan lain-lain. Penyusutan barang modal tetap, serta pajak tidak langsung netto juga termaksud sebagai komponen penyusun PDRB dalam Pendekatan Pendapatan. Total dari seluruh komponen tersebut per sektor disebut dengan Nilai Tambah Bruto Sektoral.

$$PDRB = Sewa Tanah + Bunga/Deviden + Upah/Gajji \\ + Keuntungan + Pajjak Tidak Langsung Netto$$

c. Pendekatan Pengeluaran

PDRB merupakan total pengeluaran atas konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta, konsumsi pemerintah, dan lain-lain selama satu periode

$$PDRB = Konsumsi (Rumah Tangga + Pemerintah) \\ + Investasi /PMTB + \Delta Inventory + Ekspor - Impor$$

Meskipun pendekatan perhitungan dilakukan melalui tiga cara berbeda, hasil nilai PDRB akan tetap sama. Dan untuk PDRB Kota Tangerang Selatan pada tahun 2019 sendiri, dihitung dengan pendekatan produksi.

1. PDRB Perkapita

PDRB perkapita adalah pembagian antara PDRB suatu daerah dengan jumlah orang yang tinggal di daerah tersebut. PDRB Perkapita

mencerminkan pendapatan rata-rata setiap orang pada tahun tersebut, tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut, dan dapat memprediksi tingkat pendapatan masyarakat di daerah tersebut di masa yang akan datang.

PDRB dengan PDRB Perkapita memiliki sifat yang sejalan, di mana mereka sama-sama searah dalam bidang kemakmuran masyarakat. Kedua komponen ini juga bersifat positif yang berarti semakin tinggi PDRB ataupun PDRB Perkapita suatu wilayah, maka semakin sejahtera pula masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut.

PDRB per kapita juga diasumsikan sebagai pendapatan perkapita, sehingga setiap peningkatan perkembangan daya beli penduduk, dianggap setara dengan peningkatan pendapatan per kapita yang telah disesuaikan dengan inflasi. (Badan Pusat Statistik & Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan, 2020)

2. PDRB Pengeluaran

PDRB pengeluaran adalah penggambaran atas penggunaan barang dan jasa oleh masyarakat yang dihasilkan melalui aktivitas produksi, bisa juga disebut sebagai hasil terakhir dari proses produksi yang selama ini berlangsung yang dibatasi oleh wilayah. PDRB pengeluaran sendiri memiliki beberapa variable yaitu pengeluaran konsumsi akhir, pembentukan modal tetap bruto, serta impor ekspor. PDRB Pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku ekonomi untuk mendapatkan hasil produksi atas barang dan jasa, dimana hal tersebut juga memiliki keterkaitan atas penyediaan barang dan jasa impor maupun domestic. Dari hubungan inilah terlihat titik keseimbangan antara penyediaan atau penawaran dan

permintaan atas barang dan jasa. Pada PDRB Pengeluaran ini, kita dapat melihat kemampuan daya beli masyarakat yang dapat tercermin melalui Angka Indeks Tingkat Daya Beli (PPP). Dimana, semakin besar angka indeks PPP, maka semakin tinggi pula kesempatan masyarakat untuk memenuhi standar kehidupan yang layak. PDRB pengeluaran juga dapat tercermin dari pola konsumsi rumah tangga, dikarenakan pendapatan seseorang akan mempengaruhi pola konsumsinya. Pada kelompok penduduk dengan tingkat pendapatan rendah, pengeluaran akan focus ke dalam pemenuhan kebutuhan hidup, yaitu konsumsi makanan sebagai pilihan alternative yang utama. Sementara untuk mencari daya beli masyarakat atas perumahan, maka analisis akan difokuskan terhadap pengeluaran perkapita total bukan makanan.

2.1.4 Desentralisasi Fiskal

1. Hubungan Antara Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi

Hubungan antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi disebutkan bahwa efisiensi ekonomi secara mendasar dapat ditingkatkan melalui delegasi dalam bentuk desentralisasi fiskal kepada pemerintah level terendah, sehingga mengakibatkan terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi baik pada tingkat nasional dan regional. Terdapat dua gagasan fundamental ekonomi dibalik desentralisasi fiskal yaitu:

1. Melalui desentralisasi, efisiensi ekonomi dapat ditingkatkan karena pemerintah daerah mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik

2. Kompetisi dalam penyediaan pelayanan publik dan mobilitas penduduk antar pemerintah daerah akan terjadi dalam rangka untuk menyesuaikan dan mencocokkan antara preferensi masyarakat dengan pemerintah daerah.

2.2 Regulasi

a. UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (PKPD)

Di Indonesia Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia diawali secara resmi dengan disahkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (PKPD). Sampai saat ini, kedua undang-undang tersebut sudah mengalami beberapa kali perubahan hingga yang terakhir UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 disebutkan bahwa Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di Indonesia, desentralisasi fiskal berfokus di tingkat kabupaten/kota yang merupakan wilayah tingkat II. Menurut Pasal 14 UU Nomor 32 Tahun 2004, yang merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota meliputi perencanaan dan pengendalian pembangunan, perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang. Penyelenggaraan

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat penyediaan sarana dan prasarana umum penanganan bidang kesehatan penyelenggaraan pendidikan penanggulangan masalah sosial pelayanan bidang ketenagakerjaan fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah, pengendalian lingkungan hidup, pelayanan pertanahan, pelayanan kependudukan, dan catatan sipil pelayanan administrasi umum pemerintahan, pelayanan administrasi penanaman modal penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya dan urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Sampai saat ini, kedua undang-undang tersebut sudah mengalami beberapa kali perubahan hingga yang terakhir UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 disebutkan bahwa Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. UUD 1945 pada Pasal 23 ayat (5) yang mengatur tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah diamandemen dan menjadi Pasal 23E yang berbunyi:

1. Untuk memeriksa tanggung jawab Pemerintah tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksaan Keuangan yang bebas dan mandiri
2. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya.

3. Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang undang.

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 23E ini, maka kedudukan BPK sebagai aparat pengawas pengelolaan keuangan negara menjadi semakin kuat dan dipertegas kemandiriannya dari pemerintah Demikian juga DPR sebagai pengawas pengelola keuangan negara menjadi semakin kuat. Laporan keuangan pemerintah (pusat) yang telah diperiksa oleh BPK harus disampaikan kepada DPR paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan. Demikian pula laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diperiksa oleh BPK harus disampaikan kepada DPR paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

c. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 2 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang kemudian disempurnakan dengan diterapkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan Undang Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Perubahan paradigma ini antara lain diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Selain undang-undang tersebut di atas, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah Undang-undang dimaksud adalah No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-

Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendahara Negara, Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pada dasarnya buah pikiran yang melatarbelakangi terbitnya peraturan perundang-undangan tersebut merupakan keinginan untuk mengelola keuangan negara dan daerah secara efektif dan efisien.

d. Kebijakan Dana Desa

Menurut UU No 60 tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun.

Pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 5 Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2014 dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.

Penyusunan pagu anggaran Cadangan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyusunan rencana dana pengeluaran Bendahara Umum Negara. Pagu anggaran adalah alokasi anggaran yang ditetapkan dalam DIPA untuk mendanai belanja pemerintah pusat dan/atau pembiayaan anggaran dalam APBN Tahun Anggaran. Pagu anggaran Cadangan Dana Desa diajukan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan menjadi pagu Dana Desa.

Dana Desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah Desa di setiap kabupaten/kota dan rata-rata Dana Desa setiap provinsi. Rata-rata Dana Desa setiap provinsi sebagaimana dialokasikan berdasarkan jumlah Desa dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk kabupaten/kota, luas wilayah kabupaten/kota, angka kemiskinan kabupaten/kota, dan tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan, yang dihitung dengan bobot:

- a. 30% (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk kabupaten/kota
- b. 20% (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah kabupaten/kota
- c. 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan kabupaten/kota

Rata-rata Dana Desa setiap provinsi menurut pasal 11 PP Nomor 60 tahun 2014 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap kabupaten/Kota dihitung dengan cara:

- a. Dana Desa nasional yang ditetapkan dalam APBN x [(30% x persentase jumlah penduduk kabupaten/kota terhadap total penduduk nasional) + (20% x persentase luas wilayah kabupaten/kota terhadap total luas

wilayah nasional) + (50% x persentase jumlah penduduk miskin kabupaten/kota terhadap total jumlah penduduk miskin nasional)] untuk mendapatkan Dana Desa setiap kabupaten/kota

- b. Dana Desa setiap kabupaten/kota hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a dikalikan indeks kemahalan konstruksi setiap kabupaten/kota
- c. hasil penghitungan Dana Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf b dijumlahkan berdasarkan provinsi
- d. Jumlah Dana Desa setiap provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf c dibagi dengan jumlah Desa di setiap provinsi untuk mendapatkan rata-rata Dana Desa setiap provinsi.

Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas Desa. Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di kas Daerah. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:

- a. Tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus)
- b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus)
- c. Tahap III pada bulan November sebesar 20% (dua puluh per seratus)

Menurut PP No 60 tahun 2014 pasal 19, Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah

Desa. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, Menteri, dan menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian. Menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian membuat pedoman umum kegiatan yang didanai dari Dana Desa dengan mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa.

e. Kebijakan Indeks Desa Membangun

Menurut UU No 2 Tahun 2016, Indeks Desa Membangun (IDM) adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Lingkungan/Ekologi Desa (IKL). Sejalan dengan pasal 3 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi No 2 Tahun 2016 masing-masing komponen IDM terdiri dari beberapa dimensi yaitu:

A. Indeks Ketahanan Sosial (IKS) terdiri dari dimensi:

1. Modal sosial, terdiri dari perangkat indikator: memiliki solidaritas sosial, memiliki toleransi, rasa aman penduduk, dan kesejahteraan sosial.
2. kesehatan, terdiri dari perangkat indikator: pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat untuk kesehatan, dan jaminan kesehatan.
3. Pendidikan, terdiri dari perangkat indikator: akses ke pendidikan dasar dan menengah, akses ke pendidikan non-formal, dan akses ke pengetahuan.
4. Permukiman, terdiri dari perangkat indikator: akses air bersih dan air minum layak, akses ke sanitasi, akses ke listrik,serta akses ke informasi dan komunikasi.

B. Indeks Ketahanan Ekonomi terdiri dari dimensi:

1. Ekonomi, terdiri dari perangkat indikator: keragaman produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/logistik, akses ke lembaga keuangan dan perkreditan, lembaga ekonomi (koperasi), dan keterbukaan wilayah.

C. Indeks ketahanan Lingkungan/ekologi terdiri dari dimensi:

1. Lingkungan/Ekologi, terdiri dari perangkat indikator: kualitas lingkungan, serta potensi rawan bencana dan tanggap bencana.

Indeks Desa Membangun disusun untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menangani pengentasan Desa Tertinggal dan peningkatan Desa Mandiri. Adapun Menurut pasal 5 ayat (1) No 2 Tahun 2016 Status kemajuan dan kemandirian Desa yang ditetapkan berdasar Indeks Desa Membangun ini diklasifikasi dalam 5 status Desa yakni:

- a. Desa Mandiri, atau bisa disebut sebagai Desa Sembada yaitu Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
- b. Desa Maju, atau bisa disebut sebagai Desa PraSembada yaitu Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
- c. Desa Berkembang, atau bisa disebut sebagai Desa Madya yaitu Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial,

ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.

- d. Desa Tertinggal, atau dapat disebut Desa PraMadya yaitu Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
- e. Desa Sangat Tertinggal, atau dapat disebut Desa Pratama yaitu Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

Klasifikasi status desa tersebut di atas dihasilkan berdasarkan Indeks Desa Membangun dengan status kemajuan dan kemandirian Desa sebagai berikut:

- a. Desa Mandiri atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun lebih besar ($>$) dari 0,8155.
- b. Desa Maju atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (\leq) 0,8155 dan lebih besar ($>$) dari 0,7072.
- c. Desa Berkembang atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (\leq) 0,7072 dan lebih besar ($>$) dari 0,5989.

- d. Desa Tertinggal atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (\leq) 0,5989 dan lebih besar ($>$) dari 0,4907.
- e. Desa Sangat Tertinggal atau Desa Pratama adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan lebih kecil (\leq) dari 0,4907.

Penetapan status kemajuan dan kemandirian Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut digunakan untuk instrumen koordinasi Kementerian/Lembaga, maupun antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, serta secara khusus untuk kebutuhan pemetaan tipologi Desa dan penyusunan prioritas penggunaan Dana Desa.

Status kemajuan dan kemandirian desa ditetapkan berdasarkan Data Indeks Desa Membangun sejumlah 75.754 Desa yang merujuk pada Data Potensi Desa Tahun 2014. Untuk keberlanjutan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, Indeks Desa dapat dilakukan pembaharuan data. Pembaharuan data dilakukan berdasarkan:

- a. Hasil data Potensi Desa (Podes) Badan Pusat Statistik; dan
- b. Melalui Survei Desa Membangun berdasar indikator Indeks Desa Membangun yang dilaksanakan secara berkala.

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Riset
1.	Sianipar Ruth Tridianti, dkk.	Efektivitas Penguatan Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan Di Kabupaten Simalungun	Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, Pembangunan Ekonomi	Hasil penelitian yang diperoleh responden menyatakan bahwa dana desa yang disalurkan dari pemerintah cukup untuk pembangunan desa, dalam pemberdayaan masyarakat dana desa paling banyak digunakan untuk program pemerintah desa untuk memberdayakan masyarakat desa, pemerintah desa menyusun dokumen perencanaan yang terdiri dari APBDes, RPJMDes, dan RKPDes, setiap perencanaan program harus didukung oleh masyarakat desa dalam pelaksanaannya dengan menginformasikan setiap pengeluaran dan pemasukan dana, pengawasan melakukan pemantauan secara berkala terkait pembangunan fisik desa, dan penyampaian laporan penggunaan dana desa yang digunakan untuk pembangunan desa perlu dilakukan.

				disampaikan secara transparan.
2.	Nurpuspita Ria, dkk	Analisis pengelolaan dana desa sebagai realisasi salah satu tujuan program nawacita “membangun indonesia dari pinggiran” di kecamatan bener kabupaten purworejo tahun 2016	Village Fund (DD), program implementasi, Nawacita, pembangunan desa	Dengan hasil ini, upaya harus dilakukan khususnya bagi pemerintah desa di Kabupaten bener untuk lebih memperhatikan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa.
3.	Martien Herna Susanti1	Peran pendamping desa dalam mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat menuju desa mandiri di desa gonoharjo kecamatan limbangan kabupaten kendal	Pendamping desa, partisipasi masyarakat, desa mandiri	Di sinilah peran pendamping menjadi strategis dalam mendorong prakarsa, kesadaran, dan partisipasi masyarakat desa dalam mewujudkan desa mandiri yang mampu bertindak selaku subjek pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan desa yang dilaksanakan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel.
4.	Ngudi Astuti dan Ida Zubaedah2	Kebijakan publik pemerintahan joko widodo dan ma'ruf amin melalui bantuan tunai langsung (blt) dalam menanggulangi masalah kemiskinan di	Kebijakan publik, bantuan langsung tunai, kemiskinan	Prosentasi BLT diatur melalui peraturan menteri Keuangan RI Nomor 201/BMK.07/2022 tentang penyaluran dana desa tahun 2023 tanggal 10 Maret 2023. Secara nasional program penyaluran BLT berjumlah 64,90% atau sekitar

		indonesia periode ke-2 tahun 2019 – 2024		Rp. 133.906.537.027 dengan rincian dana desa regular 41.28% atau senilai Rp. 28.071.152.010.777 dan dana BLT desa sebesar 23.62%. BLT dinyatakan berhasil meskipun timbul kontroversi. BLT berhasil meredam angka kenaikan kemiskinan di Indonesai. Hal itu dibuktikan dengan prosentasi kenaikan kemiskinan pada saat 2022 yang mampu ditahan di angka 9,57% tanggal 19 Januari 2023..
5.	Rizky Wulan Ramadhani dan Edy Prianthoro	Strategi Komunikasi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam Menerapkan Nawacita dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Komunikasi Pembangunan, Komunikasi Strategis, Pemerintahan Daerah, SDGs	Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan metode wawancara dan dokumentasi. Key informant dalam penelitian ini adalah Kang Yoto, Bupati Bojonegoro periode 2008-2018 dan dokumentasi dari berbagai sumber. Hasil penelitian ini adalah Pemkab Bojonegoro menggunakan strategi yang didasarkan pada media yang dipakai, strategi desain instruksional, strategi pemasaran, dan strategi partisipatori. Strategi yang dipakai efektif untuk mengajak masyarakat Bojonegoro sekaligus memberi informasi

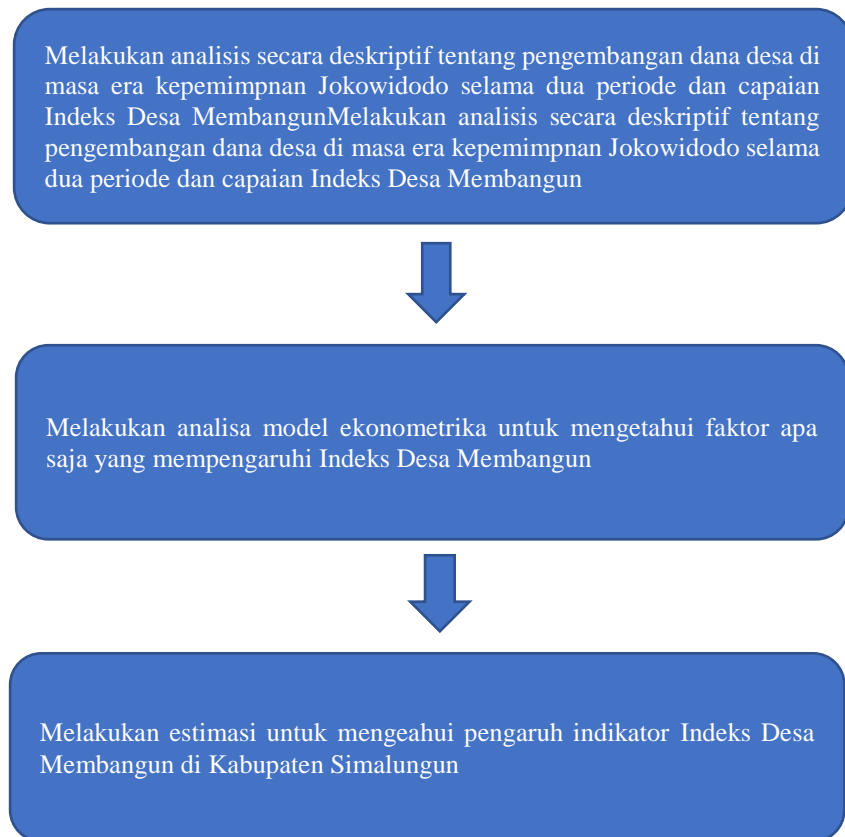
				bagi publik. Pemerintah daerah yang lain bisa menerapkan strategi yang sama dengan mempertimbangkan kondisi masyarakatnya.
6.	Muhammad Ariq Saifullah	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara	Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal	Hasil penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif pertumbuhan ekonomi, pendapatan awal daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, secara bersama-sama atau tidak, terhadap belanja modal di daerah. Kabupaten/Kota di Sumut.

2.4 Kerangka Penelitian

2.4.1 Tahap Penelitian

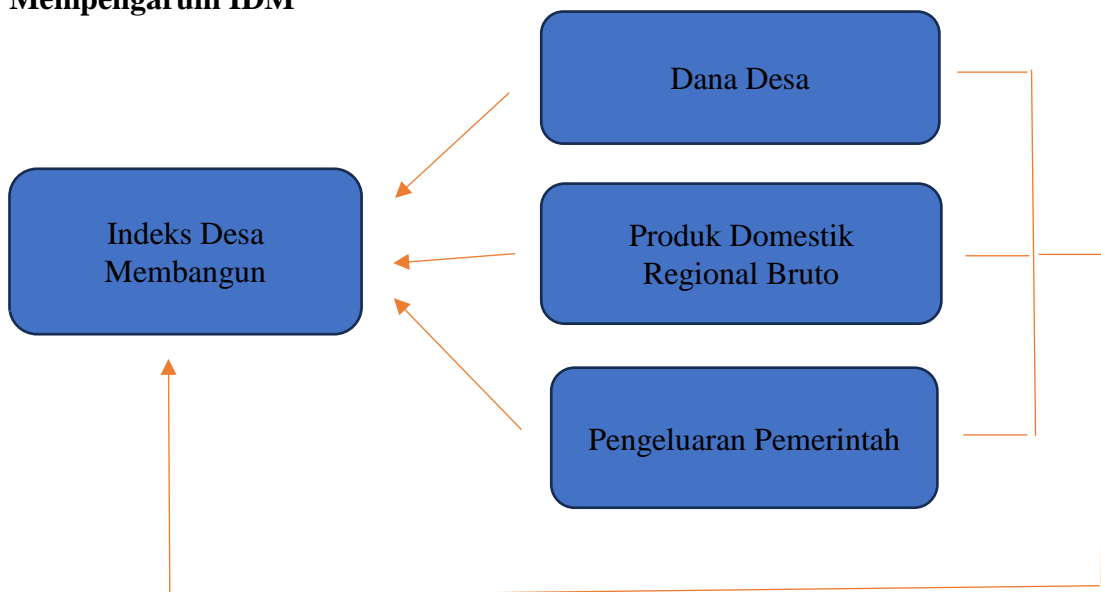
Beberapa indikator yang dianggap mempengaruhi pengembangan desa yaitu Produk Domestik Regional Bruto, Pengeluaran Pemerintah, Dana Desa. Setelah dilakukan estimasi baru melihat bagaimana efektivitas pengembangan Desa Pinggiran Menjadi Desa Nawacita Melalui Pemanfaatan Dana Desa Desentralisasi Era Kepemimpinan Jokowi. Dan melakukan indikator apa saja yang mempengaruhi Indeks Desa Membangun di Kabupaten Simalungun pada Desa Pematang Sidamanik dan Sarimattin melalui kuesioner.

2.4.2 Kerangka Analisis Penelitian



Gambar 2.3 Kerangka Analisis Penelitian

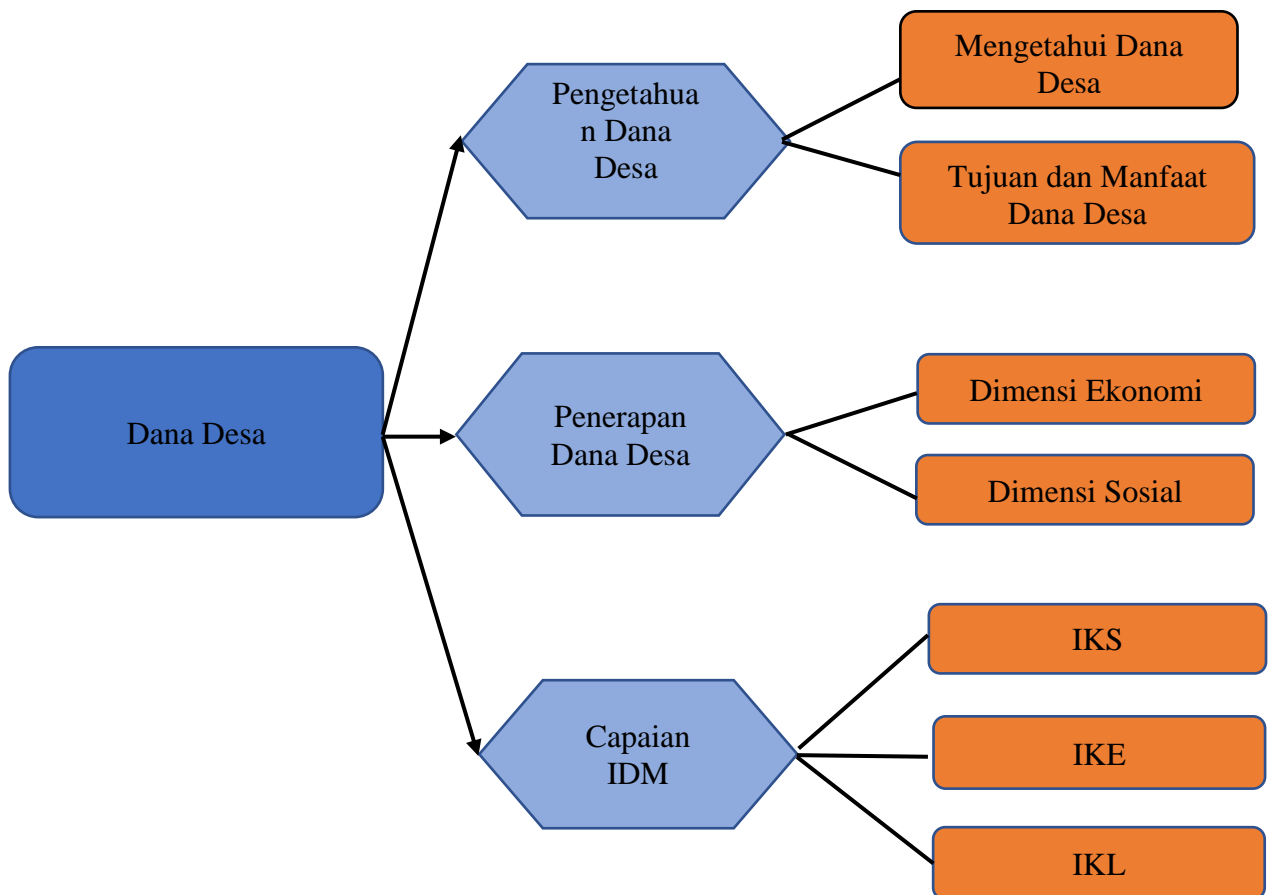
2.4.3 Kerangka Konseptual Model Estimasi Ekonomi Terkait Faktor Yang Mempengaruhi IDM



Gambar 2.4 Kerangka Konseptual Model Ekonometrika

Dalam Model ini, variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pengeluaran Pemerintah (PP) dan Dana Desa (DD) merupakan variabel bebas yang mempengaruhi secara langsung terhadap Indeks Desa Membangun (IDM) yang dimana merupakan variabel terikat.

2.4.4 Kerangka Konseptual Model Estimasi Ekonomi Terkait Faktor Yang Mempengaruhi IDM



Gambar 2.5 Kerangka Konseptual Analisa Faktor

Dalam Model ini, variabel Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks ketahanan Lingkungan (IKL) merupakan

variabel bebas yang mempengaruhi secara langsung terhadap Indeks Desa Membangun (IDM) yang dimana merupakan variabel terikat.

2.5 Hipotesis

Berdasarkan landasan teori, penelitian-penelitian terdahulu dan kerangka konseptual penelitian diatas, maka hipotesis dari penelitian ini adalah:

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pengeluaran Pemerintah (PP) dan Dana Desa (DD) terhadap Indeks Desa Membangun (IDM)
2. Terdapat korelasi Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Sosial (IKL) terhadap Indeks Desa Membangun (IDM).

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian adalah langkah dan prosedur yang dilakukan dalam mengumpulkan informasi empiris guna memecahkan masalah dan menguji hipotesis dari sebuah penelitian.

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, yang dimana bertujuan untuk mengestimasi dan menganalisis hubungan antar variabel yang telah ditentukan untuk menjawab rumusan masalah dengan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif yaitu data yang berbentuk angka dan bilangan. Data yang akan disajikan adalah data *time series* yaitu data yang secara kronologis disusun menurut waktu pada suatu variabel tertentu. Selanjutnya penelitian ini menggunakan data primer yaitu data yang didapat secara langsung dari responden berbentuk kuesioner.

3.2 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan acuan dari tinjauan Pustaka yang digunakan untuk melakukan penelitian dimana antar variabel yang satu dengan variabel yang lainnya dapat dihubungkan sehingga penelitian dapat disesuaikan dengan data yang diinginkan. Adapun variabel yang terdapat dalam penelitian ini ialah:

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel Model Ekonometrika

Variabel	Definisi Operasional	Kategori	Sumber Data
Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks komposit yang dibentuk dari tiga indeks yaitu IKS, IKE dan IKL dengan tujuan mengukur perkembangan kemandirian desa dengan nilai indeks berdasarkan implementasi UUD dalam bentuk persen	Dependant Variabel	www.idm.kemendes.go.id
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	Laju pertumbuhan PDRB berdasarkan harga berlaku dalam satuan rupiah per tahun	Independent Variable	www.simalungunkab.bps.go.id
Pengeluaran Pemerintah (PP)	Pengeluaran Pemerintah merupakan dana yang keluar dari kas pemerintah yang diukur dalam satuan rupiah per tahun	Independent Variable	www.apbn.bps.go.id www.apbd.bps.go.id
Dana Desa (DD)	Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa melalui APBD dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dengan diukur dalam satuan rupiah per tahun	Independent Variable	www.admpembangunankab.go.id www.prp2sumutprov.go.id

Sumber: Olahan Penulis

Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel Model Analisis Multivariat

Variabel	Defenisi Operasional	Indikator	Skala
F1 Dana Desa	Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa melalui APBD dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dengan diukur dalam satuan rupiah per tahun	1.	1-7
F2 Pengetahuan Dana Desa	Alokasi dana dari APBN untuk pembangunan desa yang disalurkan melalui APBD kabupaten/kota dalam satuan rupiah	1. Mengetahui Dana Desa 2. Tujuan serta manfaat dana desa	1-7
F3 Penerapan Dana Desa	Dana untuk pembangunan desa dalam APBN disalurkan melalui APBD dalam satuan rupiah	1. Dimensi Ekonomi 2. Dimensi Sosial	1-7
F4 Capaian Indeks Desa Membangun	Indeks komposit yang dibentuk dari tiga indeks yaitu IKS, IKE dan IKL dengan tujuan mengukur perkembangan kemandirian desa dengan nilai indeks berdasarkan implementasi UUD dalam bentuk persen	1. Indeks Ketahanan Sosial (IKS) 2. Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) 3. Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	1-7

Sumber: Olahan Penulis

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

3.3.1. Tempat Penelitian

Secara khusus penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan di Indonesia dengan melihat perkembangan dana desa. Serta data yang digunakan merupakan data yang telah disediakan dalam laporan berbagai lembaga resmi.

3.3.2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini akan direncanakan selama 2 bulan dimulai dari Mei hingga Juni 2024

3.4 Jenis Data

3.4.1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat 2 jenis. Pertama adalah data sekunder berupa time series (runtut waktu) yaitu data bulanan yang dimulai dari periode 2015- 2023. Kedua adalah data primer berupa data kuisisioner yaitu data yang diambil secara langsung.

3.4.2. Sumber Data

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari beberapa lembaga resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Administras Pembangunan Kabupaten, Progress Report Pengendalian Pembangunan Sumatera Utara dan Website Pemerintah Kabupaten Simalungun.

3.5 Populasi dan Sampel

3.5.1 Populasi

Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajarinya atau untuk menjadi objek penelitian (kuncoro, 2013). Unit yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat di Kabupaten Simalungun.

3.5.2 Sampel

Sampel adalah suatu himpunan dari populasi yang ingin diteliti. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *snowball sampling*. Peneliti menggunakan teknik snowball sampling karena memperhatikan pertimbangan tertentu yang kemungkinan akan dihadapi pada saat penelitian. Pertimbangan tersebut misalnya data yang didapatkan kurang dapat memenuhi kapasitas. *Snowball sampling* yaitu teknik pengambilan sampel rujukan berantai atau teknik pengambilan sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit kemudian menjadi membesar, hal ini dikarenakan sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari informan lain yang digunakan sebagai sumber data (Sugiyono, 2019). *snowball sampling* didefinisikan sebagai teknik pengambilan sampel *non-probabilitas* dimana tidak ada peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dijadikan sampel dalam penelitian dan responden yg dibutuhkan itu memiliki kategori atau sifat tertentu seperti pemerintahan desa, karang taruna, LKMD karna itula bersifat *non probability* dan dipilihnya *snowball sampling* karena untuk mempertimbangkan hal-hal yang mungkin akan terjadi. Seperti sulitnya di temukan responden atau mengidentifikasi

responden dan jawaban responden pertama yang kurang memadai sehingga meminta info dari responden pertama tersebut dapat membantu sehingga membantu dalam pencarian responden selanjutnya. Menurut Nurdiani (2014) dalam teknik snowball sampling, jumlah orang atau responden awal yang diperlukan adalah 2-12 orang kemudian dari responden awal tersebut dapat diperoleh 10-30 untuk ukuran sampel sedang (medium) dan > 30 untuk ukuran sampel besar. Unit kecil yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Perangkat Desa, Masyarakat Desa, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Karang Taruna dan Pengusaha Desa sebanyak 50 responden di Desa Pamatang Sidamanik dan Sarimattin.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengambilan data sekunder melalui Badan Pusat Statistik (BPS) dan Website Pemerintah Kabupaten Simalungun dengan kurun waktu 7 tahun (2016-2023). Serta pengumpulan data primer dengan teknik kuisisioner yang diambil secara langsung.

3.7 Teknik Analisis Data

3.7.1. Melakukan Analisis Secara Deskriptif Tentang Pengembangan Dana Desa Di Masa Era Kepemimpinan Jokowi Widodo Selama Dua Periode Dan Capaian Indeks Desa Membangun di Kabupaten Simalungun

Metode analisis deskriptif merupakan suatu metode analisa sederhana yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi observasi dengan menyajikan dalam bentuk tabel, grafik, maupun narasi dengan tujuan memudahkan pembaca dalam menafsirkan hasil penelitian. Metode analisis deskriptif dalam penelitian ini

dilakukan untuk mengetahui bagaimana perkembangan kebijakan dana desa di Indonesia.

3.7.2. Analisa Model Ekonometrika Untuk Mengetahui Faktor-faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi IDM

a. Model Estimasi

Penelitian ini mengenai faktor yang memengaruhi kredit di Indonesia dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan menggunakan data times series yaitu data bulanan yang dimulai dari periode 2016-2023, model ekonometrika pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$IDMt = \beta_0 + \beta_1 PDRBt + \beta_2 PPt + \beta_3 DD + \varepsilon t$$

Dimana :

$IDMt$: Indeks Desa Membangun
 $PDRB$: Produk Domestik Bruto
 PP : Pengeluaran Pemerintah
 DD : Dana Desa
 β_0 : Konstanta
 β_1 – : Koefisien
 β_3
 t : Unit Waktu (2016-2023)
 εt : *term of error*

Setelah model penelitian diestimasi maka akan diperoleh nilai dan besaran masing-masing parameter model persamaan diatas. Nilai dari parameter positif dan negatif selanjutnya akan diperoleh untuk menguji hipotesa penelitian.

b. Metode Estimasi

Metode estimasi pada penelitian ini adalah untuk mengestimasi semua variabel yang diamati menggunakan data runtun waktu (time series) dalam kurun waktu 9 tahun (dari tahun 2016 sampai 2023). Analisis trend dalam kurun waktu tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan metode kuadrat terkecil atau OLS (Ordinary Least Square) dalam bentuk regresi linier berganda (multiple regression model) dalam bentuk regresi linear berganda (multiple regression model) yang disajikan lebih sederhana serta mudah dipahami.

Asumsi-asumsi yang mendasari model regresi linear dengan menggunakan metode OLS adalah sebagai:

1. Nilai rata-rata disturbance tern $= 0$
2. Tidak terdapat korelasi serial (serial auto correlation) diantara disturbance tern $COV(\epsilon_t, \epsilon_j) = 0 : I \neq j$
3. Sifat momocidentecity dari disturbance tern $Var(\epsilon^i) = \sigma^2$
4. Covariance antar ϵ^i dari setiap variabel bebas $(x) = 0$ setiap variabel bebas $(x) = 0$
5. Tidak terdapat bias dalam spesifikasi model regresi. Artinya, model regresi yang diuji secara tepat telah dispesifikasikan atau diformulasikan.
6. Tidak terdapat collinearity antara variabel-variabel bebas. Artinya, variable- variabel bebas tidak mengandung hubungan linier tertentu antara sesamanya.
7. Jika model berganda yang diestimasi melalui OLS memenuhi suatu set asumsi (asumsi gauss-markov), maka dapat ditunjukkan bahwa

parameter yang diperoleh adalah bersifat BLUE (*best linear unbiased estimator*). (Gujarati, 2016).

A. Tahapan Analisis

1. Penaksiran

a. Korelasi (r)

Koefisien korelasi merupakan derajat keeratan antara variabel terikat dengan variabel bebas yang diamati. Koefisien korelasi biasanya dilambangkan dengan huruf r dimana bervariasi mulai -1 sampai $+1$. Nilai $r = -1$ atau $+1$ menunjukkan hubungan yang kuat antar variabel-variabel tersebut, jika nilai $r = 0$, mengindikasikan tidak ada hubungan antar variabel-variabel tersebut. Sedangkan tanda $+$ (positif) dan $-$ (negatif) memberikan informasi mengenai arah dari hubungan antar variabel-variabel tersebut.

b. Uji Koefisien Determinasi (D)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar persentase sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat yang dapat dinyatakan dalam persentase. Namun tidak dapat dipungkiri ada kalanya dalam penggunaan koefisien determinasi (D) terjadi bias terhadap satu variabel bebas yang dimasukkan dalam model. Sebagai ukuran kesesuaian garis regresi dengan sebaran data, menghadapi masalah karena tidak memperhitungkan derajat bebas. Sebagai alternatif digunakan *corrected* atau *adjusted R²* (Kuncoro, 2013).

2. Pengujian (Test Diagnostic)

a. Uji Parsial (uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat (Gujarati, 2013).

Uji t dilakukan untuk melihat signifikan dari pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRBt), Pengeluaran Pemerintah (PPt) dan Dana Desa (DDt) secara individual terhadap Indeks Desa Membangun (IDMt). Dalam hal ini pengujian dilakukan adalah sebagai berikut:

3. Perumusan Hipotesis

1. Hipotesis $H_0 : \beta_1 - \beta_3 = 0$ (tidak ada hubungan yang signifikan antara masing-masing variabel Produk Domestik Regional Bruto, Pengeluaran Pemerintah dan Dana Desa terhadap Indeks Desa Membangun di Indonesia tahun 2016-2022).
2. Hipotesis $H_a \neq \beta_1 - \beta_3 \neq 0$ (ada hubungan yang signifikan antara masing-masing masing-masing variabel Produk Domestik Regional Bruto, Pengeluaran Pemerintah dan Dana Desa terhadap Indeks Desa Membangun di Indonesia tahun 2016-2022).
4. Uji stastitik yang digunakan adalah uji t. dimana t hitung adalah:

$$t_h = \frac{\beta_i}{Se \beta_i}$$

Dimana:

β_1 = Produk Domestik Regional Bruto

β_2 = Pengeluaran Pemerintah

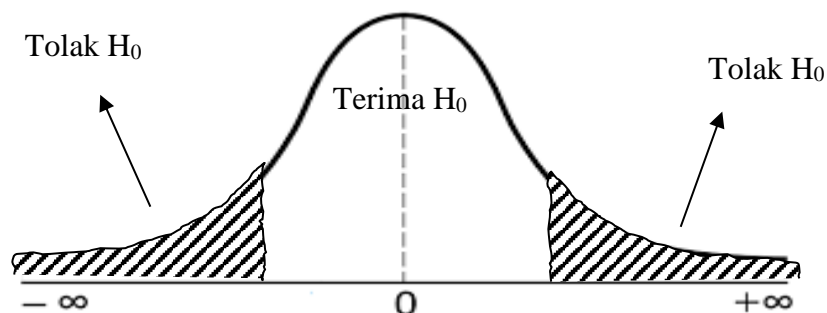
β_3 = Dana Desa

Se β_i = Standar error

Nilai thitung akan dibandingkan dengan $t_{tabel} = \pm t (\alpha/2, n - 1)$ dengan derajat kesalahan α pada tingkat 1%, 5%, 10%, dan 15%.

Kriteria Uji

Terima H_0 jika $-t_{tabel} < t_{hitung} < +t_{tabel}$, hal lain tolak H_0 atau dalam distribusi kurva normal t dapat digambarkan sebagai berikut:



3. Kesimpulan

Sesuai kriteria uji maka terima H_0 atau tolak H_0

b. Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui pada model PDRBt, PPt dan DDt secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap total kredit di Indonesia tahun 2016-2023).

Dengan langkah Langkah sebagai berikut:

1. Perumusan Hipotesis

Hipotesis $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$ (tidak ada hubungan yang signifikan antara masing-masing variabel Produk Domestik Regional Bruto, Pengeluaran Pemerintah dan Dana Desa terhadap Indeks Desa Membangun di Indonesia tahun 2016-2023).

Hipotesis $H_a : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 \neq 0$ (ada hubungan yang signifikan secara serentak antara variabel Produk Domestik Regional Bruto, Pengeluaran

Pemerintah dan Dana Desa terhadap Indeks Desa Membangun di Indonesia tahun 2016-2022).

2. Uji statistik yang digunakan adalah uji F, dimana F hitung adalah:

$$F = \frac{R^2/K - 1}{(1 - R^2)/(n - k)}$$

Dimana:

k = jumlah parameter yang diesmati

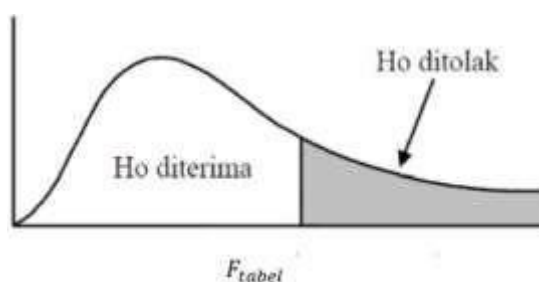
n = Jumlah data yang di observasi

Nilai Fhitung akan dibandingkan dengan Ftabel = F (α , n - k - 1) dengan derajat kesalahan $\alpha = 10\%$

3. Kriteria Uji

Terima jika H_0 jika Fhitung < Ftabel, hal lain tolak H_0 . Atau dalam distribusi kurva F dapat digambarkan sebagai berikut :

c. Uji Asumsi Klasik



Metode OLS mendapatkan nilai estimator yang diharapkan dapat memenuhi sifat estimator OLS yang BLUE (*Blue Linear Unbiased Estimator*) dengan cara meminimumkan kuadrat simpangan setiap observasi dalam sampel. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga asumsi dalam metode estimasi OLS yang harus dipenuhi dalam pengujian berdasarkan criteria ekonometrika, yaitu:

1. Tidak ada masalah hubungan antara variabel independen dalam regresi berganda yang digunakan (tidak multikolinearitas)
2. Varian variabel yang konstan (tidak heterokedastisitas)
3. Tidak ada hubungan variabel gangguan antara satu observasi dengan observasi berikutnya (tidak ada autokorelasi).

a. Multikolinieritas

Multikolinieritas berhubungan dengan situasi dimana ada linear baik yang pasti atau mendekati pasti antara variabel independen. Masalah multikolinieritas timbul bila variabel-variabel independen berhubungan satu sama lain. Selain mengurangi kemampuan untuk menjelaskan dan memprediksi, multikolinieritas juga menyebabkan kesalahan baku koefisien (uji t) menjadi indikator yang tidak terpercaya (Gujarati, 2016).

Uji multikolinearitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas saling berhubungan secara linear dalam model persamaan regresi. Apabila terjadi multikolinearitas, akibatnya variabel penafsiran menjadi cenderung terlalu besar, t-hitung tidak bias, namun tidak efisien.

Dalam penelitian ini uji multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan auxiliary regression untuk mendekteksi adanya multikolinearitas. Kriterianya adalah jika R^2 regresi persamaan utama lebih dari R^2 regresi auxiliary maka didalam model ini tidak terjadi multikolinearitas.

b. Heterokedastisitas

Heterokedastisitas adalah keadaan dimana varians dari setiap gangguan tidak konstan. Dampak adanya hal tersebut adalah tidak efisiennya proses estimasi, sementara hasil estimasinya sendiri tetap konsisten dan tidak bias serta akan mengakibatkan hasil uji t dan uji f dapat menjadi tidak “reliable” atau tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Untuk mengetahui ada atau tidaknya heterokedastisitas dapat digunakan Uji White. Secara manual uji ini dilakukan dengan melakukan regresi kuadrat dengan variabel bebas kuadrat dan perkalian variabel bebas. Nilai R² yang didapat digunakan untuk menghitung χ^2 , dimana $\chi^2 = n \cdot R^2$ (Gujarati, 2003). Dimana pengujiannya adalah jika nilai probability Observation R- Squared lebih besar dari taraf nyata 5%, Maka hipotesis alternatif adanya heteroskedastisitas dalam model ditolak.

c. Autokorelasi

Autokorelasi adalah keadaan dimana variabel gangguan pada periode tertentu berkorelasi dengan variabel pada periode lainnya, dengankata lain variabel gangguan tidak random. Faktor-faktor yang menyebabkan autokorelasi antara lain kesalahan dalam menentukan model, menggunakan lag pada model, memasukkan variabel yang penting. Akibat dari adanya autokorelasi adalah parameter bias dan variannya minimum, sehingga tidak efisien (Gujarati, 2003). Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi salah satunya diketahui dengan melakukan Uji Durbin Watson Test. Dimana apabila di dan du adalah batas bawah dan batas atas, statistik

menjelaskan apabila nilai Durbin Watson berada pada $2 < DW < 4$ -du maka autokorelasi atau no-autocorrelation (Gujarati, 2016).

3.7.3 Analisa Faktor Indikator Apa Saja Yang Mempengaruhi Dana Desa Di Kabupaten Simalungun Pada Desa Pematang Sidamanik Dan Sarimattin

Analisis faktor merupakan metode analisis multivariat yang didasarkan pada korelasi antar variabel. Analisis faktor termasuk salah satu teknik statistik yang dapat digunakan untuk memberikan deskriptif yang relatif sederhana melalui reduksi jumlah variabel yang disebut faktor. Analisis faktor merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mereduksi dan meringkas data. Analisis faktor dalam analisis multivariate tergolong analisis interdependensi (independence technique) dimana seluruh set hubungan yang interpendensi diteliti. Variabel yang berada dalam satu kelompok akan memiliki korelasi yang tinggi sedangkan variabel yang berbeda kelompok akan memiliki korelasi yang rendah.

Analisis faktor dipergunakan dalam kondisi sebagai berikut:

1. Mengenali atau mengidentifikasi dimensi yang mendasari (underlying dimensions) atau faktor, yang menjelaskan korelasi antara suatu set variabel.
2. Mengenali atau mengidentifikasi suatu set variabel baru yang tidak berkorelasi (independent) yang lebih sedikit jumlahnya.
3. Menggantikan suatu set variabel asli yang saling berkorelasi di dalam analisis multivariat selanjutnya.
4. Mengenali atau mengidentifikasi suatu set variabel yang penting dari suatu set variabel yang lebih banyak jumlahnya untuk dipergunakan dalam analisis multivariat selanjutnya

Jika vektor acak (random vector) $X = X_1, X_2, X_3, \dots, X_p$ mempunyai vektor rata-rata μ dan matriks ragam peragam Σ , secara linear bergantung pada sejumlah faktor yang tidak teramati $F_1, F_2, F_3, \dots, F_m$ yang disebut faktor umum (common factor) dan $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \dots, \varepsilon_p$ yang disebut faktor khusus (specific factors).

Maka model dari analisis faktor adalah :

$$X_{IKS} - \mu_1 = \lambda_{i1} F_1 + \lambda_{i2} F_2 + \dots + \lambda_{im} F_m + \varepsilon_i$$

$$X_{IKE} - \mu_2 = \lambda_{i2} F_1 + \lambda_{i2} F_2 + \dots + \lambda_{im} F_m + \varepsilon_i$$

$$X_{IKL} - \mu_3 = \lambda_{i3} F_1 + \lambda_{i3} F_3 + \dots + \lambda_{im} F_m + \varepsilon_i$$

Dan jika dituliskan kedalam notasi matriks, maka bentuknya sebagai berikut :

$$X(p \times 1) - \mu = \lambda(p \times m) F(m \times 1) + \varepsilon_p$$

Keterangan:

X : vektor variabel asal

μ : vektor rata-rata variabel asal

λ : matriks loading factor

F : vektor faktor bersama

ε : vektor faktor spesifik

Adapun model analisis faktor dalam penelitian ini sebagai berikut : Dana Desa (DD) = λ_{i1} Pengetahuan Dana Desa j + λ_{i2} Penerapan Dana Desa j + λ_{i3} Capaian Indeks Desa Membangun :

Indeks Pembangunan Desa (IDM) : Vektor variabel asal yang memiliki p komponen pada pengamatan yang ke- i .

1. Faktor Pengetahuan Dana Desa : Faktor bersama (common factor) yang ke- j .

2. Faktor Penerapan Dana Desa : Faktor bersama (common factor) yang ke- j .
3. Indeks Capaian Indeks Desa Membangun : Faktor bersama (common factor) yang ke- j .

l_{ij} : Bobot faktor (factor loading) dari perubahan ke- i dan faktor ke- j .

ϵ_i : Sisaan atau error dari perubahan ke- i (specific factor).

A. Uji Reabilitas dan Validitas

1. Uji Reabilitas

Menurut Sugiyono (2017: 125) menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Uji validitas ini dilakukan untuk mengukur apakah data yang telah didapat setelah penelitian merupakan data yang valid atau tidak, dengan menggunakan alat ukur yang digunakan (kuesioner). Suatu kuisisioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuisisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan di ukur oleh kuisisioner tersebut. Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk degree of freedom (df) = $n-2$ dimana n adalah jumlah sampel. Apabila r dihitung lebihh besar dari r tabel maka data dikatakan valid.

2. Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2017: 130) menyatakan bahwa uji reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Uji reliabilitas ini dilakukan pada responden dengan menggunakan pertanyaan yang telah dinyatakan valid dalam uji validitas dan akan ditentukan reliabilitasnya.

B. Analisa Outer Model

Analisa outer model dilakukan untuk memastikan bahwa measurement yang digunakan layak untuk dijadikan pengukuran (valid dan reliabel). Dalam analisa model ini menspesifikasi hubungan antar variabel laten dengan indikator - indikatornya. Analisa outer model dapat dilihat dari beberapa indikator :

a. Convergent Validity

Adalah indikator yang dinilai berdasarkan korelasi antara item score/component score dengan construct score, yang dapat dilihat dari standardized loading factor yang mana menggambarkan besarnya korelasi antar setiap item pengukuran (indikator) dengan konstraknya. Ukuran refleksif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi > 0.6 dengan konstruk yang ingin diukur, sedangkan menurut Chin yang dikutip oleh Imam Ghozali, nilai outer loading antara 0,5 –0,6 sudah dianggap cukup.

b. Discriminant Validity

Merupakan model pengukuran dengan refleksif indikator dinilai berdasarkan crossloading pengukuran dengan konstruk. Jika korelasi konstruk dengan item pengukuran lebih besar daripada ukuran konstruk lainnya, maka menunjukkan ukuran blok mereka lebih baik dibandingkan dengan blok lainnya. Sedangkan menurut metode lain untuk menilai discriminant validity yaitu dengan membandingkan nilai squareroot of average variance extracted (AVE).

c. Uji Multikolienaritas

Uji multikolinieritas juga digunakan pada penelitian menguji korelasi kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah model. Uji multikolinieritas dilakukan dengan cara melihat dari nilai VIF . apabila nilai VIF berada dibawah < 5 , maka model bebas dari gejala multikolinieritas.

C. Uji Model Struktural atau Inner Model

Inner model merupakan model structural yang digunakan untuk memprediksi hubungan kausalitas (hubungan sebab-akibat) antar variabel laten atau variabel yang tidak dapat diukur secara langsung.

1. R-Square

R-square merupakan suatu nilai yang memperlihatkan seberapa besar variabel independen (eksogen) mempengaruhi variabel dependen (endogen). R-square merupakan angka yang berkisar antara 0 sampai 1 yang mengindikasikan besarnya kombinasi variabel independen secara bersama – sama mempengaruhi nilai variabel dependen. Nilai R-square (R^2) digunakan untuk menilai seberapa besar pengaruh variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen. Terdapat tiga kategori pengelompokan pada nilai R square yaitu kategori kuat, kategori moderat, dan kategori lemah. Nilai R square 0,75 termasuk ke dalam kategori kuat, nilai R square 0,50 termasuk kategori moderat dan nilai R square 0,25 termasuk kategori lemah (Ghozali, 2016).

2. F-Square

Uji F-square ini dilakukan untuk mengetahui kebaikan model. Nilai f-square sebesar 0,02, 0,15, dan 0,35 dapat diinterpretasikan apakah predictor variabel laten mempunyai pengaruh yang lemah, medium, atau besar pada tingkat struktural.

3. Estimate For Path Coefficients

Uji selanjutnya adalah melihat signifikansi pengaruh antar variabel dengan melihat nilai koefisien parameter dan nilai signifikansi T statistik yaitu melalui metode bootstrapping.

D. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan pendekatan Structural Equation Model (SEM) dengan menggunakan software SmartPLS. PLS adalah model persamaan Struktural (SEM) yang berbasis komponen atau varian (variance). Menurut Ghazali dan Hengky (2015) PLS merupakan pendekatan alternatif yang bergeser dari pendekatan SEM berbasis kovarian menjadi berbasis varian. SEM yang berbasis kovarian umumnya menguji kausalitas/ teori sedangkan PLS lebih bersifat predictive model.

Pengujian hipotesis dapat dilihat dari nilai t-statistik dan nilai probabilitas. Sehingga kriteria penerimaan atau penolakan hipotesa adalah H_a diterima dan H_0 di tolak ketika t-statistik $> t$ -table. Untuk menolak atau menerima hipotesis juga dapat dilakukan dengan melihat nilai P-Values. H_a di terima jika nilai P- Values < 0 .

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Simalungun

4.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Simalungun

Berdasarkan Badan Pusat Statistik tahun 2024 Kabupaten Simalungun terletak di Provinsi Sumatera Utara yang secara geografis berada pada titik koordinat Kabupaten Simalungun letaknya diapit oleh 8 kabupaten yaitu Kabupaten Serdang Bedagai, Deli Serdang, Karo, Tobasa, Samosir, Asahan, Batu Bara dan Kota Pematangsiantar. Letak astronomisnya antara $02^{\circ}36'$ - $03^{\circ}18'$ Lintang Utara dan $98^{\circ}32'$ - $99^{\circ}35'$ Bujur Timur dengan luas 4 372,5 km² berada pada ketinggian 0 – 1 400 meter di atas permukaan laut dimana 75 persen lahannya berada pada kemiringan 0-15% sehingga Kabupaten Simalungun merupakan Kabupaten terluas ke-3 setelah Kabupaten Madina dan Kabupaten Langkat di Sumatera Utara dan memiliki letak yang cukup strategis serta berada di kawasan wisata Danau Toba-Parapat, iklim di daerah ini mempunyai rata-rata suhu udara $26,9^{\circ}\text{C}$ dan terendah $25,8^{\circ}\text{C}$ dengan kelembaban 82,3%. Kabupaten Simalungun secara wilayah administrasi terdiri dari 31 kecamatan. ketigapuluh satu kecamatan ini terbagi dalam 386 desa/nagori dan 27 kelurahan.

4.1.2 Kondisi Demografi Kabupaten Simalungun

a. Jumlah penduduk

Data kependudukan Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menunjukkan Jumlah penduduk Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara bersumber dari hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023

(Pertengahan Tahun/Juni) sebanyak 1.003.727 jiwa yang terdiri atas 504.242 jiwa penduduk laki-laki dan 499.485 jiwa penduduk perempuan dengan kepadatan penduduk sebesar 226 orang per km persegi.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Simalungun Menurut Jenis Kelamin 2023

Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan (Jiwa)		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Silimahuta	9.283	9 307	18 590
Pematang Silimahuta	7.156	7 122	14 278
Purba	14.803	14 331	29 134
Haranggaol Horison	3.861	3 833	7 694
Dolol Pardamean	7.985	7 747	15 732
Sidamanik	15.780	15 922	31 702
Pamatang Sidamanik	10.390	10 224	20 614
Girsang Sipangan Bolon	9.424	9 519	18 943
Tanah Jawa	28.690	28 267	56 957
Hantonduan	14.026	14 141	28 167
Dolok panribuan	11.680	11 429	23 109
Jorlang Hataran	10.051	10 164	20 215
Panei	15.052	15 330	30 382
Panombeian Panei	13.419	13 270	26 689
Raya	15.738	15 853	31 591
Dolok Masagal	7.355	7 339	14 694
Dolok Silou	9.422	9 424	18 846
Silou Kahean	10.054	9 986	20 040
Kahean Raya	11.411	11 314	22 725
Tapian Dolok	23.996	22 782	46 778
Dolok Batu Nanggar	23.872	23 275	47 147
Siantar	38.099	38 002	76 101
Gunung Malela	21.991	21 580	43 571
Gunung Maligas	18.473	17 443	35 916
Hutabayu Raja	18.393	18 692	37 085
Jawa Maraja Bah Jambi	11.743	11 821	23 564
Pamatang Bandar	20.499	20 185	40 684
Bandar Huluan	15.261	15 074	30 335
Bandar	42.096	41 130	83 226
Bandar Masilam	15.827	15 731	31 558
Bosar Maligas	22.371	21 858	44 229
Ujung Padang	23.061	22 563	45 624

Sumber : BPS Kabupaten Simalungun www.bps.go.id

Dari 32 Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Simalungun, Kecamatan Bandar merupakan kecamatan yang mempunyai jumlah penduduk terbesar di Kabupaten Simalungun dengan jumlah penduduk sebesar 83.226 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebesar 42.096 jiwa dan penduduk perempuan sebesar 41.130 jiwa. Selanjutnya kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil di Kabupaten Simalungun yaitu Kecamatan Haranggaol Horison dengan jumlah penduduk yang hanya sebesar 7.694 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebesar 3.861 jiwa dan Perempuan 3.833 jiwa.

b. Angkatan kerja

Berikut ini merupakan data jumlah penduduk 15 tahun keatas menurut jenis kegiatan dan jenis kelamin di Kabupaten Simalungun tahun 2023:

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Simalungun Tahun 2023

Kegiatan Utama	Jenis kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Angkatan kerja	345.029	221.592	566.621
1. Bekerja	323.505	212.786	536.291
2. Pengangguran	21.524	8.806	30.330
Bukan Angkatan Kerja	38.342	170,385	218,727
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	87,71	56,53	72,15
Tingkat Pengangguran	6,24	3,97	5,35

Sumber : BPS Kabupaten Simalungun www.bps.go.id

Data pada tabel 4.2 menunjukkan penduduk 15 tahun keatas di Kabupaten Simalungun tahun 2023 didominasi dengan angkatan kerja dengan total 566.621 individu dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 345.029 dan perempuan sebanyak 221.592. Dari total Angkatan kerja tersebut mayoritas dari mereka sedang aktif bekerja yaitu 536.291 orang, dengan jumlah laki-laki (323.505 orang)

lebih tinggi dibanding perempuan (212.786 orang). Sementara itu, pengangguran sebanyak 30.330 orang dengan proporsi laki-laki yang menganggur (21.524 orang) lebih besar daripada perempuan (8.806 orang). Sementara itu, terdapat 218.727 individu yang bukan angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja secara keseluruhan mencapai 72,15%, dengan laki-laki memiliki tingkat partisipasi yang lebih tinggi (87,71%) dibandingkan perempuan (56,53%). Tingkat pengangguran di populasi ini mencapai 5,35%, menunjukkan bahwa sebagian kecil dari angkatan kerja berada dalam kondisi mencari pekerjaan aktif.

4.1.3 Kondisi Perkembangan Ekonomi

Kabupaten Simalungun memiliki potensi yang sangat besar sebagai bagian dari wilayah Kaldera Toba dan juga sebagai destinasi wisata perkebunan teh. Produksi teh di daerah ini memiliki kualitas yang baik dan dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan. Potensi ekonomi Kabupaten Simalungun sebagian besar terletak pada produksi pertaniannya.

a. Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha

Kabupaten Simalungun dalam memajukan ekonomi Sumatera Utara perkembangan ekonominya dapat dilihat dari laju pertumbuhan PDRB. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Perekonomian Simalungun berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2023 atas dasar harga berlaku mencapai Rp 52.239,10 miliar dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 31.510,63 miliar. Ekonomi Simalungun Tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 5,07 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2022 yang tumbuh sebesar 4,68. Kabupaten Simalungun secara spasial pada tahun 2023 memberikan kontribusi PDRB di Provinsi Sumatera Utara sebesar 4,97%.

Tabel 4.3 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Di Kabupaten Simalungun Tahun 2023

Lapangan Usaha (PDRB)	Tahun 2023 (Milyar Rupiah)	
	Atas Dasar Harga Berlaku	Atas Dasar Harga Konstan
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	28.406,02	18 509,80
Pertambangan dan Penggalian	106,54	69,70
Industri Pengolahan	5 480,13	2 934,58
Pengadaan Listrik dan Gas	31,13	25,95
Pengadaan Air, Pengolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	38,19	24,35
Konstruksi	4 775,95	2 578,72
Pedagang Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8 221,26	4 270,10
Transportasi dan Pergudangan	899,57	516,27
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	402,84	262,20
Informasi dan Komunikasi	278,12	235,68
Jasa Keuangan dan Asuransi	533,29	285,84
Real Estate	408,81	256,56
Jasa Perusahaan	45,59	24,82
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jalinan Sosial Wajib.	1 883,00	1 056,57
Jasa Pendidikan	480,38	314,11
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	191,59	113,34
Jasa Lainnya	56,39	32,04
PDRB	52 239,10	31 510,63
PDRB Tanpa Migas	52 239,10	31 510,63

Sumber : BPS Kabupaten Simalungun www.bps.go.id

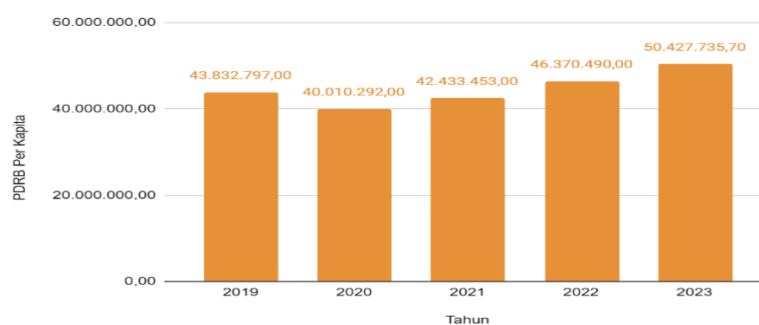
Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat Lapangan Usaha yang menjadi penyumbang terbesar Produk Domestik Reginal Bruto (PDRB) di Kabupaten Simalungun pada tahun 2023 berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku itu di sektor Pertanian, Kehutanan Dan perikanan (54,38%) . Hal tersebut dikarenakan Kabupaten Simalungun memiliki potensi sumber daya alam yang baik sehingga sektor pertanian di Kabupaten Simalungun menjadi sektor utama penopang perekonomian wilayah. Selanjutnya penyumbang terbesar kedua yaitu berasal dari

sektor Pedagang Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (15,74%) dan penyumbang terbesar ketika yaitu Industri Pengolahan (10,49%).

b. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) per kapita adalah ukuran ekonomi yang mengukur nilai produksi barang dan jasa bersih yang dihasilkan oleh suatu daerah dalam satu tahun, dibagi dengan jumlah penduduk daerah tersebut. Ini memberikan gambaran tentang pendapatan rata-rata per individu dalam daerah tersebut.

Secara spesifik PDRB per kapita mencerminkan tingkat kemakmuran relatif penduduk daerah ini. Perubahan dalam PDRB per kapita dapat menunjukkan tren pertumbuhan ekonomi dan perubahan tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut dari tahun ke tahun.



Sumber : Olahan Penulis (Badan Pusat Statistik www.bps.go.id)

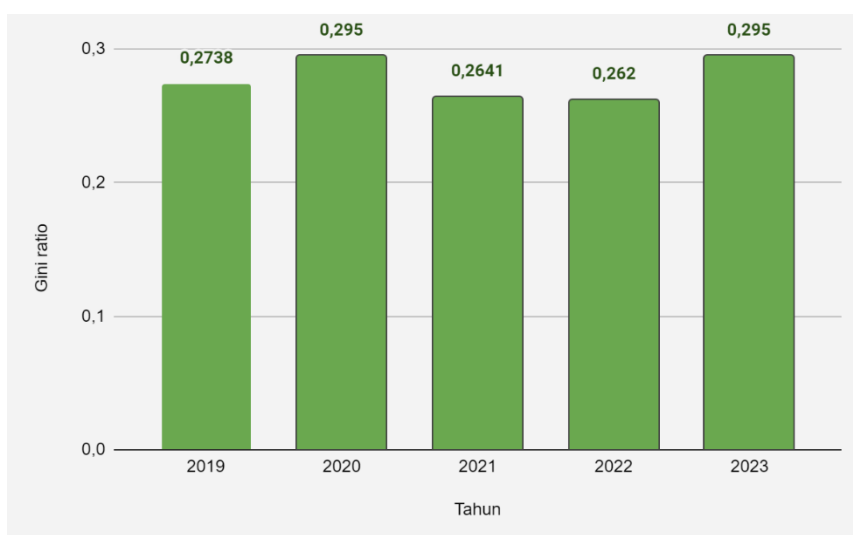
Gambar 4.1 PDRB ADHK Per Kapita Kabupaten Simalungun 5 Tahun Terakhir

Gambar diatas menunjukkan perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Simalungun yang mana pada tahun 2019, anggaran tersebut mencapai 43.832.797,00 rupiah. Pada tahun 2020, jumlah anggaran mengalami penurunan menjadi 40.010.292,00 rupiah, namun mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi 42.433.453,00 rupiah. Pada tahun 2022, anggaran meningkat lagi menjadi

46.370.490,00 rupiah, dan mencapai puncaknya pada tahun 2023 dengan jumlah 50.427.735,70 rupiah. Kenaikan ini menunjukkan tren positif dalam pendapatan atau alokasi anggaran Kabupaten Simalungun selama periode lima tahun tersebut.

C. Gini Ratio

Gini Ratio digunakan untuk melihat adanya hubungan antara jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh keluarga atau individu dengan total pendapatan. Ukuran Gini Ratio sebagai ukuran pemerataan pendapatan mempunyai selang nilai antara 0 sampai dengan 1. Bila Gini Ratio mendekati nol menunjukkan adanya ketimpangan yang rendah dan bila Gini Ratio mendekati satu menunjukkan ketimpangan yang tinggi (Todaro,2000).



Sumber : Olahan Penulis (Badan Pusat Statistik www.bps.go.id)

Gambar 4.2 Gini Ratio Kabupaten Simalungun

Gini Ratio Kabupaten Simalungun mengalami fluktuasi selama periode 2019 sampai 2023. Tahun 2022 menjadi tahun yang memiliki distribusi yang lebih merata dibandingkan tahun lainnya dengan nilai Gini Ratio 0,2620. Sementara itu pada tahun 2019, Gini ratio mencapai 0,2738, mengalami peningkatan menjadi 0,2950 pada tahun 2020, yang kemudian mengalami penurunan menjadi 0,2641

pada tahun 2021. Pada tahun 2022, Gini ratio mencatat nilai 0,2620 menunjukkan sedikit penurunan, namun kembali naik menjadi 0,295 pada tahun 2023. Hal tersebut menunjukkan pada tahun 2020 dan 2023 menjadi tahun yang memiliki ketimpangan yang lebih besar antara pendapatan yang tinggi dan rendah di masyarakat Simalungun.

4.1.4 Kondisi Perkembangan Sosial

a. Kemiskinan

Berikut ini angka kemiskinan di Kabupaten Simalungun Sebagai Berikut:

Tabel 4.4 Angka Kemiskinan Kabupaten Simalungun

Kemiskinan	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk Miskin (000)	76,33	73,64	76,99	72,47	69,21
Persentase	8,81	8,46	8,81	8,26	7,87
Garis Kemiskinan	359.540	387.549	416.714	441 744	467 926
Indeks kedalaman Kemiskinan	0,99	1,47	1,12	1,69	0,99
Indeks keparahan kemiskinan	0,18	0,35	0,23	0,52	0,21

Sumber : BPS Kabupaten Simalungun www.bps.go.id

Dilihat dari tabel diatas perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Simalungun mengalami penurunan pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2019 dengan jumlah penduduk miskin yaitu sebanyak 69,21 (ribu jiwa) dari total 1.239,71 (jiwa) jumlah penduduk miskin Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Simalungun masih berada pada angka 76,33 (ribu jiwa).

Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan juga menunjukkan variasi, mulai dari 8,81% pada tahun 2019 hingga 7,87% pada tahun 2023. Garis kemiskinan, yang menetapkan batas moneter untuk kemiskinan,

mengalami peningkatan dari Rp359.540,00 pada tahun 2019 menjadi Rp467.926,00 pada tahun 2023. Indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan menunjukkan fluktuasi yang signifikan selama periode lima tahun tersebut, dengan nilai tertinggi pada tahun 2022 dan penurunan yang nyata pada tahun 2023.



Sumber: Kementerian Dalam Negeri, (www.databoks.com)

Gambar 4.3 Presentase Penduduk Kabupaten Simalungun Menurut Jenjang Pendidikan

Berdasarkan data presentase penduduk Kabupaten Simalungun menurut jenjang Pendidikan dapat dilihat Proporsi penduduk yang berpendidikan D1 dan D2 sejumlah 0,47% sedangkan D3 1,31%. Kemudian, penduduk berpendidikan S1 mencapai 2,58%, S2 0,07%, dan S3 0,007%. Selanjutnya, proporsi penduduk dengan tamatan SMA sebesar 27,18%. Lulusan SMP dan SD masing-masing 16,41% dan 16,46%. Sementara itu, ada 11,22% penduduk Kabupaten Simalungun yang belum tamat SD dan penduduk yang tidak/belum sekolah sejumlah 24,29%.

4.2 Melakukan Analisis Secara Deskriptif Tentang Perkembangan Dana Desa Di Masa Era Kepemimpinan Jokowi Widodo Selama Dua Periode

Dana Desa mulai diperkenalkan di Indonesia sebagai kebijakan pada tahun 2014. Dimana Dana Desa merupakan program yang baru pertama kali dilaksanakan dalam setahun pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Guna memuluskan program pro rakyat ini, dilakukan penyederhanaan peraturan yang menghambat penyaluran dan penggunaan Dana Desa.

Program ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat desa melalui peningkatan infrastruktur dan pembangunan di tingkat desa. Dana Desa didistribusikan secara langsung kepada pemerintah desa untuk membiayai proyek-proyek yang dipilih oleh masyarakat setempat sesuai dengan kebutuhan mereka. Sejak diperkenalkan, Dana Desa telah menjadi program yang signifikan dalam upaya pemerintah untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara perkotaan dan pedesaan di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Sumber pendapatan Desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa. Dana tersebut digunakan untuk

mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Dengan demikian, pendapatan Desa yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk mendanai kewenangan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa. Hal itu berarti Dana Desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan Desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Dana Desa tersebut. Namun, mengingat Dana Desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa untuk mendukung program pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa.

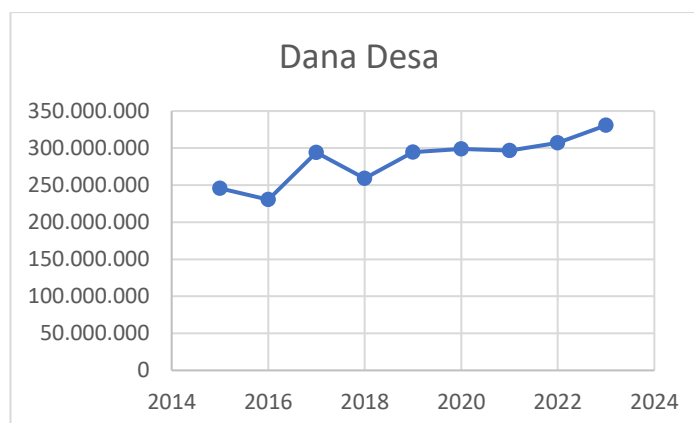
Alokasi anggaran untuk Dana Desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari total Dana Transfer ke Daerah dan akan dipenuhi secara bertahap sesuai dengan kemampuan APBN. Dalam masa transisi sebelum Dana Desa mencapai 10% (sepuluh per seratus), anggaran Dana Desa dipenuhi melalui realokasi dari Belanja Pusat dari program yang berbasis Desa. Kementerian/lembaga mengajukan anggaran untuk program yang berbasis Desa kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai sumber Dana Desa. Dalam hal Dana Desa telah dipenuhi sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari total Dana Transfer ke Daerah, penganggaran sepenuhnya mengikuti mekanisme penganggaran dana Bendahara Umum Negara yang sudah diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sumber Dana Desa yang diusulkan oleh kementerian/lembaga dan yang

ditetapkan oleh Menteri akan ditempatkan sebagai Belanja Pusat nonkementerian/lembaga sebagai cadangan Dana Desa. Cadangan Dana Desa tersebut diusulkan oleh Pemerintah dalam rangka pembahasan Rancangan APBN dan Rancangan Undang-Undang APBN. Cadangan Dana Desa yang telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat akan ditetapkan sebagai Dana Desa yang merupakan bagian dari Anggaran Transfer ke Daerah dan Desa. Mekanisme tersebut ditempuh agar pemenuhan Dana Desa tetap terlihat adanya pengalihan Belanja Pusat ke Dana Desa berupa Dana Transfer ke Daerah. Selain itu, mekanisme tersebut juga memberikan komitmen kuat kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk lebih memberdayakan Desa.

Besaran Dana Desa yang telah ditetapkan dalam APBN dialokasikan ke Desa dalam 2 (dua) tahap. Pada tahap pertama, Menteri mengalokasikan Dana Desa kepada kabupaten/kota sesuai dengan jumlah Desa berdasarkan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dalam bobot tertentu. Hasil perhitungan tersebut selanjutnya dikalikan dengan indeks kemahalan konstruksi sebagai indikator yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis. Pada tahap kedua, berdasarkan besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota, bupati/walikota mengalokasikan Dana Desa kepada setiap Desa. Bupati/walikota diberikan kewenangan untuk menentukan bobot variabel tingkat kesulitan geografis Desa sebagai salah satu variabel perhitungan sesuai dengan karakteristik daerahnya. Tingkat kesulitan geografis antara lain ditunjukkan oleh faktor ketersediaan pelayanan dasar serta kondisi infrastruktur dan transportasi.

Sesuai dengan tujuan pembangunan Desa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang bertujuan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, pengalokasian Dana Desa lebih banyak mempertimbangkan tingkat kemiskinan. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan Dana Desa yang tertib, transparan, akuntabel, dan berkualitas, Pemerintah dan kabupaten/kota diberi kewenangan untuk dapat memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Desa dalam hal laporan penggunaan Dana Desa tidak/terlambat disampaikan. Di samping itu, Pemerintah dan kabupaten/kota juga dapat memberikan sanksi berupa pengurangan Dana Desa apabila penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa, pedoman umum, pedoman teknis kegiatan, atau terjadi penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.



Sumber: Progress Report Pengendalian Pembangunan Provinsi Sumatera Utara, diolah 2024 (www.prp2sumut.com)

Gambar 4.4 Perkembangan Dana Desa Kabupaten Simalungun 2015-2023

Dapat dilihat dari grafik perkembangan dana desa di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara periode tahun 2015-2023 mengalami kenaikan serta penurunan dana desa. Berikut merupakan penjelasan kenaikan dan penurunan Dana Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi lokal, dan peningkatan kualitas hidup. Secara umum, perkembangan Dana Desa di Kabupaten

Simalungun, seperti di banyak daerah lainnya di Indonesia, mencatat peningkatan signifikan dalam penggunaan dan pelaksanaannya. Dana Desa tersebut digunakan untuk berbagai keperluan, antara lain:

1. Pembangunan Infrastruktur: Membangun jalan, jembatan, irigasi, dan sarana umum lainnya yang diperlukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas desa dengan daerah lain.
2. Pemberdayaan Ekonomi: Mendukung program-program ekonomi produktif seperti pertanian, peternakan, dan kerajinan lokal untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa.
3. Peningkatan Kualitas Hidup: Menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan sanitasi bagi masyarakat desa.

Perkembangan Dana Desa juga menunjukkan upaya pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana tersebut. Meskipun terdapat berbagai tantangan dan permasalahan dalam implementasinya, Dana Desa diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi perkembangan desa-desa di Kabupaten Simalungun maupun di seluruh Indonesia.

Dalam hal ini Kabupaten Simalungun mencatat capaian Indeks Desa Membangun dimana IDM dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-

nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Indeks Desa Membangun (IDM) lebih menyatakan fokus pada upaya penguatan otonomi Desa. IDM memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. IDM merupakan indeks yang memetakan status perkembangan desa yang memperhatikan karakteristiknya yang dibangun oleh Kemendesa PDTT. Indeks ini digunakan sebagai instrumen untuk melakukan targetting dalam pencapaian IKU Kementerian Desa, PDTT 2015-2023. IDM merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks dan dikembangkan lebih lanjut dalam 22 Variabel dan 52 indikator.

Adapun indeks komposit tersebut antara lain:

1. Indeks Ketahanan Sosial (IKS), terdiri dari dimensi Pendidikan, Kesehatan, Modal Sosial, Permukiman.
2. Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), terdiri dari dimensi Keragaman Produksi Masyarakat, Akses Pusat Perdagangan dan Pasar, Akses Logistik, Akses Perbankan dan Kredit, Keterbukaan Wilayah.
3. Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan (IKL), terdiri dari dimensi Kualitas Lingkungan, Bencana Alam, Tanggapan Bencana.

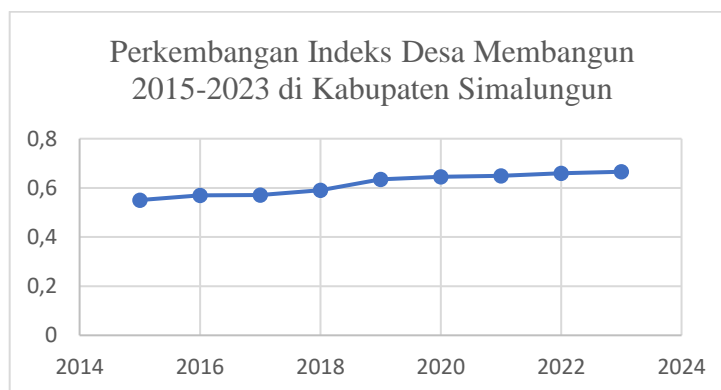
Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi,

dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Berdasarkan konteks tipologi desa, Indeks Desa Membangun mengklasifikasi Desa dalam lima (5) status, yakni:

1. Desa Sangat Tertinggal : $< 0,491$
2. Desa Tertinggal : $> 0,491$ dan $< 0,599$
3. Desa Berkembang : $> 0,599$ dan $< 0,707$
4. Desa Maju : $> 0,707$ dan $< 0,815$
5. Desa Mandiri : $> 0,815$

Klasifikasi terhadap status desa tersebut bertujuan untuk penetapan status perkembangan dan rekomendasi terhadap intervensi kebijakan yang perlu dilakukan.



Sumber : Olahan Penulis (Kementerian Desa <https://kemendes.go.id/>)

Gambar 4.5 Nilai Indeks Desa Membangun (IDM) Di Kabupaten Simalungun Tahun 2015 dan 2023

Dari hasil olahan data diatas dapat dilihat perkembangan Indeks Desa Membangun (IDM) kabupaten simalungun yang merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera utara yang dimana terdapat 32 Kecamatan yang terdiri dari 386 desa/nagori dan 27 kelurahan. Kecamatan di Kabupaten Simalungun memiliki nilai Indeks desa Membangun (IDM) yang cukup baik perkembangannya. Pada tahun 2015 nilai IDM yang diperoleh kabupaten simalungun yaitu 0, 5503 artinya statusnya adalah tertinggal seiring berjalannya waktu grafik perkembangan IDM di kabupaten Simalungun di tahun 2023 mencapai nilai 0,6655 yang dimana artinya memiliki status berkembang.

4.3 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

4.3.1 Analisa Model Ekonometrika Untuk Mengetahui Faktor-faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi IDM

Tabel 4.1 Hasil Olahan Regresi Model Ekonometrika

Dependent Variable: IDM
 Method: Least Squares
 Date: 07/17/24 Time: 19:31
 Sample: 2015 2023
 Included observations: 9

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.381098	0.072889	5.228500	0.0034
DD	7.67E-10	4.13E-10	1.856580	0.1225
PDRB_PK	3.33E-06	2.31E-06	1.441733	0.2089
PP	-5.35E-14	2.63E-14	-2.031824	0.0979
R-squared	0.894075	Mean dependent var		0.614911
Adjusted R-squared	0.830520	S.D. dependent var		0.044437
S.E. of regression	0.018294	Akaike info criterion		-4.863412
Sum squared resid	0.001673	Schwarz criterion		-4.775757
Log likelihood	25.88536	Hannan-Quinn criter.		-5.052572
F-statistic	14.06774	Durbin-Watson stat		2.600217
Prob(F-statistic)	0.007152			

Sumber: Eviews 12, olahan penulis 2024

Dari hasil regresi pertama diatas, ditemukan bahwa variabel bebas yaitu dana desa (DD) berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat indeks desa membangun (IDM) pada tingkat signifikansi 15% ($\alpha < 0,15$). Variabel produk domestik regional bruto perkapita (PDRB-PK) tidak berpengaruh signifikan karena diatas 15% ($\alpha > 0,15$). Variabel pengeluaran pemerintah (PP) berpengaruh signifikan pada tingkat 10% ($\alpha < 0,10$). Hasil regresi juga menghasilkan nilai R-squared yang sangat tinggi yaitu sebesar 0.894075, artinya kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sangat tinggi. Oleh karena itu, penelitian akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya,

Tabel 4.5 Ringkasan Hasil Pengolahan Data Model Estimasi

Variabel	OLS (Ordinary Least Square)
DD	7.67E-10*
	(1.856580)
PDRB-PK	3.33E-06
	(1.441733)
PP	-5.35E-14**
	-2.031824
Konstanta	0.381098*****
	(5.228500)
Number of Obs	9
Adj R-Squared	0.830520
R (Correlation)	89,40%
Uji F	14.06774*****
	0.007152
D-W (Durbin-Watson)	2.600217

Sumber: Eviews 12, olahan penulis 2024

Keterangan: *Level of significant, *****1%, ***5%, **10%, *15%, (t-statistic)

Sumber: Eviews 12 dan diolah

1) Penaksiran

Penaksiran adalah bagian penting dari analisis ekonometrika karena memungkinkan peneliti untuk memahami hubungan antar variabel dan membuat prediksi berdasarkan model yang telah ditaksir. Berikut merupakan hasil Statistika deskriptif.

Tabel 4.6 Ringkasan Hasil Pengolahan Data Model Estimasi

	IDM	DD	PDRB_PK	PP
Mean	0.614911	2.84E+08	41059.71	2.25E+12
Median	0.634200	2.94E+08	41038.39	2.27E+12
Maximum	0.665500	3.31E+08	50427.74	2.76E+12
Minimum	0.550300	2.30E+08	31960.56	1.88E+12
Std. Dev.	0.044437	32102167	5604.413	2.66E+11
Skewness	-0.256555	-0.425910	0.016850	0.384830
Kurtosis	1.394071	2.111994	2.368939	2.768388
Jarque-Bera	1.065858	0.567807	0.149765	0.242257
Probability	0.586883	0.752839	0.927853	0.885920
Sum	5.534200	2.56E+09	369537.4	2.03E+13
Sum Sq. Dev.	0.015797	8.24E+15	2.51E+08	5.67E+23
Observations	9	9	9	9

Sumber: Eviews 12, olahan penulis 2024

Data penaksiran di atas menampilkan ringkasan statistik deskriptif untuk empat variabel: Indeks Desa Membangun (IDM), Dana Desa (DD), Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (PDRB_PK), dan Pengeluaran Pemerintah (PP). Berikut adalah penjelasan untuk masing-masing bagian dari data ini:

1. Statistik Deskriptif Umum:

✓ *Mean* (Rata-rata):

1. IDM: Rata-rata indeks desa membangun adalah 0,6149.
2. DD: Rata-rata Dana Desa yang dialokasikan adalah 284 juta (2,84E+08).
3. PDRB_PK: Rata-rata PDRB per kapita adalah 41.059,71.
4. PP: Rata-rata pengeluaran pemerintah adalah 2,25 triliun (2,25E+12).

✓ *Median* (Nilai tengah):

1. IDM: Median IDM adalah 0,6342, yang berarti bahwa setengah dari desa memiliki IDM di bawah nilai ini dan setengahnya di atas.
2. DD: Median Dana Desa adalah 294 juta.
3. PDRB_PK: Median PDRB per kapita adalah 41.038,39.
4. PP: Median pengeluaran pemerintah adalah 2,27 triliun.

✓ *Maximum* (Maksimum):

1. IDM: Nilai maksimum IDM adalah 0,6655.
2. DD: Dana Desa tertinggi adalah 331 juta.
3. PDRB_PK: PDRB per kapita tertinggi adalah 50.427,74.
4. PP: Pengeluaran pemerintah tertinggi adalah 2,76 triliun.

✓ *Minimum* :

1. IDM: Nilai minimum IDM adalah 0,5503.
2. DD: Dana Desa terendah adalah 230 juta.
3. PDRB_PK: PDRB per kapita terendah adalah 31.960,56.
4. PP: Pengeluaran pemerintah terendah adalah 1,88 triliun.

2. Standar Deviasi:

1. IDM: Standar deviasi sebesar 0,0444, menunjukkan bahwa variasi antar desa dalam IDM relatif rendah.
2. DD: Standar deviasi sebesar 32,1 juta menunjukkan variasi Dana Desa antar desa.
3. PDRB_PK: Standar deviasi sebesar 5.604,41 menunjukkan tingkat variasi PDRB per kapita.
4. PP: Standar deviasi sebesar 266 miliar menunjukkan variasi pengeluaran pemerintah antar desa.

3. Statistik Distribusi:

Skewness (Kemiringan):

1. IDM: Kemiringan $-0,2566$ menunjukkan distribusi IDM sedikit condong ke kiri (distribusi negatif).
2. DD: Kemiringan $-0,4259$ menunjukkan distribusi Dana Desa sedikit condong ke kiri.
3. PDRB_PK: Kemiringan $0,0169$ menunjukkan distribusi PDRB per kapita hampir simetris.
4. PP: Kemiringan $0,3848$ menunjukkan distribusi pengeluaran pemerintah sedikit condong ke kanan (distribusi positif).

4. Kurtosis:

1. IDM: Nilai kurtosis $1,3941$ menunjukkan distribusi yang lebih flat (leptokurtik) dibandingkan distribusi normal.
2. DD: Nilai kurtosis $2,1120$ mendekati distribusi normal.
3. PDRB_PK: Nilai kurtosis $2,3689$ mendekati distribusi normal.
4. PP: Nilai kurtosis $2,7684$ mendekati distribusi normal.

5. Uji Normalitas (Jarque-Bera Test):

1. Jarque-Bera: Uji ini mengukur apakah data mengikuti distribusi normal.
2. IDM: Nilai $1,0659$ dengan probabilitas $0,5869$ menunjukkan bahwa tidak ada bukti kuat untuk menolak hipotesis bahwa data berdistribusi normal.
3. DD: Nilai $0,5678$ dengan probabilitas $0,7528$ juga menunjukkan data kemungkinan besar berdistribusi normal.
4. PDRB_PK: Nilai $0,1498$ dengan probabilitas $0,9279$ menunjukkan distribusi normal.

5. PP: Nilai 0,2423 dengan probabilitas 0,8859 menunjukkan distribusi normal.

6. Sum dan Sum Sq. Dev.:

1. Sum: Menunjukkan total agregat dari masing-masing variabel.
2. IDM: Total IDM untuk 9 observasi adalah 5,5342.
3. DD: Total Dana Desa adalah 2,56 miliar (2,56E+09).
4. PDRB_PK: Total PDRB per kapita adalah 369.537,4.
5. PP: Total pengeluaran pemerintah adalah 20,3 triliun (2,03E+13).

Sum Sq. Dev.: Menunjukkan jumlah kuadrat dari deviasi, yang menggambarkan seberapa jauh nilai-nilai observasi dari mean-nya.

7. Observations:

Terdapat 9 observasi untuk setiap variabel, yang mungkin merupakan sampel desa atau waktu pengamatan.

Kesimpulan:

Data ini memberikan gambaran statistik umum dari variabel-variabel yang diteliti. Secara umum, variabel-variabel ini menunjukkan distribusi yang mendekati normal dengan variabilitas yang terukur. Hasil ini dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut, seperti regresi, untuk melihat hubungan antara variabel-variabel ini.

a. Kolerasi (R)

Dari hasil regresi diperoleh nilai R sebesar 0.894075, artinya bahwa derajat keeratan antara variabel dana desa (DD), produk domestik bruto regional perkapita (PDRB-PK), pengeluaran pemerintah (PP) terhadap variabel indeks desa membangun (IDM) menggambarkan hubungan yang sangat erat.

b. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R-squared) menunjukkan besarnya kontribusi atau proporsi persentase variabel bebas yaitu variabel dana desa (DD), produk domestik bruto regional perkapita (PDRB-PK), pengeluaran pemerintah (PP) dalam menjelaskan variabel terikat indeks desa membangun (IDM). Berdasarkan hasil regresi didapatkan nilai R-squared sebesar 0.894075, artinya kontribusinya sebesar 89,40%. Sedangkan sisanya 10,60% dijelaskan oleh variabel lain diluar dari model estimasi ini atau berada pada disturbance error term.

2) Interpretasi Hasil

Dari hasil regresi diatas maka model ekonometrikanya yaitu:

$$IDM_t = \beta_0 + \beta_1 DD_t + \beta_2 PDRB-PK_t + \beta_3 PP_t + \varepsilon_t$$

Interpretasi hasil model sebagai berikut:

$$IDM_t = 0.381098 + 7.67E-10 DD_t + 3.33E-06 PDRB-PK_t + (-5.35E-14) PP + \varepsilon_t$$

Koefisien $\beta_0 = 0.381098$, artinya nilai tersebut menunjukkan bahwa jika dana desa (DD), produk domestik regional bruto perkapita (PDRB-PK) dan pengeluaran pemerintah (PP) naik maka diperkirakan tingkat indeks desa membangun sebesar 38,10%, dan jika dilihat dari hasil olahan diketahui nilai probabilitasnya sebesar 0.0034 ($\alpha < 0,01$) yang berarti signifikan. Artinya dapat disimpulkan bahwa benar jika prediksi tingkat indeks desa membangun akan bertambah sebesar 38,10% jika menambahkan variabel bebas diatas.

Koefisien $\beta_1 = 7.67E-10$, artinya jika dana desa (DD) naik diperkirakan indeks desa membangun (IDM) akan bertambah sebesar 7.67%. Dan jika kita lihat dari hasil olahan di atas ternyata signifikan dikarenakan nilai probabilitasnya 0.1225 ($\alpha < 0,15$). Dasar pertimbangan peneliti menggunakan taraf signifikansi sebesar 15% adalah besarnya risiko kesalahan kedua (*Type II Error*) dan *statistical*

power. Hal ini dilakukan untuk menghindari pengambilan kesimpulan yang keliru. Selain itu, jika *statistical power* rendah dapat menyebabkan peneliti tidak akan menemukan hasil secara yang signifikan secara statistik, padahal seharusnya terdapat hubungan (Goodhue, Lewis, dan Thompson, 2007). Secara matematik *statistical power* adalah $1-\beta$, artinya probabilitas menolak H_0 ketika H_1 adalah benar atau H_0 seharusnya ditolak (Lindsay, 1993; Goodhue et al, 2007). Maka dapat disimpulkan dana desa berpengaruh secara signifikan terhadap indeks desa membangun.

(Netra Ekawati, 2022), penggunaan dana desa mulai dari perencanaan penggunaan sampai dengan pelaporan penggunaan sebagaimana diatur dalam petunjuk teknisnya, belum sepenuhnya menerapkan prinsip tatakelola keuangan yang baik. Selain itu, aspek penggunaan secara tertib terutama konsistensi penggunaan sesuai dengan rencana strategis nagari sering menjadi kurang diperhatikan. Selanjutnya Implikasi Pemanfaatan Dana Desa terhadap peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) telah memberikan dampak positif pada nagari, pelaksanaan pemanfaatannya sudah dijalankan sesuai dengan aturan yang ada.

Koefisien $\beta_2 = 3.33E-06$, artinya jika produk domestik regional bruto perkapita (PDRB-PK) naik maka diperkirakan indeks desa membangun (IDM) akan meningkat sebesar 3,33%. Dan jika kita lihat dari hasil olahan di atas ternyata tidak signifikan dikarenakan nilai probabilitasnya 0.2089 ($\alpha > 0, 15$). Maka dapat disimpulkan produk domestik regional bruto perkapita tidak berpengaruh secara signifikan terhadap indeks desa membangun.

Perbedaan karakteristik setiap wilayah di Indonesia mengakibatkan pola kegiatan ekonomi dan pola pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia

di tiap daerah menjadi tidak seragam (Bappenas 2016). Hal tersebut berimplikasi pada munculnya masalah kesenjangan/ketimpangan dalam berbagai hal. Ada daerah yang maju lebih cepat dan ada juga daerah yang pertumbuhannya lebih lambat atau disebut daerah tertinggal.

Ketidak signifikanan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita terhadap Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Simalungun bisa disebabkan oleh beberapa faktor, yang dapat mencerminkan kondisi spesifik di daerah tersebut. Berikut beberapa kemungkinan penyebabnya:

1. Distribusi Pembangunan yang Tidak Merata:
 - Kesenjangan Pembangunan antar Wilayah : PDRB per kapita yang tinggi mungkin hanya mencerminkan kekayaan di beberapa wilayah tertentu dalam kabupaten, sementara desa-desa lain tetap tertinggal. Jika sebagian besar PDRB berasal dari daerah perkotaan atau sektor tertentu seperti pertambangan atau industri, ini mungkin tidak tercermin dalam kondisi desa-desa di seluruh kabupaten.
 - Ketimpangan Akses dan Infrastruktur ; PDRB per kapita tinggi tidak selalu berarti pembangunan yang merata. Desa-desa mungkin masih kekurangan akses terhadap infrastruktur dasar, layanan kesehatan, atau pendidikan, yang merupakan komponen penting dalam penilaian IDM.
2. Struktur Ekonomi yang Tidak Inklusif:
 - Sektor Dominan : Jika PDRB per kapita di Simalungun didominasi oleh sektor-sektor yang tidak banyak menyerap tenaga kerja lokal atau tidak berkontribusi langsung pada kesejahteraan masyarakat desa (misalnya,

industri besar yang menggunakan teknologi tinggi dengan sedikit tenaga kerja lokal), dampaknya pada pembangunan desa mungkin terbatas.

- Pola Konsumsi dan Investasi : PDRB per kapita yang tinggi bisa jadi tidak secara langsung dialokasikan untuk investasi yang meningkatkan kualitas hidup di desa. Misalnya, pendapatan tinggi mungkin lebih banyak digunakan untuk konsumsi di luar desa atau investasi yang tidak terkait dengan peningkatan kualitas infrastruktur desa.

3. Keterbatasan dalam Penggunaan Data PDRB:

- Agregasi Data: Data PDRB sering kali bersifat agregat dan tidak mencerminkan distribusi pendapatan atau kesejahteraan di tingkat desa. PDRB per kapita bisa saja tinggi secara keseluruhan, namun jika pendapatan tersebut tidak merata atau hanya dinikmati oleh segelintir populasi, pengaruhnya terhadap IDM bisa saja tidak signifikan.
- Keterkaitan Data dengan Realitas Desa: PDRB per kapita lebih menggambarkan output ekonomi per orang di seluruh kabupaten, sementara IDM lebih fokus pada kondisi spesifik di desa, seperti akses terhadap layanan dasar, infrastruktur, dan kapasitas pemerintahan desa. Jika data PDRB tidak secara langsung terkait dengan variabel-variabel ini, maka hubungan antara keduanya mungkin lemah.

4. Faktor Sosial dan Tata Kelola:

- Tata Kelola Desa: Kualitas tata kelola di tingkat desa, seperti transparansi, partisipasi masyarakat, dan efektivitas pemerintahan desa, bisa lebih menentukan IDM daripada sekadar PDRB per kapita. Jika tata kelola desa

tidak mendukung, meskipun PDRB per kapita tinggi, dampaknya terhadap pembangunan desa bisa minimal.

- Keterlibatan Masyarakat: Pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak langsung pada IDM membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan. Jika masyarakat desa tidak terlibat aktif, manfaat dari PDRB yang tinggi mungkin tidak terasa di tingkat desa.

5. Variabel Lain yang Lebih Signifikan:

- Pengaruh Variabel Lain: Ada kemungkinan bahwa variabel lain, seperti Dana Desa, bantuan sosial, atau kebijakan spesifik pemerintah daerah serta Indeks Pembangunan Manusia yang memiliki pengaruh yang lebih signifikan terhadap IDM dibandingkan PDRB per kapita. Hal ini bisa membuat hubungan antara PDRB per kapita dan IDM menjadi tidak signifikan.

Secara keseluruhan, ketidak signifikanan PDRB per kapita terhadap IDM di Kabupaten Simalungun menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi yang diukur melalui PDRB mungkin belum berhasil diterjemahkan menjadi pembangunan desa yang inklusif dan merata. Untuk meningkatkan IDM, diperlukan strategi yang lebih holistik yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada distribusi yang adil dan pembangunan infrastruktur serta layanan dasar di desa.

Pembangunan ekonomi diartikan sebagai serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonominya sehingga infrastruktur lebih banyak tersedia, perusahaan semakin banyak dan semakin

berkembang, taraf pendidikan semakin tinggi dan teknologi semakin meningkat. Sebagai implikasi ini perkembangan ini diharapkan kesempatan kerja akan bertambah, tingkat pendapatan meningkat dan kemakmuran masyarakat menjadi semakin tinggi (Sadono, 2006).

Koefisien $\beta_3 = -5.35E-14$, artinya jika pengeluaran pemerintah (PP) naik maka diperkirakan indeks desa membangun (IDM) akan meningkat, namun pada hasil regresi olahan data ini menurun sebesar -5,35%. Dan jika kita lihat dari hasil olahan di atas ternyata signifikan dikarenakan nilai probabilitasnya 0,0979 ($\alpha < 0,10$). Maka dapat disimpulkan pengeluaran pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap indeks desa membangun.

Penelitian oleh Wahyudi (2020) yang bertujuan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah provinsi khususnya bidang pendidikan, kesehatan dan untuk infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di Indonesia. Bentuk penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode eksplanasi. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pengeluaran pemerintah provinsi untuk pendidikan dan kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, tetapi pengeluaran pemerintah provinsi untuk infrastruktur berpengaruh signifikan. Kemudian, pengeluaran pemerintah provinsi untuk pendidikan dan kesehatan memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, sedangkan pengeluaran pemerintah provinsi untuk infrastruktur tidak berpengaruh signifikan. Dalam penelitian ini direkomendasikan kepada Pemerintah Provinsi untuk lebih mengoptimalikan anggaran belanja urusan wajib (*mandatory spending*) dalam upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan. Kemudian secara terus menerus agar

meningkatkan pengeluaran untuk infrastruktur, dengan memperhatikan efek stimulus terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di Indonesia.

Artinya jika hasil regresi menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki hubungan negatif terhadap Indeks Desa Membangun (IDM), hal ini bisa disebabkan oleh beberapa factor. Berikut beberapa kemungkinan penjelasan :

1. Efektivitas Penggunaan Dana: Pengeluaran pemerintah mungkin tidak digunakan secara efektif. Jika dana yang dialokasikan tidak dikelola dengan baik atau digunakan untuk proyek-proyek yang tidak relevan dengan kebutuhan desa, dampaknya terhadap pembangunan desa bisa negatif.
2. Korupsi atau Penyalahgunaan Anggaran: Ada kemungkinan bahwa sebagian dari pengeluaran tersebut diselewengkan atau tidak sampai ke sasaran yang diinginkan. Hal ini bisa menyebabkan dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan desa justru tidak memberikan manfaat, dan bahkan bisa merugikan desa.
3. Kualitas Proyek: Proyek yang didanai oleh pengeluaran pemerintah mungkin tidak dirancang atau dilaksanakan dengan baik. Misalnya, jika infrastruktur yang dibangun tidak sesuai dengan kebutuhan atau standar yang diperlukan, hal ini bisa menyebabkan masalah jangka panjang yang menurunkan kualitas hidup di desa tersebut.
4. Ketergantungan Terhadap Bantuan: Pengeluaran pemerintah yang berlebihan tanpa memberdayakan desa untuk mandiri bisa menyebabkan ketergantungan. Ini bisa membuat desa tidak berkembang secara berkelanjutan karena terlalu bergantung pada bantuan eksternal tanpa membangun kapasitas internal.

5. Efek Jangka Pendek dan Jangka Panjang: Pengeluaran pemerintah mungkin berfokus pada inisiatif jangka pendek yang tidak memberikan dampak jangka panjang. Misalnya, subsidi atau bantuan langsung tunai bisa membantu dalam jangka pendek, tetapi jika tidak diikuti dengan investasi dalam infrastruktur atau pendidikan, dampaknya terhadap IDM bisa negatif.
6. Distorsi Pasar: Pengeluaran pemerintah yang besar bisa mendistorsi pasar lokal, misalnya dengan menaikkan harga barang atau jasa tertentu, yang justru bisa merugikan penduduk desa dan menurunkan skor IDM.

Teori Pengeluaran Pemerintah Wagner dalam (Dumairy, 2004), dikemukakan bahwa perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentase terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Wagner mengatakan kecenderungan jika peranan pemerintah dalam pengeluaran meningkat (semakin tinggi pengeluaran pemerintah) maka pertumbuhan dan percepatan pembangunan akan selalu meningkat pula. Selanjutnya Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat, (Mangkoesoebroto, 2014). Kejadian tersebut dikarenakan bahwa pemerintah harus selalu campur tangan dalam menentukan kebijakan guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, rekreasi, hukum, kebudayaan dan kepentingan lainnya.

3) Uji Statistik

a. Uji Parsial (Uji t)

Uji-t statistik dilakukan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel bebas secara individual atau masing-masing dalam menjelaskan variabel terikat. Adapun dalam penelitian ini untuk melihat nilai tabel dengan cara mencari $df = (n-k) = 9 - 4 = 5$ dengan ($\alpha = 10\%$) maka nilai tabel sebesar ± 2.01505 .

Kriteria uji:

Terima H_0 jika $-t\text{-tabel} < t\text{-hitung} < +t\text{-tabel}$

Tabel 4.7 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Dependent Variable: IDM
Method: Least Squares
Date: 07/17/24 Time: 19:31
Sample: 2015 2023
Included observations: 9

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.381098	0.072889	5.228500	0.0034
DD	7.67E-10	4.13E-10	1.856580	0.1225
PDRB_PK	3.33E-06	2.31E-06	1.441733	0.2089
PP	-5.35E-14	2.63E-14	-2.031824	0.0979

Sumber: Eviews 12, olahan penulis 2024

Pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebagai berikut:

- a. t Produk Domestik Regional Bruto Perkapita (PDRB-PK) berada di dalam $\pm t$ tabel maka terima H_0 artinya ada hubungan yang signifikan antara produk domestik regional bruto perkapita terhadap indeks desa membangun. Namun dari hasil olahan menyatakan tidak signifikan dengan probabilitas 0.2089 atau pada alpha ($\alpha = >15\%$).
- b. t hitung pengeluaran pemerintah (PP) berada di luar $\pm t$ tabel maka tolak H_0 artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara pengeluaran pemerintah terhadap indeks desa membangun. Namun dari hasil olahan

menyatakan signifikan dengan probabilitas 0.0979 atau berada pada alpha ($\alpha = 10\%$).

b. Uji Simultan (Uji F)

Tabel 4.8 Hasil Uji Simultan (Uji F)

Uji Simultan (Uji-F) bertujuan untuk pengujian signifikansi semua variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat.

R-squared	0.894075
Adjusted R-squared	0.830520
S.E. of regression	0.018294
Sum squared resid	0.001673
Log likelihood	25.88536
F-statistic	14.06774
Prob(F-statistic)	0.007152

Sumber: Eviews 12, olahan penulis 2024

Dari hasil regresi didapati variabel dana desa (DD), produk domestik regional bruto (PDRB-PK) dan pengeluaran pemerintah (PP) terhadap indeks desa membangun (IDM) memiliki nilai probabilitas sebesar 0.007152 dan nilai F statistic sebesar 14.06774.

Nilai F hitung akan dibandingkan dengan F tabel = $F(\alpha, n - k - 1)$ dengan derajat kesalahan $\alpha = 10\%$, maka F tabel = $(10\% ; 9-4-1) = (0.1 ; 4)$ dengan demikian nilai F tabel adalah 5.96.

Kriteria uji :

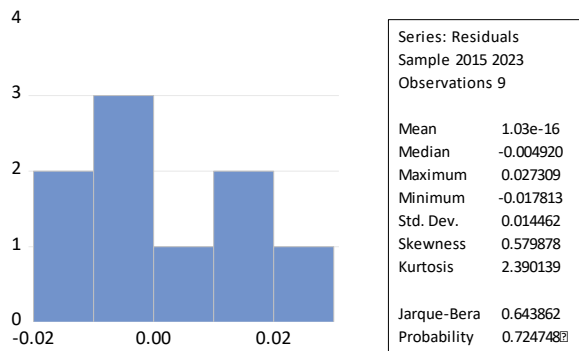
Terima H_0 jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, hal lain tolak H_0 .

Kesimpulan yaitu $F_{hitung} > F_{tabel}$ berarti tolak H_0 . Namun jika dilihat dari olahan Eviews, nilai probabilitasnya 0.007152 atau dibawah 1% yang berarti signifikan. Sehingga ada hubungan secara serentak antara variabel dana desa (DD), produk domestik regional bruto (PDRB-PK) dan pengeluaran pemerintah (PP) terhadap indeks desa membangun (IDM).

4) Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinearitas

Uji Normalitas



Dari grafik hasil uji Jarque-Bera diatas dapat dilihat nilai probabilitasnya diatas 0,05 (probability jarque-bera > 0,05) atau dapat dikatakan bahwa data telah terdistribusi dengan normal.

Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors

Date: 07/17/24 Time: 19:37

Sample: 2015 2023

Included observations: 9

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.005313	142.8751	NA
DD	1.71E-19	374.5910	4.203123
PDRB_PK	5.32E-12	245.1537	3.993753
PP	6.94E-28	95.91836	1.176875

Sumber: Eviews 12, olahan penulis 2024

Salah satu cara untuk melihat adanya atau tidak multikolinearitas pada suatu model regresi ialah dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF)

dengan ketetapan terbebas dari masalah multikolinearitas jika ($VIF < 10$). Dari hasil uji diatas menunjukkan nilai Centered VIF dari semua variabel bebas berada dibawah 10, maka artinya bahwa dalam hasil regresi diatas tidak terjadi masalah multikolinieritas.

b. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	0.559809	Prob. F(3,5)	0.6643
Obs*R-squared	2.262894	Prob. Chi-Square(3)	0.5197
Scaled explained SS	0.485453	Prob. Chi-Square(3)	0.9221

Sumber: Eviews 12, olahan penulis 2024

Berdasarkan hasil diatas diperoleh nilai p value yang ditunjukkan dengan nilai Prob. Chi Square (3) pada Obs*R-squared yaitu sebesar 0,5197. Oleh karena p value $0,5197 > 0,05$ maka hal ini menunjukkan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

c. Uji Autokorelasi

Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic	0.436558	Prob. F(2,3)	0.6817
Obs*R-squared	2.028867	Prob. Chi-Square(2)	0.3626

Sumber: Eviews 12, olahan penulis 2024

Berdasarkan hasil pengujian diatas nilai p value yang ditunjukkan dengan nilai Prob. Chi Square (2) pada Obs*R-squared yaitu sebesar 0,3626. Oleh karena

p value $0,3626 > 0,05$ maka hal ini menunjukkan tidak terjadi masalah autokorelasi. Selain itu pengujian juga dapat dilakukan dengan melihat nilai Durbin Watson sebesar 2.600217, artinya model yang digunakan sudah terbebas dari masalah autokorelasi.

4.4 Indikator Apa Saja Yang Mempengaruhi Dana Desa Di Kabupaten Simalungun Pada Desa Pematang Sidamanik Dan Sarimattin

4.4.1 Karakteristik Responden

1. Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.6 Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
Laki-laki	17	48,6%
Perempuan	18	51,4%
Total	100	100%

Sumber : Olahan Peneliti, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dari total 35 responden mayoritas responden yang menjadi sampel adalah berjenis kelamin Perempuan dengan presentase sebanyak 51,4 % dan untuk laki-laki sebanyak 48,6%.

2. Berdasarkan Usia

Tabel 4.7 Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Presentase
20-35	12	34,3%
36-45	17	48,6%
46-55	6	17,15%
Total	35	100%

Sumber : Olahan Peneliti, 2024

Berdasarkan data diatas dapat diambil kesimpulan dari total 35 responden, usia 20-35 tahun sebanyak 12 responden, usia 36-45 tahun sebanyak 17 responden dan usia 46-55 tahun sebanyak 6 responden.

3. Berdasarkan Domisili

Tabel 4.8 Berdasarkan Domisili

Domisili	Jumlah	Presentase
Desa Sarimattin	18	51,4%
Desa Pamatang Sidamanik	17	48,6%
Total	35	100%

Sumber: Eviews 12, olahan penulis 2024

Dari hasil olahan data diatas dapat dilihat berdasarkan domisili Desa Sarimattin memiliki jumlah responden sebanyak 51, 4% atau 18 responden sedangkan untuk Desa Pamatang Sidamanik sebanyak 48,6 % atau 17 responden.

4. Berdasarkan Status Responden

Tabel 4.9 Berdasarkan Status Responden

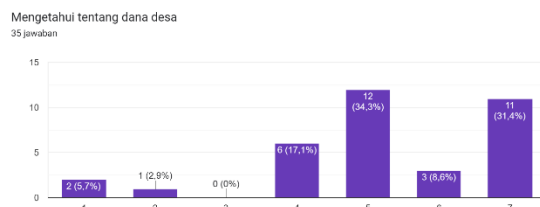
Status Responden	Jumlah	Presentase
Perangkat Desa	11	31,4%
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	6	17,1%
Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)	2	5,7%
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	1	2,9%
Pelaku UMKM	4	11,4%
Masyarakat Desa	7	920%
Pemuda Desa	4	11,4%
Akademisi	1	5,7%
Total	35	100%

Sumber: Eviews 12, olahan penulis 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat diambil kesimpulan dari 35 responden, mayoritas responden yang berstatus perangkat desa sebanyak 11 responden, PPK sebanyak 6 responden, masyarakat desa sebanyak 7 responden, LKMD sebanyak 2 responden, LSM sebanyak 1 responden, pelaku UMKM sebanyak 4 responden, pemuda desa sebanyak 4 responden dan akademisi 1 responden .

4.4.2 Pernyataan Kuisioner

1. Mengetahui Tentang Dana Desa

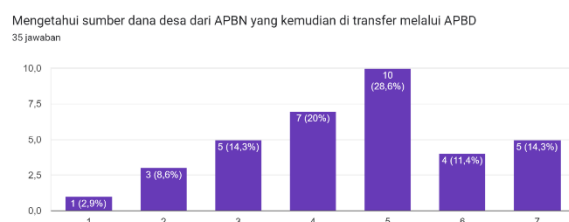


Sumber : Olahan Peneliti, 2024

Gambar 4.6 Mengetahui Tentang Dana Desa

Dari hasil olahan data diatas dapat dilihat sebesar 34,3 % (12 responden) cukup sangat setuju mengetahui tentang dana desa, 31,4 % (11 responden) sangat setuju mengetahui dana desa, 17,1% (6 responden) netral mengetahui tentang dana desa, 8,6 % (3 responden) setuju mengetahui tentang dana desa, 5,7% (2 responden) sangat tidak setuju mengetahui tentang dana desa, 2,9 % (1 responden) tidak setuju mengetahui tentang dana desa.

2. Mengetahui sumber dana desa dari APBN yang kemudian di transfer melalui APBD



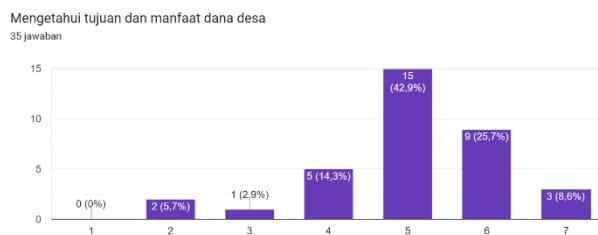
Sumber : Olahan Peneliti, 2024

Gambar 4.7 Mengetahui sumber dana desa dari APBN yang kemudian di transfer melalui APBD

Pernyataan dari hasil kuesioner mengetahui sumber dana desa dari APBN yang kemudian di transfer melalui APBD, dapat dilihat dari olahan data diatas

sebanyak 28,6 % (10 responden) setuju mengetahui sumber dana desa dari APBN yang kemudian di transfer melalui APBD dan sebanyak 20 % (7 responden) netral mengetahui dana desa dari APBN yang kemudian di transfer melalui APBD, dan 2,9 % (1 responden) tidak mengetahui sumber dana desa dari APBN yang kemudian di transfer melalui APBD.

3. Mengetahui tujuan dan manfaat dana desa

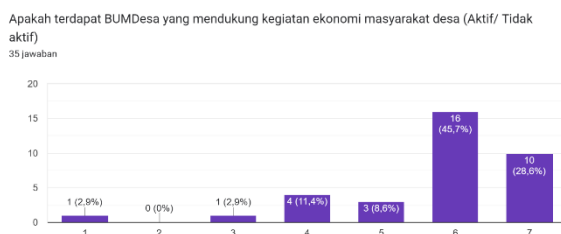


Sumber : Olahan Peneliti, 2024

Gambar 4.8 Mengetahui tujuan dan manfaat dana desa

Dari hasil olahan data diatas dapat diketahui sebanyak 42,9 % (15 responden) setuju mengetahui tujuan dan manfaat dana desa dan 2,9 % (1 responden) cukup tidak setuju mengetahui tujuan dan manfaat dana desa.

4. Apakah terdapat BUMDesa yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat desa (aktif/ tidak aktif)

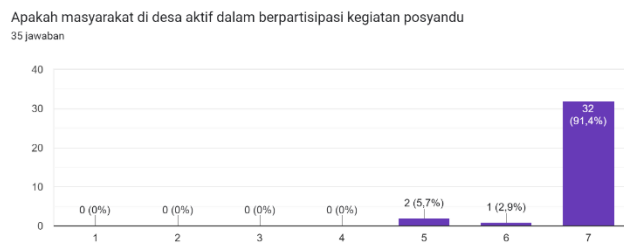


Gambar 4.9 Apakah terdapat BUMDesa yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat desa (aktif/ tidak aktif)

Sumber : Olahan Peneliti, 2024

Dapat dilihat hasil olahan data di atas sebanyak 45,7 % (16 responden) setuju terdapat BUMDesa yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat desa dan sebanyak 3,1% (1 responden) sangat tidak setuju BUMDesa mendukung kegiatan ekonomi masyarakat desa.

5. Apakah Masyarakat di desa aktif dalam berpartisipasi kegiatan posyandu

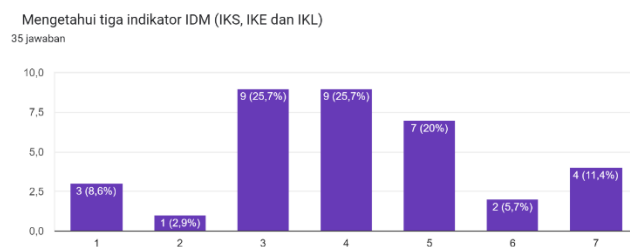


Gambar 4.10 Apakah Masyarakat di desa aktif dalam berpartisipasi kegiatan posyandu

Sumber : Olahan Peneliti, 2024

Dilihat dari hasil olahan data dari peneliti sebanyak 91,4% (32 responden) sangat setuju Masyarakat di desa aktif dalam berpartisipasi kegiatan posyandu dan 2,9 % (1 responden) setuju Masyarakat di desa aktif dalam berpartisipasi kegiatan posyandu.

6. Mengetahui tiga indikator IDM (IKS, IKL dan IKL)

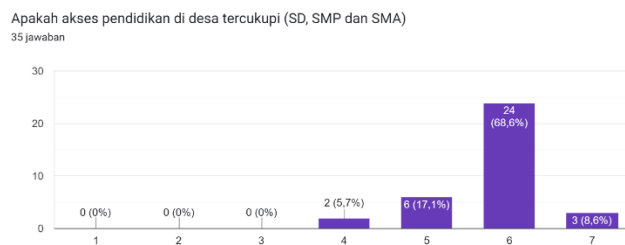


Sumber : Olahan Peneliti, 2024

Gambar 4.11 Mengetahui tiga indikator IDM (IKS, IKL dan IKL)

Dari hasil olahan data diatas sebanyak 25,7 % (9 responden) netral dan cukup tidak setuju mengetahui tiga indikator Indeks Desa Membangun yaitu Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) dan sebanyak 2,9 % (1 responden) tidak setuju mengetahui tiga indikator Indeks Desa Membangun yaitu Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)

7. Apakah akses Pendidikan di desa tercukupi (SD, SMP dan SMA)



Sumber : Olahan Peneliti, 2024

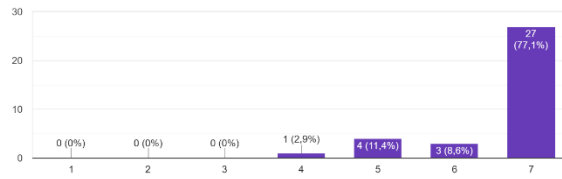
Gambar 4.12 Apakah akses Pendidikan di desa tercukupi (SD, SMP dan SMA)

Dari hasil olahan data diatas dapat dilihat sebanyak 68,6% (24 responden) setuju akses pendidikan di desa tercukupi mulai dari SD, SMP dan SMA sedangkan sebanyak 5,7 % (2 responden) netral hal ini dikarenakan akses Pendidikan di desa hanya terdapat Pendidikan SD dan SMP saja akan tetapi untuk SMA ada diluar desa yang jaraknya kurang lebih 19 km dari desa.

8. Apakah terdapat sumber penghasilan utama di desa seperti (pertanian, perkebunan, industry, pariwisata dan lain sebagainya)

Apakah terdapat sumber penghasilan utama di desa seperti (Pertanian, Perkebunan, Industri, Pariwisata dan lain sebagainya)

35 jawaban



Sumber : Olahan Peneliti, 2024

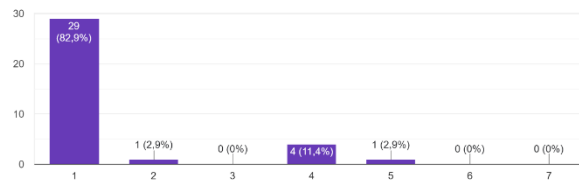
Gambar 4.13 Apakah terdapat sumber penghasilan utama di desa seperti (pertanian, perkebunan, industry, pariwisata dan lain sebagainya)

Dari hasil olahan data diatas terdapat 77% (27 responden) sangat setuju bahwa terdapat sumber penghasilan utama di desa seperti (pertanian, perkebunan, industri, pariwisata dan lain sebagainya) dan sebanyak 2,9 % (1 responden) menjawab netral dari sumber penghasilan utama di desa.

9. Apakah terdapat pencemaran lingkungan di desa (air, udara dan lain sebagainya)

Apakah terdapat pencemaran lingkungan di desa (air, udara dan lain sebagainya)

35 jawaban



Sumber : Olahan Peneliti, 2024

Gambar 4.14 Apakah terdapat pencemaran lingkungan di desa (air, udara dan lain sebagainya)

Dari hasil olahan data kuisisioner peneliti terdapat 82,9 % (29 responden) menjawab sangat tidak setuju bahwa terdapat pencemaran lingkungan di desa (air, udara dan lain sebagainya) dan sebanyak 3,1% (1 responden) tidak setuju terdapat pencemaran lingkungan di desa.

4.4.3 Hasil Penelitian Analisis SM-PLS

A. Analisa Outer Model

1. Uji Validitas

a) Convergent Validity

Convergent validity adalah salah satu dari pengukuran model pada indikator yang bersifat reflektif. *Convergent validity* bertujuan untuk mengetahui validitas setiap hubungan antara indikator dengan konstruk atau variabel latennya. Dimana dilihat dari skor butir pertanyaan dengan skor konstruknya atau melalui loading factor pada masing-masing indikator konstruk. Berdasarkan hasil analisis data pada *convergent validity* pada indikator-indikator pada masing-masing variabel, dapat dikemukakan sebagai berikut.

1) *Convergent validity* Pada Faktor Dana Desa

Dalam Indikator konstruk pada faktor Dana Desa pada pemerintahan desa berjumlah 5 indikator konstruk. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai *convergent validity* melalui loading factor pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.10 *Convergent validity* Faktor Dana Desa (F0)

Indikator	<i>Loading Factor</i>	<i>Rule Of Thump</i>	Keterangan
F0.1	0,854	0,40	Memenuhi
F0.2	0,921	0,40	Memenuhi
F0.3	0,937	0,40	Memenuhi
F0.4	0,940	0,40	Memenuhi
F0.5	0,971	0,40	Memenuhi

Sumber : SmartPLS, Olahan Peneliti, 2024

Berdasarkan dari data tabel 4.26 diatas menunjukkan bahwa di dalam Dana Desa dengan 5 indikator tidak terdapat indikator yang tidak memenuhi kriteria. Dari

pernyataan tersebut setelah dilakukannya pengolahan data menggunakan aplikasi Smart-PLS pernyataan tersebut memperoleh nilai loading factor F01 0,854, F02 0,921, F03 0,937, F04 0,940, F05 0,971 yang berarti $>$ dari nilai Rule of Thumb 0,40.

Tabel 4.11 Convergent validity Faktor Pengetahuan Dana Desa

Indikator	Loading Factor	Rule Of Thump	Keterangan
F1.1	0,759	0,4	Memenuhi
F1.2	0,837	0,4	Memenuhi
F1.3	0,910	0,4	Memenuhi
F1.4	0,885	0,4	Memenuhi
F1.5	0,940	0,4	Memenuhi
F1.6	0,953	0,4	Memenuhi
F1.7	0,850	0,4	Memenuhi
F1.8	0,850	0,4	Memenuhi

Sumber : SmartPLS, Olahan Peneliti, 2024

Berdasarkan dari data tabel 4.27 diatas menunjukkan bahwa semua indikator di dalam faktor informasi tentang Pengetahuan Dana Desa memperoleh nilai lebih besar dari Rule Of Thumb ($>$ 0,4) yang menunjukkan semua indicator memenuhi kriteria atau dapat dikatakan valid terhadap faktor Pengetahuan Dana Desa.

Tabel 4.12 Convergent validity Faktor Penerapan Dana Desa

Indikator	Loading Factor	Rule Of Thump	Keterangan
F2.1	0,504	0,4	Memenuhi
F2.2	0,655	0,4	Memenuhi
F2.3	-0,085	0,4	Tidak Memenuhi
F2.4	0,253	0,4	Tidak Memenuhi
F2.5	0,783	0,4	Memenuhi
F2.6	-0,436	0,4	Tidak Memenuhi
F2.7	0,365	0,4	Tidak Memenuhi

F2.8	0,197	0,4	Tidak Memenuhi
F2.9	0,856	0,4	Memenuhi
F2.10	-0,656	0,4	Tidak Memenuhi

Sumber : SmartPLS, Olahan Peneliti, 2024

Berdasarkan dari data tabel 4.28 diatas menunjukkan bahwa di dalam variabel faktor Pengetahuan Dana Desa dengan 10 indikator pernyataan terdapat 6 indikator pernyataan yang tidak memenuhi kriteria yaitu pada pernyataan **F2.3** (Apakah akses jalan di desa baik), **F2.4** (Apakah terdapat akses pusat pasar di desa yang menjadi sumber utama transaksi jual-beli kebutuhan rumah tangga), **F2.6** (Apakah terdapat saluran pembuangan limbah cair/ limbah padat yang dihasilkan dari rumah tangga di desa), **F2.7** (Apakah terdapat akses PAUD di desa), **F2.8** (Apakah masyarakat di desa aktif dalam berpartisipasi kegiatan posyandu), **F2.10** (Apakah setiap rumah tangga memiliki akses sumur pribadi dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari). Dari pernyataan tersebut setelah dilakukannya pengolahan data menggunakan aplikasi Smart-PLS memperoleh nilai loading factor -0,085, 0,253, -0,436, 0,365, 0,197, -0,656 (<0,40). Hal tersebut dikarenakan pada indikator tersebut benar akses jalan perlu diperbaiki, desa tidak memiliki saluran pembuangan limbah cair, dan akses PAUD memadai akan tetapi untuk Desa Pamatang Sidamanik tidak mempunyai akses PAUD, dan masyarakat desa cukup aktif dalam kegiatan posyandu serta Desa Sarimattin dan Pamatang Sidamanik menggunakan air PAM dan tidak memiliki akses sumur pribadi.

Tabel 4.13 Convergent validity Faktor Penerapan Dana Desa

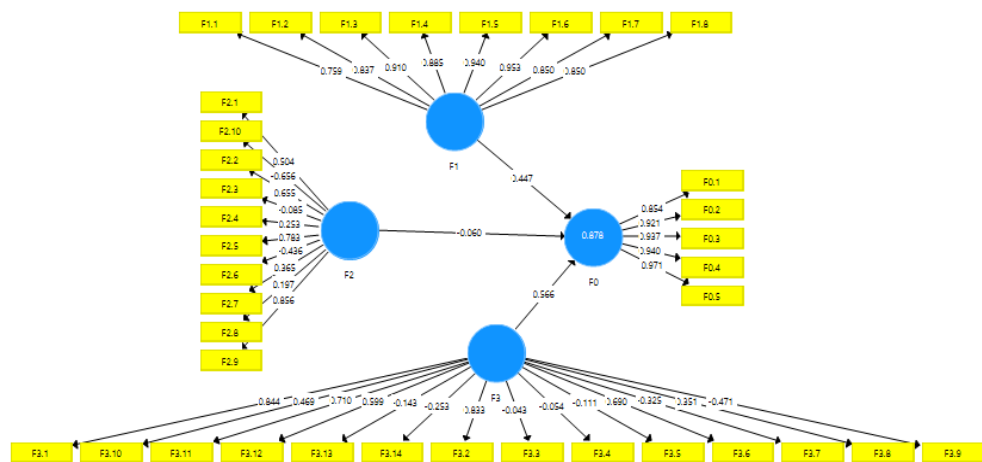
Indikator	Loading Factor	Rule Of Thump	Keterangan
F3.1	0,844	0,4	Memenuhi
F3.2	0,833	0,4	Memenuhi
F3.3	-0,043	0,4	Tidak Memenuhi

F3.4	-0,054	0,4	Tidak Memenuhi
F3.5	-0,111	0,4	Tidak Memenuhi
F3.6	0,690	0,4	Memenuhi
F3.7	-0,325	0,4	Tidak Memenuhi
F3.8	0,351	0,4	Tidak Memenuhi
F3.9	-0,471	0,4	Tidak Memenuhi
F3.10	0,469	0,4	Memenuhi
F3.11	0,710	0,4	Memenuhi
F3.12	0,599	0,4	Memenuhi
F3.13	-0,143	0,4	Tidak Memenuhi
F3.14	-0,253	0,4	Tidak Memenuhi

Sumber : SmartPLS, Olahan Peneliti, 2024

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa di dalam Faktor Penerapan Dana Desa dengan 14 indikator pernyataan terdapat 8 indikator pernyataan yang tidak memenuhi kriteria yaitu pada pernyataan F3.3 (Apakah masyarakat di desa sering melakukan kegiatan gotong royong), F3.4 (Apakah terdapat tempat ibadah di desa (Masjid, Gereja, Wihara, Kelenteng dan Pura)), F3.5 (Apakah akses pendidikan di desa tercukupi (SD, SMP dan SMA)), F3.7 (Apakah terdapat sarana informasi seperti (papan informasi desa, website dan lain sebagainya)), F3.8 (Apakah terdapat sumber penghasilan utama di desa seperti (Pertanian, Perkebunan, Industri, Pariwisata dan lain sebagainya)), F3.9 (Apakah terdapat kebun gizi yang dikelola dan dimanfaatkan secara bersama oleh masyarakat), F3.13 (Apakah terdapat pencemaran lingkungan di desa (air, udara dan lain sebagainya)), F3.14 (Apakah terdapat fasilitas upaya terjadinya bencana alam di desa). Dari pernyataan tersebut setelah dilakukannya pengolahan data menggunakan aplikasi Smart-PLS memperoleh nilai loading factor -0,043, -0,054, -0,111, -0,325, 0,351,-0,471, -0,143, -0,253 (<0,40). Hal tersebut disebabkan responden kurang mengetahui

pernyataan yang diberikan sehingga responden cenderung menjawab kearah setuju yang menyebabkan indikator tersebut diragukan kebenarannya, adapun hasil evaluasi model pengukuran pada masing-masing indikator konstruk dari Convergent Validity melalui loading factor dapat juga dikemukakan pada gambar dibawah ini.

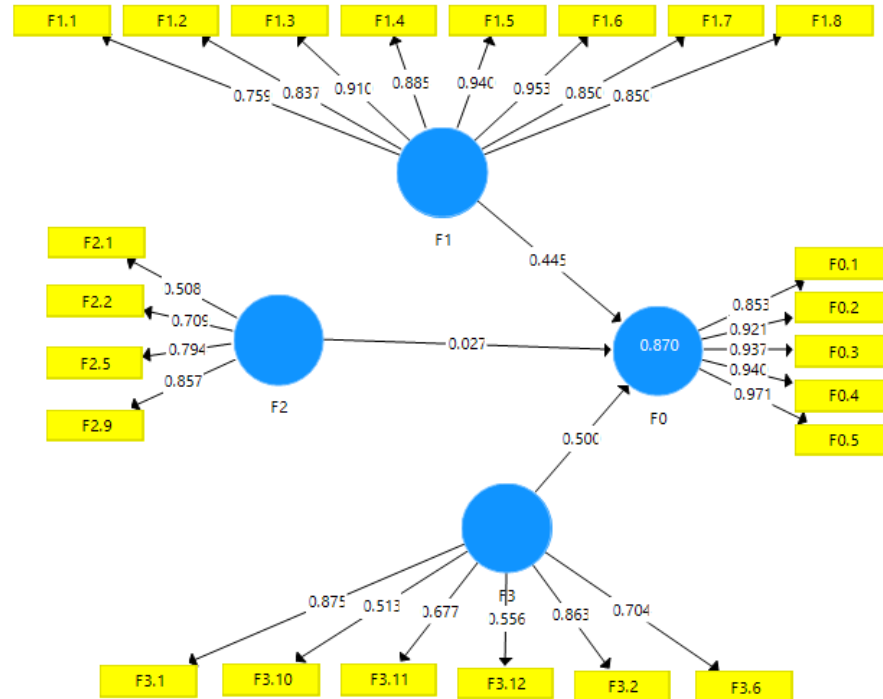


Sumber : SmartPLS, Olahan Peneliti, 2024

Gambar 4.15 First Outer Loading

Diketahui bahwa terdapat 8 indikator yang tidak memenuhi nilai *loading factor* ($<0,40$). Dalam ketentuan analisis convergent validity, jika nilai loading factor tidak terpenuhi maka indikator konstruk dibuang dan dilakukan analisis convergent validity Kembali, yang nantinya hasil analisis dapat terpenuhi pada tahap kedua pada indikator konstruk masing-masing variable. Namun setelah dilakukan penghapusan 8 indikator dengan nilai Avarage Variance Extracted (AVE) masih berada dibawah 0,30. Dimana Menurut sugiyono (2017:125) nilai standar dari validitas adalah sebesar 0,3. Sehingga Penulis menghapus indikator yang memiliki nilai loading faktor terendah sebanyak 4 indikator yaitu F2.5 0,403,

F2.14 0,412, F2.22 0,425 dan F2.17 0,428. Jadi total penghapusan indikator yaitu 6 indikator seperti pada gambar dibawah ini.



Sumber : SmartPLS, Olahan Peneliti, 2024

Gambar 4.16 Second Outer Loading

1) *Convergent validity* Pada Faktor Dana Desa Setelah Dilakukan *Second Outer Loading*

Dalam Indikator konstruk pada factor Dana Desa pada pemerintahan desa setelah dilakukan *second Outer Loading* berjumlah 4 indikator konstruk. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai *convergent validity* melalui loading factor pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.14 Convergent validity Pada Dana Desa (F0)

Indikator	Loading Factor	Rule Of Thump	Keterangan
F0.1	0,853	0,40	Memenuhi
F0.2	0,921	0,40	Memenuhi

F0.3	0,937	0,40	Memenuhi
F0.4	0,940	0,40	Memenuhi
F0.5	0,971	0,40	Memenuhi

Sumber : SmartPLS, Olahan Peneliti, 2024

Berdasarkan dari data tabel 4.26 diatas menunjukkan bahwa di dalam faktor Dana Desa dengan 5 indikator tidak terdapat indikator yang tidak memenuhi kriteria. Dari pernyataan tersebut setelah dilakukannya pengolahan data menggunakan aplikasi Smart-PLS pernyataan tersebut memperoleh nilai loading F01 0,853, F02 0,921, F03 0,937, F04 0,940, F05 0,971 yang berarti > dari nilai Rule of Thumb 0,40.

Tabel 4.15 Convergent validity Faktor Pengetahuan Dana Desa Setelah Dilakukan Second Outer Model (F1)

Indikator	Loading Factor	Rule Of Thump	Keterangan
F1.1	0,759	0,4	Memenuhi
F1.2	0,837	0,4	Memenuhi
F1.3	0,910	0,4	Memenuhi
F1.4	0,884	0,4	Memenuhi
F1.5	0,940	0,4	Memenuhi
F1.6	0,953	0,4	Memenuhi
F1.7	0,850	0,4	Memenuhi
F1.8	0,850	0,4	Memenuhi

Sumber : SmartPLS, Olahan Peneliti, 2024

Berdasarkan dari data tabel 4.31 diatas menunjukkan bahwa semua indikator di dalam faktor informasi tentang Pengetahuan Dana Desa setelah dilakukan *second outer loading* memperoleh nilai lebih besar dari Rule Of Thumb (> 0,4) yang menunjukkan semua indikator memenuhi kriteria atau dapat dikatakan valid terhadap faktor informasi tentang Pengetahuan Dana Desa.

Tabel 4.16 Convergent validity Faktor Penerapan Dana Desa Setelah Dilakukan Second Outer Loading

Indikator	Loading Factor	Rule Of Thump	Keterangan
F2.1	0,508	0,4	Memenuhi
F2.2	0,709	0,4	Memenuhi
F2.5	0,794	0,4	Memenuhi
F2.9	0,857	0,4	Memenuhi

Sumber : SmartPLS, Olahan Peneliti, 2024

Berdasarkan dari data tabel 4.32 diatas setelah dilakukan second outer loading dengan menghapus 6 indikator pernyataan diantaranya **F2.3 0,-0,085, F2.4 0,253, F2.6 -0,436, F2.7 0,365, F2.8 0,197 dan F2.10 -0,656**. menunjukkan bahwa di dalam variabel factor Penerapan Dana Desa dengan 6 indikator pernyataan sudah tidak ada lagi indikator yang tidak memenuhi kriteria. Semua indikator diatas *rule of thump* yaitu $> 0,4$. Hal tersebut menunjukkan semua pernyataan direspon dengan baik oleh responden.

Tabel 4.17 Convergent validity Faktor Capaian Indeks Desa Membangun Setelah Dilakukan Second Outer Loading

Indikator	Loading Factor	Rule Of Thump	Keterangan
F3.1	0,875	0,4	Memenuhi
F3.2	0,863	0,4	Memenuhi
F3.6	0,704	0,4	Memenuhi
F3.10	0,513	0,4	Memenuhi
F3.11	0,677	0,4	Memenuhi
F3.12	0,556	0,4	Memenuhi

Sumber : SmartPLS, Olahan Peneliti, 2024

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa di dalam Faktor Capaian Indeks Desa Membangun setelah dilakukan *second outer loading* dengan menghapus 8 indikator yaitu F3.3, F3.4, F3.5, F3.7, F3.8, F3.9, F3.13, F3.14 dengan *loading factor* -0,043, -0,054, -0,111, -0,325, 0,351,-0,471, -0,143, -0,253

kini menjadi 6 indikator pernyataan dan semua indikator sudah memenuhi *rule of thumb* yaitu nilai *loading factor* lebih besar dari 0,40. Hal tersebut menunjukkan kini hanya tersisa pernyataan yang direspon baik oleh responden.

b). Discriminante Validity

Dalam analisis *discriminant validity* dimana model pengukuran pada masing-masing indikator konstruk bersifat reflektif dilakukan dengan cara melihat nilai *cross loading* pada masing-masing variabel. Dalam pengujian *discriminant validity* menggunakan *Average Variance Extracted* (AVE). Adapun parameter *cross loading* dalam menilai nilai *average variance extracted* untuk mengetahui tingkat validitas dari masing-masing indikator konstruk pada setiap variabel Menurut sugiyono (2017:125) sebesar 0,3. Jika angka korelasi yang diperoleh lebih besar dari pada nilai standar maka pertanyaan tersebut valid atau signifikan (Sugiono, 2017).. Hasil analisis *discriminant validity* dapat dikemukakan pada table di bawah ini.

Tabel 4.18 Discriminante Validity Pada Average Variance Extracted (AVE)

Faktor	Nilai AVE
(F0) Dana Desa	0,856
(F1) Pengetahuan Dana Desa	0,766
(F2) Penerapan Dana Desa	0,531
(F3) Capaian Indeks Desa Membangun	0,506

Sumber : SmartPLS, Olahan Peneliti, 2024

Berdasarkan hasil running data Tabel 4.34 memperlihatkan nilai *average variance extracted* (AVE) pada masing-masing faktor telah memenuhi kriteria dalam *discriminant validity*. Adapun nilai AVE di masing-masing faktor yaitu F0

nilai AVE 0,856, F1 nilai AVE 0,766, F2 nilai AVE 0,531 dan F3 nilai AVE 0,506. Hal ini menunjukkan nilai yang lebih besar dari *average variance extracted* (AVE) ($>0,30$).

Cara lain untuk melihat *discriminante validity* yaitu dengan cara melihat nilai *fornell larcker criterion* yaitu nilai akar dari AVE harus lebih besar dari kolerasi dengan faktor yang lain. Adapun tabelnya seperti dibawah ini.

2. Uji Reabilitas

a). Composite Reability

Dalam melakukan uji reliabilitas yang bertujuan untuk membuktikan seberapa akurat, konsistensi dan ketepatan instrument didalam mengukur suatu konstruk. Penggunaan composite reliability bertujuan untuk menguji reliabilitas suatu konstruk (Ghozali dan Latan, 2012). Konstruk dinyatakan reliable jika nilai composite reliability maupun cronbach alpha $> 0,70$ (Ghozali & Latan, 2015). Hasil dari analisis data memperlihatkan sebagai berikut.

Tabel 4.19 Composite Reability

Faktor	Composite Reliability	Keputusan
F0	0,967	Reliabel
F1	0,963	Reliabel
F2	0,814	Reliabel
F3	0,855	Reliabel

Sumber : SmartPLS, Olahan Peneliti, 2024

Dari tabel diatas dapat dipahami bahwa masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai reliabilitas yang berbeda-beda dengan nilai F1 0,967 ($>0,07$), F2 0,963 ($>0,07$), F0 0,814 ($>0,07$) dan F3 0,855 ($>0,70$). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa instrument pada variabel penelitian ini semuanya memiliki tingkat reliabilitas yang baik, atau dengan kata

lain memiliki kehandalan (terpercaya) dan dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya.

B. Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

1. R-Square

Dalam Pengujian pada model strukturan (inner model) bertujuan untuk melihat hubungan antara variable. Pengukuran dilakukan dengan melihat nilai R-Square yang nantinya dapat diketahui tingkat variance terhadap perubahan variable independent terhadap variable dependent. Hasil analisis R-Square ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.20 R-Square

Faktor	R-Square
Dana Desa	0,870

Sumber : SmartPLS, Olahan Peneliti, 2024

Berdasarkan Tabel 4.38 diatas yang memperlihatkan nilai R-Square faktor Dana Desa sebesar 0,539. Hal tersebut menunjukkan bahwa varian pada faktor Informasi tentang *pentahelix system*, faktor kolaborasi Pengetahuan Dana Desa, Penerapan Dana Desa dan Capaian Indeks Desa Membangun sebesar 0,870 atau sebesar 87%.

2. F Squared

F squared digunakan untuk menilai besarnya pengaruh antar variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai f 0,02 sebagai kecil, 0,15 sebagai sedang dan nilai 0,35 sebagai besar. Nilai kurang dari 0,02 bisa diabaikan atau tidak ada efek. Adapun nilai f squared dari analisis data tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 4.21 F Squared

Faktor	F Squared
(F1) Pengetahuan Dana Desa → Dana Desa	0,362
(F2) Penerapan Dana Desa → Dana Desa	0,003
(F3) Capaian Indeks Desa Membangun → Dana Desa	0,400

Sumber : SmartPLS, Olahan Peneliti, 2024

Berdasarkan Tabel diatas dapat dinyatakan bahwa pengujian f squared sebagai berikut:

1. Pengaruh faktor Pengetahuan Dana Desa terhadap Dana Desa memiliki nilai f squared sebesar 0,362. Hal ini mengidentifikasikan bahwa pengaruh Pengetahuan Dana Desa terhadap Dana Desa tergolong besar (kuat)
2. Pengaruh faktor Penerapan Dana Desa terhadap Dana Desa memiliki nilai f squared sebesar 0,003. Hal ini mengidentifikasikan bahwa Pengaruh Penerapan Dana Desa terhadap Dana Desa tergolong kecil (lemah)
3. Pengaruh faktor Capaian Indeks Desa Membangun terhadap Dana Desa memiliki nilai f squared sebesar 0,400. Hal ini mengidentifikasikan bahwa Capaian Indeks Desa Membangun terhadap Dana Desa tergolong besar (kuat).

C. Uji Multikolienaritas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antar variabel-variabel bebas (independen) dalam suatu model regresi linear berganda (Kurniawan, 2014). Mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model regresi, dapat diketahui dengan memperhatikan nilai tolerance dan

nilai VIF (Variance Inflation Factor) apabila $VIF > 10$ dan nilai tolerance $< 0,10$ maka variabel terjadi multikolinearitas (Ghozali, 2016).

Tabel 4.22 Uji Multikolinearitas

Faktor	Nilai VIF
(F1) Pengetahuan Dana Desa	4,194
(F2) Penerapan Dana Desa	1,720
(F3) Capaian Indeks Desa Membangun	4,805

Sumber : SmartPLS, Olahan Peneliti, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa masing-masing faktor memiliki inner VIF values dibawah 5 (< 5). Hal tersebut menunjukkan bahwa faktor terbebas dari multikolinearitas yaitu tidak terjadi kolerasi antara variabel laten sehingga model dalam penelitian dapat dilanjutkan ke tahapan selanjutnya.

D. Pengujian Hipotesis Hasil Penelitian

Ketentuan dalam pengujian hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai original sample sebagai nilai coefficient atau disebut juga nilai beta. Dalam menetapkan penerimaan atau penolakan pada H_0 dalam pengujian hipotesis, dapat dilihat dari nilai pada kolom T Statistic dan nilai pada kolom P Values. Adapun ketentuannya adalah jika nilai t statistic lebih besar dari nilai t table ($t \text{ statistic} > t \text{ tabel}$) pada taraf signifikansi 5 % ($t \text{ table}$ dilihat dari jumlah sampel, dimana sampel pada penelitian ini berjumlah 82 responden) atau menggunakan nilai P Value dengan ketentuan jika $< 0,05$ dimana kesimpulannya tolak H_0 , dengan demikian dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan, begitu juga sebaliknya. Hasil Analisis Data sebagai berikut:

Tabel 4.23 Uji Hipotesis

Original Sample	T-Statistic	p-values	Keputusan	
F1 → F0	0,445	2,592	0,010	H0 – Ditolak
F2 → F0	0,027	0,342	0,732	H0 – Diterima
F3 → F0	0,500	2,905	0,004	H0 – Ditolak

Sumber : SmartPLS, Olahan Peneliti, 2024

Berdasarkan hasil olahan data diatas dapat dibuat kesimpulan antara lain:

1. Pengaruh Pengetahuan Dana Desa terhadap Dana Desa diperoleh nilai P Values 0,010 yaitu $<0,05$. Ketentuannya ditolak H_0 , maka dapat simpulkan bahwa faktor Pengetahuan Dana Desa memiliki pengaruh signifikan terhadap Dana Desa
2. Pengaruh faktor Penerapan Dana Desa terhadap Dana Desa diperoleh nilai P Value 0,732 yaitu $>0,05$. Ketentuannya diterima H_0 , maka dapat simpulkan bahwa faktor Penerapan Dana Desa memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap Dana Desa
3. Pengaruh faktor Capaian Indeks Desa Membangun terhadap Dana Desa diperoleh nilai P Value 0,004 yaitu $<0,05$. Ketentuannya ditolak H_0 , maka dapat simpulkan bahwa faktor Capaian Indeks Desa Membangun memiliki pengaruh signifikan terhadap dana desa.

E. Pembahasan

1. Pengaruh Pengetahuan Dana Desa terhadap Dana Desa

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat kita lihat bawah pengetahuan dana desa berpengaruh terhadap Dana Desa. Hal tersebut ditunjukkan oleh jawaban responden yang menjawab setuju dengan pernyataan tersebut. Ini ditunjukkan dalam point pertanyaan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, mengatur

tentang pengelolaan dan penetapan dana desa dari APBN yang diperuntukan bagi desa dan di transfer melalui APBD kabupaten/kota.

Dimana artinya perangkat desa, pelaku UMKM, Pemuda Desa, BUMDesa, LKMD/LSM, PKK serta masyarakat di Desa Sarimattin dan Pematang Sidamanik mengetahui tentang pengetahuan dana desa dan mengetahui sumber dana desa.

2. Pengaruh Penerapan Dana Desa terhadap Dana Desa

Berdasarkan penelitian dapat kita lihat bahwa penerapan dana desa memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap dana desa. Berikut penjelasannya antara lain:

1. Akses pusat pasar di desa Sarimattin dan Pematang Sidamanik tidak memiliki pusat pasar di dalam desa tersebut. Oleh karena itu, Masyarakat dari kedua desa tersebut harus pergi ke desa Saitbuttu Saribu untuk melakukan transaksi jual beli kebutuhan rumah tangga
2. Akses Polindes di desa Sarimattin dan Pematang Sidamanik tidak ada, jika masyarakat di desa ingin melakukan kegiatan pengobatan maka harus pergi keluar desa
3. Setiap rumah tangga di desa Sarimattin dan Pematang Sidamanik tidak memiliki akses sumur pribadi dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi kedua desa tersebut mendapatkan sumber air dari air PAM yang digunakan bukan air yang diolah dari PDAM melainkan milik non-pemerintah
4. Akses pendidikan di desa Sarimattin dan Pematang Sidamanik hanya tercukupi SD dan SMP saja sedangkan untuk Tingkat SMA warga desa

harus menyekolahkan anaknya keluar desa yang jarak dari pusat desa kurang lebih 19 km

5. Akses Bank Umum dan Swasta di desa Sarimattin dan Pamatang Sidamanik tidak tercukupi hal ini membuat masyarakat kedua desa tersebut harus ke pusat kota untuk mengambil uang dan mengurus yang berkaitan dengan Bank

3. Pengaruh Capaian Indeks Desa terhadap Dana Desa

Berdasarkan temuan penelitian dari hasil olahan data dapat dilihat bahwa variabel capaian indeks desa membangun memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dana desa. Hal ini dapat diartikan capaian indeks desa membangun pada desa Sarimattin dan Pamatang Sidamanik tercukupi dari masing-masing ke tiga indikator seperti Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara analisis ekonomi deskriptif, perkembangan dana desa di kabupaten Simalungun pada tahun 2015-2023 dimasa pemerintah Jokowi Widodo serta capaian indeks desa membangun. Dapat dilihat dari grafik perkembangan dana desa di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara periode tahun 2015-2023 mengalami kenaikan serta penurunan dana desa. Mencatat peningkatan signifikan dalam penggunaan dan pelaksanaannya Perkembangan Dana Desa juga menunjukkan upaya pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana tersebut. Dalam hal ini Kabupaten simalungun mencatat capaian Indeks Desa Membangun dimana IDM dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Pada tahun 2015 nilai IDM yang diperoleh kabupaten simalungun yaitu 0,5503 artinya statusnya adalah tertinggal seiring berjalannya waktu grafik perkembangan IDM di kabupaten Simalungun di tahun 2023 mencapai nilai 0,6655 yang dimana artinya memiliki status berkembang

2. Dari hasil regresi menggunakan model ekonometrika menunjukkan bahwa, variabel dana desa (DD) dan pengeluaran pemerintah (PP) berpengaruh signifikan terhadap variabel indeks desa membangun (IDM) secara simultan. Sedangkan pada variabel produk domestik regional bruto-perkapita (PDRB-PK) tidak berpengaruh terhadap variabel indeks desa membangun (IDM) secara signifikan secara simultan
3. Dari hasil olahan SmartPLS menunjukan bahwa faktor Penerapan Dana Desa tidak berpengaruh signifikan terhadap Dana Desa, namun pada faktor Pengetahuan Dana Desa dan Capaian Indeks Desa Membangun berpengaruh signifikan terhadap Dana Desa.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menyusun dan memberikan saran kepada pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintahan Kabupaten Simalungun untuk memperhatikan dan melakukan pengawasan kepada pemerintah desa dalam melakukan pemanfaatan dan penerapan dana desa di Kabupaten Simalungun
2. Diharapkan kepada pemerintah desa dalam melakukan pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) tidak dilakukan 1 tahun sekali melainkan harus dilakukan 5 tahun sekali, hal ini dikarenakan perubahan dan perkembangan pada desa tidak dapat diukur dalam waktu 1 tahun melainkan rentang waktu yang lebih lama agar memberikan prespektif yang lebih baik mengenai dampak dan hasil dari kebijakan dan program pembangunan agar mencapai indeks desa membangun yang lebih baik

3. Diharapkan pada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian lanjutan pada model ekonometrika yaitu untuk memperhatikan variabel bebas terutama pada variabel PDRB-PK yang tidak signifikan pada variabel terikat yaitu IDM
4. Diharapkan pada pemerintah desa untuk melakukan penerapan dana desa dengan memperhatikan transparansi dan akuntabilitas, memastikan semua pengeluaran dan penerimaan dan dicatat dengan jelas dan dilaporkan secara rutin kepada masyarakat untuk menjaga kepercayaan. Partisipasi masyarakat sangat penting, oleh karena itu perlu dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengawasan melalui musyawarah desa untuk menentukan prioritas penggunaan dana.

DAFTAR PUSTAKA

- Aceh, P., Sosial, D., & Zulhilmi, M. (2018). *Analisis Pola Migrasi Penduduk di Dataran Tinggi Kabupaten Aceh Tengah*. 9(2), 104–115.
- Gujarati, D. N. (2016). *Dasar-dasar Ekonometrika* (5th ed.). Penerbit Salemba Empat.
- Rahayu, S. E. (2020). *Perekonomian Indonesia*. Perdana Publishing.
- Hafni, R. (2024). *Statistika Ekonomi*. Perdana Publishing.
- Journal, D., & Volume, E. (2016). *ANALYSIS OF VILLAGE FUND MANAGEMENT AS REALIZATION OF ONE OBJECTIVE*. 1(Dd), 136–150.
- Kecamatan, G., & Kabupaten, L. (2014). *Dosen Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang*. 29. 29–39.
- Kemendesa. (2024). *Hasil Rekomendasi IDM*. Kemendesa. <https://idm.kemendesa.go.id/rekomendasi>
- Kominfo. (2019). *Kucurkan Rp187 T Dana Desa, Hasilnya Mulai Jalan Sampai Fasilitas Pendidikan*. Kominfo. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/15840/kucurkan-rp187-t-dana-desa-hasilnya-mulai-jalan-sampai-fasilitas-pendidikan/0/berita>
- Kuncoro, M. (2013). *Metode riset untuk bisnis dan ekonomi bagaimana meneliti dan menulis tesis?* (4th ed.). Penerbit Erlangga.
- Melalui, A., Tunai, B., Blt, L., Astuti, N., & Zubaedah, I. (2024). *KEBIJAKAN PUBLIK PEMERINTAHAN JOKO WIDODO DAN MA ' RUF MENANGGULANGI MASALAH KEMISKINAN DI INDONESIA*. 22(July 2023).
- Nafi, M. (2024). *Perkembangan desa di Indonesia, 2019 - 2023 berdasarkan IDM*. Lokadata. <https://kanaldesa.com/artikel/perkembangan-desa-di-indonesia-2019-2023-berdasarkan-idm>
- Nasution, S. A., Valentin, P. M., Sarumaha, A., & Manurung, A. (2023). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi , Pendapatan Asli Daerah Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten / Kota Di Sumatera Utara*. 7, 1841–1852.
- Penelitian, J., & Dan, S. (2018). *Analisis kinerja pendamping desa dalam upaya*

membangun kemandirian desa.

- Priyarsono, D. S. (2017). *Membangun dari Pinggiran : Tinjauan dari Perspektif Ilmu Ekonomi Regional To Develop from The Periphery : 1(1)*, 42–52.
- Ramadhani, R. W., & Prihantoro, E. (2020). *Strategi Komunikasi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam Menerapkan Nawacita dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Development Communication Strategy by Bojonegoro District Government on Applying Nawacita and Sustainable Development Goals. 18(02)*, 117–127.
- Sianipar, R. T., Putri, J. A., Inrawan, A., & Pandapotan, H. (2023). *Efektivitas Penguatan Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan Di Kabupaten Simalungun. 7(April)*, 1084–1095.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *Pembangunan Ekonomi* (9th ed.). Penerbit Erlangga.
- Updesa. (2024). *Besaran Dana Desa 2024 sesuai UU dan Kemenkeu*. Updesa. <https://updesa.com/besaran-dana-desa-2024/>
- Wahyuningsih, T. (2020). *Ekonomi Publik* (1st ed.). Rajawali Pers.

LAMPIRAN

A. Data Regresi Linear Berganda (Diolah)

- Data Regresi**

Tahun	IDM	DD	PDRB Perkapita	PP
2015	0,5503	245.799.346	31.960,56	2.167.169.703.240,00
2016	0,5694	230.404.778	35.252,50	2.185.034.609.508,00
2017	0,5712	294.047.540	38.211,19	2.760.748.969.595,00
2018	0,5898	259.232.136	41.038,39	2.269.698.962.407,00
2019	0,6342	294.442.204	43.832,80	1.879.852.757.328,00
2020	0,6452	298.689.733	40.010,29	2.340.664.187.442,00
2021	0,6489	296.800.840	42.433,45	1.929.553.694.024,00
2022	0,6597	306.916.025	46.370,49	2.276.772.829.461,00
2023	0,6655	330.739.159	50.427,74	2.465.601.692.008,00

- Statistika Deskriptif**

	IDM	DD	PDRB_PK	PP
Mean	0.614911	2.84E+08	41059.71	2.25E+12
Median	0.634200	2.94E+08	41038.39	2.27E+12
Maximum	0.665500	3.31E+08	50427.74	2.76E+12
Minimum	0.550300	2.30E+08	31960.56	1.88E+12
Std. Dev.	0.044437	32102167	5604.413	2.66E+11
Skewness	-0.256555	-0.425910	0.016850	0.384830
Kurtosis	1.394071	2.111994	2.368939	2.768388
Jarque-Bera	1.065858	0.567807	0.149765	0.242257
Probability	0.586883	0.752839	0.927853	0.885920
Sum	5.534200	2.56E+09	369537.4	2.03E+13
Sum Sq. Dev.	0.015797	8.24E+15	2.51E+08	5.67E+23
Observations	9	9	9	9

B. Kuesioner Penelitian

Kuesioner Penelitian

STRATEGI PENGEMBANGAN DESA PINGGIRAN MENJADI DESA NAWACITA MELALUI PEMANFAATAN DANA DESA DESENTRALISASI ERA KEPEMIMPINAN JOKOWI DI KABUPATEN SIMALUNGUN

Berikut ini adalah kuesioner yang berkaitan dengan penelitian. Anda merupakan responden yang tepat, Oleh karena itu disela-sela kesibukan anda, kami memohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu, Sudara/I untuk dapat berpartisipasi

dengan mengisi kuesioner penelitian ini dan memberikan jawaban atas pertanyaan maupun pernyataan yang diajukan secara lengkap dan benar. Saya mengucapkan terima kasih atas ketersediaan dan partisipasi Bapak/Ibu dalam penelitian ini.

Petunjuk pengisian:

Isilah jawaban sesuai pendapat anda dengan memberikan tingkat penilaian dengan tanda checklist (√) pada kolom yang tersedia.

Skala penilaian:

1 = Sangat Tidak Setuju

7 = Sangat Setuju

Berikut daftar kuesioner saya:

I. IDENTITAS RESPONDEN

Nomor :.....(di isi
responde peneliti)

n

Nama :.....
responde ...

n

Jenis : Laki-laki Perempuan
kelamin

Usia :.....Tahun

Domisili :.....
...

Status : Perangkat Desa LSM

Pekerjaan Pelaku UMKM Akademisi

LKMD Karang Taruna

dll.....

...

II. DANA DESA

NO	PERNYATAAN/PERTANYAAN	Skala						
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Mengetahui tentang dana desa							
2.	Apakah transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa diawasi oleh masyarakat desa dan pihak-pihak terkait							
3.	Apakah pemerintah desa sudah bertanggung jawab untuk mengelola dana desa secara efisien guna memastikan dampak yang maksimal							
4.	Apakah sudah tepat pemerintah desa mengalokasikan dana desa untuk proyek-							

	proyek infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat						
5.	Apakah sumber pendanaan dana desa yang diberikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa sudah diolah secara efisien guna memastikan dampak yang maksimal						

III. PENGETAHUAN DANA DESA (F2)

NO	PERNYATAAN	Skala						
		1	2	3	4	5	6	7
	<i>Apa itu dana desa</i>							
1.	Mengetahui sumber dana desa dari APBN yang kemudian di transfer melalui APBD							
2.	Bagaimana kinerja penyerapan dana desa							
3.	Bagaimana dampak dana desa bagi kemajuan desa (menurun, biasa saja, meningkat)							
4.	Mengetahui masih ada dana bantuan selain dana desa yang dialokasikan (PKH, BLT, BPNT dan lain sebagainya)							
	<i>Tujuan dan manfaat dana desa</i>							
5.	Mengetahui tujuan dan manfaat dana desa							
6.	Apakah dana desa membantu peningkatan perekonomian masyarakat setempat							
7.	Seberapa besar dampak dana desa terhadap kualitas hidup warga di desa							
8.	Apakah terdapat program yang telah direalisasikan di desa menggunakan dana desa							

IV. PENERAPAN DANA DESA (F3)

NO	PERNYATAAN	Skala						
		1	2	3	4	5	6	7
	<i>Mendukung Kegiatan Ekonomi Masyarakat Desa</i>							
1.	Apakah terdapat BUMDesa yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat desa (Aktif/ Tidak aktif)							
2.	Apakah terdapat ruang publik terbuka yang dimanfaatkan warga desa untuk bersantai dan berolahraga (lapangan terbuka, taman, alun-alun dan sebagainya)							
3.	Apakah akses jalan di desa baik							

4.	Apakah terdapat akses pusat pasar di desa yang menjadi sumber utama transaksi jual-beli kebutuhan rumah tangga							
	<i>Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Desa</i>							
5.	Apakah sumber air yang digunakan warga desa memiliki kualitas yang baik							
6.	Apakah terdapat saluran pembuangan limbah cair/ limbah padat yang dihasilkan dari rumah tangga di desa							
7.	Apakah terdapat akses PAUD di desa							
8.	Apakah masyarakat di desa aktif dalam berpartisipasi kegiatan posyandu							
9.	Apakah terdapat polindes di desa							
10	Apakah setiap rumah tangga memiliki akses sumur pribadi dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari							

V. CAPAIAN INDEKS MEMBANGUN (F4)

NO	PERNYATAAN	Skala						
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Mengetahui tentang IDM							
2.	Mengetahui tiga indikator IDM (IKS, IKE dan IKL)							
	<i>Indeks Ketahanan Sosial</i>							
3.	Apakah masyarakat di desa sering melakukan kegiatan gotong royong							
4.	Apakah terdapat tempat ibadah di desa (Masjid, Gereja, Wihara, Kelenteng dan Pura)							
5.	Apakah akses pendidikan di desa tercukupi (SD, SMP dan SMA)							
6.	Apakah terdapat fasilitas perpustakaan desa atau taman baca masyarakat yang beroperasi di desa							
7.	Apakah terdapat sarana informasi seperti (papan informasi desa, website dan lain sebagainya)							
	<i>Indeks Ketahanan Ekonomi</i>							
8.	Apakah terdapat sumber penghasilan utama di desa seperti (Pertanian, Perkebunan, Industri, Pariwisata dan lain sebagainya)							
9	Apakah terdapat kebun gizi yang dikelola dan dimanfaatkan secara bersama oleh masyarakat							

10.	Apakah terdapat pemberdayaan masyarakat seperti (edukasi, pelatihan dan lain sebagainya)						
11.	Apakah terdapat Bank Umum dan Bank Swasta di desa						
12.	Apakah terdapat angkutan umum di desa						
	Indeks Ketahanan Lingkungan						
13.	Apakah terdapat pencemaran lingkungan di desa (air, udara dan lain sebagainya)						
14.	Apakah terdapat fasilitas upaya terjadinya bencana alam di desa						

- **Jawaban Responden Kuesioner Strategi Pengembangan Desa Pinggiran Menjadi Desa Nawacita Melalui Pemanfaatan Dana Desa Desentralisasi Era Kepemimpinan Jokowi Di Kabupaten Simalungun**

1. Jawaban Responden Kuesioner Variabel Dana Desa

No.	F0.1	F0.2	F0.3	F0.4	F0.5
1	4	4	4	4	4
2	6	6	6	7	6
3	7	1	4	4	4
4	1	1	1	1	1
5	4	4	5	6	5
6	6	6	6	6	6
7	5	4	4	4	4
8	5	4	4	4	4
9	5	5	5	5	5
10	2	4	4	4	4
11	1	1	1	1	1
12	7	7	7	7	7
13	7	7	7	7	7
14	4	4	5	6	5
15	6	6	6	6	6
16	5	5	5	5	5
17	5	5	5	5	5
18	5	5	5	5	5
19	7	6	7	7	7
20	7	6	5	6	5
21	7	6	5	6	5
22	7	6	5	5	6
23	7	5	6	5	5
24	7	5	5	5	5
25	7	6	6	6	6
26	4	4	4	4	4
27	5	4	4	4	4

28	5	5	5	5	5
29	4	3	5	3	5
30	7	7	7	7	7
31	5	4	6	4	6
32	5	5	5	5	5
33	5	4	6	4	5
34	5	4	6	4	5
35	4	4	6	4	5

2. Jawaban Responden Kuesioner Pengetahuan Dana Desa

No.	F1.1	F1.2	F1.3	F1.4	F1.5	F1.6	F1.7	F1.8
1	4	4	3	4	4	4	7	4
2	1	1	6	7	6	6	6	6
3	4	4	4	6	4	4	4	5
4	2	2	2	2	2	2	2	2
5	5	5	5	5	5	6	5	6
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	3	4	5	5	5	5	5	5
8	4	4	4	4	4	4	4	4
9	3	5	6	6	5	5	5	5
10	2	4	5	4	3	4	5	5
11	2	2	2	2	2	2	2	2
12	7	7	7	7	7	7	7	7
13	7	7	7	7	7	7	7	7
14	5	5	5	5	5	6	5	6
15	6	6	6	6	6	6	6	6
16	4	4	4	4	5	5	5	5
17	5	5	5	5	5	5	5	5
18	5	5	5	5	5	5	5	5
19	7	7	7	7	6	6	6	6
20	5	6	6	6	6	6	6	6
21	5	5	6	6	6	6	5	4
22	5	5	6	6	6	6	6	3
23	5	5	5	6	6	6	6	6
24	4	4	4	4	4	4	4	4
25	4	5	5	5	5	5	5	5
26	3	4	5	5	5	5	5	5
27	3	5	5	7	6	6	4	4
28	4	4	4	4	4	4	4	4
29	3	4	4	6	5	5	5	5
30	7	7	7	7	7	7	7	7
31	5	5	5	5	5	5	5	5
32	5	5	5	5	5	5	5	5
33	6	6	7	6	5	6	5	6

34	6	4	5	6	6	5	6	5
35	7	5	4	5	5	6	4	6

3. Jawaban Responden Kuesioner Penerapan Dana Desa

No.	F2.1	F2.2	F2.3	F2.4	F2.5	F2.6	F2.7	F2.8	F2.9	F2.10
1	1	4	7	7	7	7	7	7	4	1
2	4	6	4	4	5	4	1	7	7	6
3	6	7	6	7	4	4	7	5	1	4
4	6	6	7	7	6	4	6	7	1	3
5	4	5	5	5	6	6	7	7	5	1
6	6	6	6	6	6	6	7	7	5	1
7	2	6	7	5	7	7	3	7	6	5
8	5	7	4	7	7	3	7	7	7	1
9	5	7	5	7	7	3	7	5	7	1
10	5	5	5	7	5	5	7	7	7	1
11	6	6	7	7	5	4	6	7	1	3
12	6	7	6	7	7	4	7	7	7	1
13	7	7	7	7	7	5	7	7	7	1
14	4	5	5	5	6	6	7	7	6	1
15	6	7	6	7	7	4	7	7	5	1
16	3	7	6	7	7	4	7	7	5	1
17	7	7	6	6	7	4	7	7	7	1
18	7	7	6	6	7	5	7	7	7	1
19	7	7	7	7	7	2	7	7	7	1
20	4	7	6	7	7	2	7	7	7	1
21	7	7	6	7	7	2	7	7	7	1
22	7	7	6	7	7	3	7	7	7	1
23	7	7	6	7	7	2	7	7	7	1
24	7	7	6	7	7	2	5	5	5	1
25	6	7	6	7	7	2	7	7	7	1
26	6	7	6	7	7	2	7	7	7	1
27	6	7	6	7	7	4	7	7	7	1
28	6	7	6	7	7	3	6	7	7	1
29	6	7	7	7	7	3	7	7	7	1
30	7	7	7	7	7	6	7	7	7	1
31	6	7	6	7	7	4	7	7	7	1
32	7	7	6	6	7	5	7	7	7	1
33	7	7	6	6	7	5	7	7	7	1
34	6	7	6	7	7	4	7	7	7	1
35	6	6	7	6	7	6	7	7	7	1

4. Jawaban Kuesioner Capaian Indeks Desa Membangun

No	F3.1	F3.2	F3.3	F3.4	F3.5	F3.6	F3.7	F3.8	F3.9	F3.10	F3.11	F3.12	F3.13	F3.14
1	4	4	4	7	4	2	4	4	4	4	1	4	1	4

2	7	7	6	7	6	1	6	5	4	4	1	4	4	4
3	1	1	6	7	6	1	7	6	6	4	1	6	5	4
4	1	1	7	7	7	1	6	6	6	1	1	4	1	1
5	5	5	5	6	5	4	4	5	5	4	4	6	4	4
6	5	5	5	7	6	5	5	7	5	5	5	7	1	1
7	2	2	5	7	5	5	5	7	4	6	4	7	1	1
8	3	3	5	7	6	4	4	7	6	5	5	7	1	1
9	4	4	7	7	6	4	4	7	4	4	4	7	1	1
10	3	3	4	7	6	4	4	7	4	5	4	6	2	1
11	1	1	7	7	7	1	6	6	6	1	1	4	1	1
12	7	7	6	7	6	3	4	5	4	4	4	7	4	1
13	7	7	7	7	6	6	6	7	5	5	5	7	1	1
14	5	5	5	6	5	4	4	5	5	4	4	6	4	4
15	6	6	6	7	6	5	5	7	4	6	5	7	1	1
16	3	3	6	7	6	4	4	7	5	6	5	6	1	1
17	4	4	6	7	5	4	4	7	5	4	5	7	1	1
18	4	4	6	7	5	4	4	7	5	4	5	7	1	1
19	6	6	5	7	6	6	4	7	3	3	6	7	1	1
20	5	5	6	7	6	3	3	7	5	5	6	7	1	1
21	4	4	5	7	6	3	3	7	3	3	5	7	1	1
22	5	5	6	7	6	3	3	7	3	3	5	7	1	1
23	5	5	6	7	6	3	3	7	3	3	5	6	1	1
24	5	5	6	7	6	3	3	7	4	4	6	7	1	1
25	4	4	6	7	6	3	3	7	4	4	5	7	1	1
26	3	3	5	7	6	3	7	3	3	5	7	1	1	1
27	3	3	5	7	6	5	3	7	3	3	5	7	1	1
28	4	4	5	5	6	3	4	7	3	4	5	7	1	1
29	3	3	5	7	6	4	4	7	4	4	5	7	1	1
30	7	7	7	7	7	7	7	7	4	4	6	7	1	1
31	3	3	6	7	6	4	4	7	4	3	4	7	1	1
32	4	4	6	7	5	4	4	7	5	4	5	7	1	1
33	4	3	6	7	6	7	4	7	5	4	5	7	1	1
34	4	4	6	7	5	4	6	7	4	3	3	7	1	1
35	4	4	6	7	4	4	7	7	4	4	5	7	1	1

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**• Data Pribadi**

Nama : Tri Dias Palah
NPM : 2005180013
Tempat dan Tanggal Lahir : Bandar Setia, 13 Juni 2002
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Perhubungan, Dusun IX

• Data Pendidikan Formal

Tahun 2008-2014 : SD 105289
Tahun 2014-2017 : MTs. Amin Darussalam (AMDA)
Tahun 2017-2020 : SMA Negeri 2 Percut Sei Tuan
Tahun 2020-2024 : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Medan, 13 Agustus 2024

Tri Dias Palah

MAJLIS PENTHIKAN TEKNOLOGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN STUDIUM PERKULIAHAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Tarakanriban & Berdasarkan Keputusan Badan Amwal dan Keuangan Tinggi No. 002/01/2023/PT/UMSU
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622430 - 66234567 Fax. (061) 6625474 - 6631093
http://feb.umsu.ac.id -- feb@umsu.ac.id @umsuamedan @umsuamedan @umsuamedan @umsuamedan

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 1671 / TGS / IL3-AU / UMSU-05 / F / 2024

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : **Ekonomi Pembangunan**
Pada Tanggal : **07 Oktober 2023**

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : **Tri Dias Palah**
N P M : **2005180013**
Semester : **VIII (Delapan)**
Program Studi : **Ekonomi Pembangunan**
Judul Proposal / Skripsi : **Strategi Pembangunan Desa Pinggiran Menjadi Desa Nawacita Melalui Pemanfaatan Dana Desa Desentralisasi Era Kepemimpinan Jokowi Di Kabupaten Simalungun**

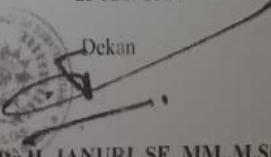
Dosen Pembimbing : **Dr. Prawidya Hariani RS, SE., M.Si.**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :


1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah dikeluarkanya Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL. " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 25 Juni 2025**
4. Revisi Judul.....

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 18 Dzulhijjah 1445 H
25 Juni 2024

Dekan

Dr. H. JANURI, SE., MM., M.Si., CMA
NIDN : 0109086502

Tembusan :
1. Peninggal.





MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH PIMPINAN PUSAT
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Pada hari ini Jumat, 07 Juni 2024 telah diselenggarakan seminar Proposal Program Studi Ekonomi Pembangunan menerangkan bahwa :

Nama : Tri Dias Palah
 N.P.M. : 2005180013
 Tempat / Tgl.Lahir : Bandar setia, 13 Juni 2002
 Alamat Rumah : Jl.Perhubungan Dusun IX
 Judul/Proposal : Strategi Pengembangan Desa Pinggiran Menjadi Desa Nawacita Melalui Pemanfaatan Dana Desa Desentralisasi Era Kepemimpinan Jokowi Di Kabupaten Simalungun

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul	Strategi Pengembangan Desa Pinggiran Menjadi Desa Nawacita Melalui Pemanfaatan Dana Desa Desentralisasi Era Kepemimpinan Jokowi Di Kabupaten Simalungun.
Bab I	Persiapkan Latar Belakang Mengenai Kabupaten Simalungun dan Desa.
Bab II	
Bab III	
Lainnya	
Kesimpulan	<input type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, Jumat, 07 Juni 2024

TIM SEMINAR

Ketua

 Dr.Prawidya Hariani RS, SE.,M.Si.

Pembimbing

 Dr. Prawidya Hariani RS, S.E., M.Si.

Sekretaris

 Dra.Hj.Roswita Hafni, M.Si.

Pemanding

 Dra. Hj. Roswita Hafni, M.Si.



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH PIMPINAN PUSA I
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext. 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Ekonomi Pembangunan yang diselenggarakan pada hari **Jumat, 07 Juni 2024** menerangkan bahwa:

Nama : Tri Dias Palah
N .P.M. : 2005180013
Tempat / Tgl.Lahir : Bandar setia, 13 juni 2002
Alamat Rumah : Jl.Perhubungan Dusun IX
JudulProposal :Strategi Pengembangan Desa Pinggiran Menjadi Desa Nawacita Melalui Pemanfaatan Dana Desa Desentralisasi Era Kepemimpinan Jokowi Di Kabupaten Simalungun

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi dengan pembimbing : *Dr. Prawidya Hariani RS, S.E., M.Si.*

Medan, Jumat, 07 Juni 2024

TIM SEMINAR

Ketua

Dr.Prawidya Hariani RS,SE.,M.Si.

Sekretaris

Dra.Hj.Roswita Hafni, M.Si.

Pembimbing

Dr. Prawidya Hariani RS, S.E., M.Si.

Pembanding

Dra. Hj. Roswita Hafni, M.Si.

Diketahui / Disetujui
A.n. Dekan
Wakil Dekan - I

24/06-2024.
Assoc.Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kaptan Mukhtar Bari No. 1, Medan, Telp. 061-6624507, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 3864/JDL/SKR/MAN/FEB/UMSU/11/12/2023

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 11/12/2023

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Tri Dias Palah
NPM : 2005180013
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Konsentrasi : Analisis Multivariat, Komputer dan Pengolahan Data serta Analisa Time Series

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : Melihat perkembangan dan pembangunan desa pinggiran menjadi desa nawacita dalam penggunaan dana desa

Rencana Judul


1. Strategi Pengembangan Desa Pinggiran Menjadi Desa Nawacita Melalui Pemantiaatan Dana Desa Desentralisasi Era Kepemimpinan Jokowi Di Kabupaten Simalungun
2. Dampak Pencetakan Mata Uang Baru Terhadap Mata Uang Lama Yang Beredar Di Masyarakat
3. Analisa Pembangunan Ibu Kota Baru Nusantara Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia

Objek Lokasi Penelitian : Desa Sarimattin Dan Desa Pamatang Sidamanik Di Kabupaten Simalungun

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(Tri Dias Palah)

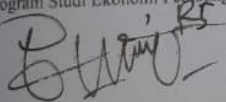

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

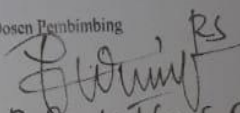
PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 3864/JDL/SKR/MAN FEB/UMSU/11/12/2023

Nama Mahasiswa : Tri Dias Palah
 NPM : 2005180013
 Program Studi : Ekonomi Pembangunan
 Konsentrasi Series : Analisis Multivariat, Komputer dan Pengolahan Data serta Analisa Time Series
 Tanggal Pengajuan Judul : 11/12/2023
 Nama Dosen Pembimbing^{*)} : Dr. Prawidya Hariani RS, S.E, M. Si

Judul Disetujui^{**)} : Strategi Pengembangan Desa Pinggir Menjadi Desa Hewecka Melalui Pemanfaatan Dana Desa Desentralisasi Era Kepemimpinan Jokowi Di Kabupaten Simalungun

Disahkan oleh:
 Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan

 (Dr. Prawidya Hariani RS., SE., M.Si.)

Medan, 11/12/2023
 Dosen Pembimbing

 (Dr. Prawidya Hariani) RS., SE., M. Si.

Keterangan:
 *) Ditanda-tangani oleh Ketua Program Studi
 **) Ditanda-tangani oleh Dosen Pembimbing
 Seluruh dokumen oleh Presi dan Dosen pembimbing, scan/ foto dan uploadlah terbitan ke-2 ini pada form online "Upload Pengesahan Judul Skripsi"